



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*  
(ISR) PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DAFTAR EFEK  
SYARIAH (DES)**

**SKRIPSI**

**AMILIA NURUL RADITYA**

**0806391101**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*  
(ISR) PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DAFTAR EFEK  
SYARIAH (DES)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi**

**AMILIA NURUL RADITYA**

**0806391101**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Amilia Nurul Raditya**

**NPM : 0806391101**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 24 Januari 2012**

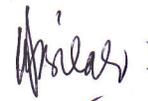
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Amilia Nurul Raditya  
NPM : 0806391101  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dodik Siswantoro, S.E., Ak., M.Sc., ACC. (  )

Penguji : Wasilah, S.E., Ak., M.E. (  )

Penguji : Sri Nurhayati, S.E., M.M., S.A.S. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan syukur yang utama penulis panjatkan kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang senantiasa dengan tulus ikhlas turut memberikan bantuan, dukungan, dan doa. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dodik Siswanto selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf juga Pak atas segala kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis telah banyak mereportkan Bapak dengan berbagai pertanyaan, e-mail, sms, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih ya, Pak.
2. Ibu Sylvia Veronica Narulita Purnama Siregar selaku Ketua Program Studi Akuntansi FEUI yang telah memudahkan proses pengajuan proposal skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran Ibu dalam tema skripsi penulis yang hingga akhirnya proposal skripsi tersebut dapat diangkat dan dikembangkan menjadi skripsi. Selain itu, terima kasih juga atas kesediaan Ibu dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulis, baik via e-mail maupun secara langsung.
3. Profesor I Gusti Ngurah Agung selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi UI yang telah meluangkan waktu dan membagi ilmu beliau kepada penulis terkait konsultasi model penelitian dan teknik mengolah data.
4. Tim Penguji Ujian Sidang Karya Akhir Ibu Wasilah, Ibu Sri Nurhayati, dan Bapak Dodik Siswanto yang telah meluluskan penulis untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi. Meskipun di hari H sempat terjadi perubahan dosen penguji dan perubahan waktu ujian yang sangat mendadak sehingga

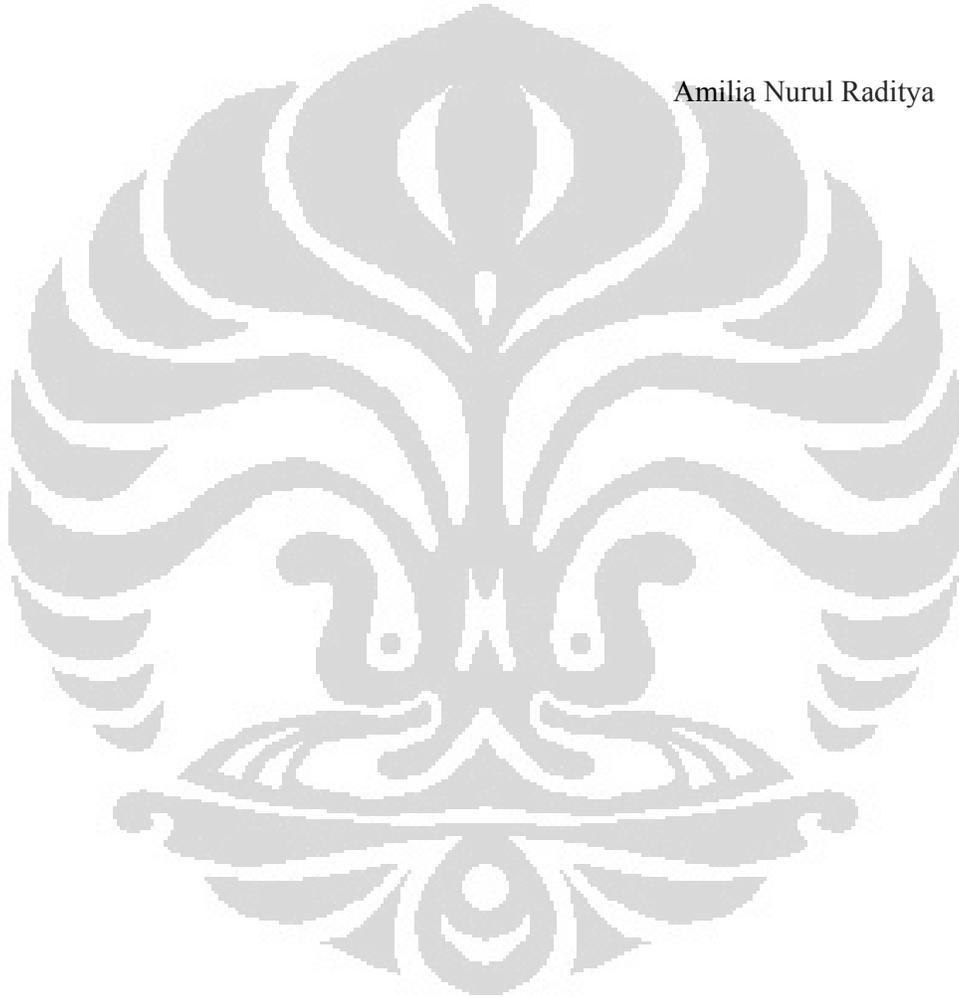
menimbulkan sedikit kepanikan hehe.. akan tetapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.

5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan asisten laboratorium yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis menimba ilmu di FEUI. Dan juga, seluruh pihak Departemen Akuntansi dan Biro Pendidikan FEUI terkait urusan administrasi dalam rangka mendukung terciptanya proses belajar-mengajar yang baik di FEUI.
6. Mbak Rina Hartini yang telah membantu dalam proses pengolahan data dari awal hingga selesai. Terima kasih Mbak atas ilmu dan waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena penulis amat sangat sering merepotkan Mbak. You're my saviour. Thanks Mbak!
7. Teman-teman baik penulis Chairunisa Azizah, Olfita Sari, Reny Hardianti, Ricarla Anjani, Karina Yuristiani, Nazhaira Fatharani, Dias Puspita Ningrum, Anisa Fitriani (Bunda), Maharani Putriayu, dan Amalia Ikhsana yang tiada henti-hentinya saling mendukung, saling mendoakan, dan saling memberi semangat satu sama lain. Susah senang kita selalu bersama (terharu). You guys the best!
8. Sahabat seperjuangan dari masa-masa *hedon* semester awal Chairunisa Azizah, Laela Dika Wulandari, dan Widi Laras Sari. Sahabat "sejabotabek"! ☺
9. Pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu di halaman ini. Terima kasih banyak semuanya.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Kusminarto dan Ibu Faridah Lubis. Terima kasih Pa, Ma, atas doa-doanya yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Dan juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada baik keluarga inti maupun keluarga besar dari mama dan papa yang turut mendoakan yang terbaik untuk skripsi penulis. Lalu adik dan kakak penulis yaitu Riandy Ar Rasyid dan Rathia Ayuningtyas atas pengertiannya dalam membangun *mood* yang kondusif selama penulis mengerjakan skripsi di rumah. Thank you so much my lovely family!

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang akan membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 24 Januari 2012

Amilia Nurul Raditya



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amilia Nurul Raditya  
NPM : 0806391101  
Program Studi : Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan



(Amilia Nurul Raditya)

## ABSTRAK

Nama : Amilia Nurul Raditya  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)

*Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang indikatornya spesifik pada prinsip-prinsip etis Islam. Dalam penelitian ini, penilaian tingkat pengungkapan ISR dilakukan pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). DES merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK. DES merupakan panduan investasi bagi reksa dana syariah untuk menempatkan dana dan bagi investor Muslim untuk berinvestasi pada efek syariah. Dengan menggunakan DES sebagai perusahaan sampel, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Karakteristik perusahaan yang diuji terdiri dari penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Namun, penerbitan sukuk, jenis industri, dan umur perusahaan bukan faktor penentu yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

Kata kunci:

*Islamic Social Reporting*, Daftar Efek Syariah, sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, umur perusahaan

## ABSTRACT

Name : Amilia Nurul Raditya  
Study Program: Accounting  
Title : Analysis Determinants of Disclosure Level of Islamic Social Reporting (ISR) among List of Sharia Securities (*Daftar Efek Syariah*-DES) Companies

Islamic Social Reporting (ISR) is a social responsibility disclosure index that has specific indicators on ethical principles of Islam. In this study, assessment a level of ISR disclosure performed among List of Sharia Securities (*Daftar Efek Syariah*-DES) companies. DES are collection of securities that are not contradict with Islamic principles and have been approved by BAPEPAM and LK. DES are guide for Islamic mutual fund to put their funds and for Muslim investor to invest in Islamic securities. By using DES as the sample firms, this study aims to identify factors that may influence a level of ISR disclosure. Company's characteristics that were tested consists of issuance of sukuk, firm size, profitability, industry type, and firm age. The results show that firm size and profitability have a significant positive influence on a level of ISR disclosure. However, the issuance of sukuk, industry type, and firm age are not significant factors in influencing a level of ISR disclosure.

Key words:

Islamic Social Reporting, List of Sharia Securities, sukuk, firm size, profitability, industry type, firm age

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengungkapan (Disclosure).....	9
2.1.1 Definisi Pengungkapan .....	9
2.1.2 Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela .....	11
2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	13
2.2.1 Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	13
2.2.2 <i>CSR Reporting</i> .....	16
2.3 Daftar Efek Syariah.....	18
2.4 <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	22
2.5 Penelitian Terdahulu .....	37
2.5.1 Faktor Penerbitan Sukuk.....	38
2.5.2 Faktor Ukuran Perusahaan .....	40
2.5.3 Faktor Profitabilitas.....	41
2.5.4 Faktor Jenis Industri.....	42
2.5.5 Faktor Umur Perusahaan.....	44
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Kerangka Pemikiran.....	46
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	47
3.3 Populasi, Metode Pengambilan Sampel, Sampel Penelitian, dan Data Panel.....	48
3.4 Metode Penelitian.....	51
3.4.1 Operasionalisasi Variabel.....	51

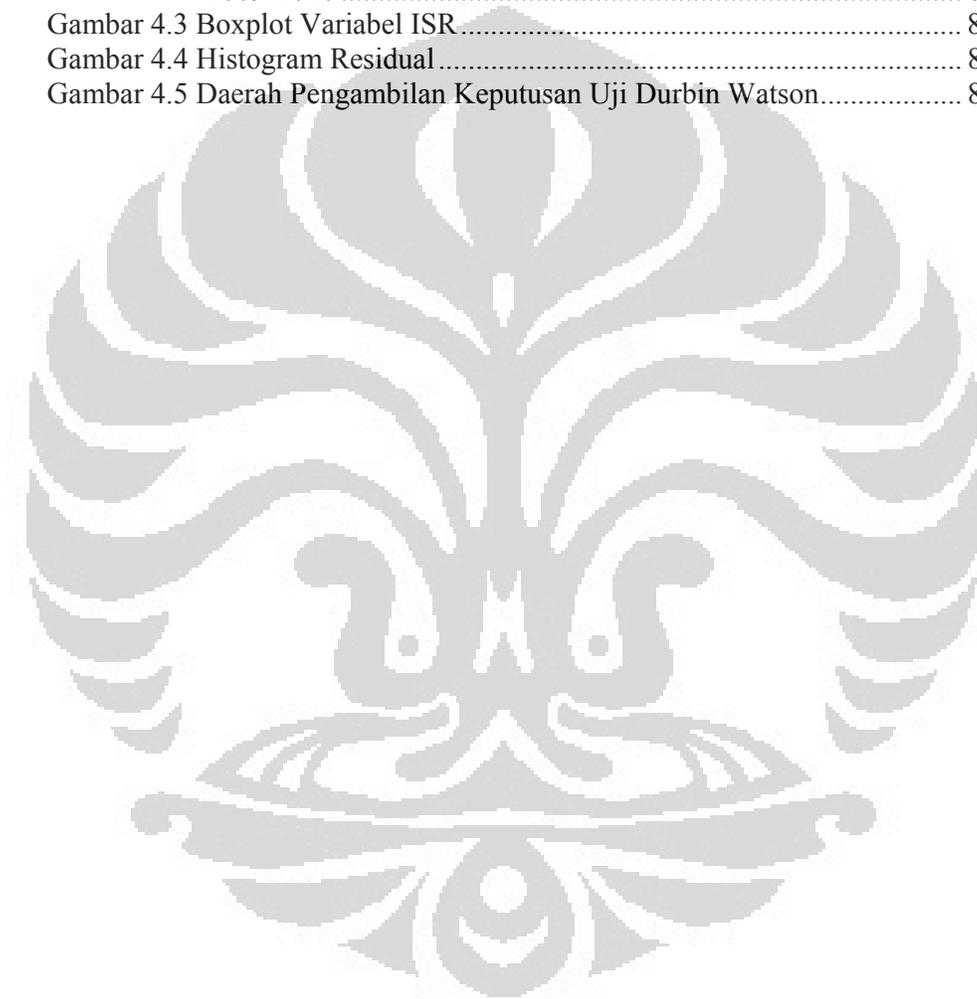
3.4.2 Hipotesis dan Model Penelitian .....	55
3.5 Teknik Pengolahan Data .....	58
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	58
3.5.2 Uji Normalitas Data .....	59
3.5.3 Analisis Residual.....	59
3.5.4 Uji Asumsi Klasik .....	59
3.5.5 Uji Hipotesis.....	61
<b>BAB 4 ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
4.1 Analisis Hasil <i>Content Analysis</i> .....	63
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	82
4.3 Uji Normalitas Data .....	85
4.4 Analisis Residual .....	87
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	87
4.5.1 Uji Multikolinearitas .....	87
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	88
4.5.3 Uji Autokorelasi .....	88
4.6 Analisis Hasil Regresi .....	89
4.6.1 Koefisien Determinasi.....	90
4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F) .....	90
4.6.3 Uji Signifikan Parsial (Uji-t).....	91
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
5.1 Simpulan.....	97
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	98
5.3 Saran .....	99
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel.....	50
Tabel 3.2 Jenis Industri berdasarkan Fact Book IDX 2010 .....	53
Tabel 3.3 Rangkuman Variabel Bebas, <i>Proxy</i> , dan Dugaan Tanda .....	54
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan dengan Skor Indeks ISR Tiga Tertinggi dan Tiga Terendah Tahun 2009-2010 .....	64
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan dengan Skor Indeks Tema ISR Tertinggi Tahun 2009-2010.....	67
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Proporsi Variabel <i>Dummy</i> .....	82
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel ISR .....	83
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan yang Diukur dengan Total Aset.....	83
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Profitabilitas yang Diukur dengan ROA .....	84
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Umur Perusahaan .....	85
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Skewness Awal.....	85
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Skewness setelah Outlier Dikeluarkan .....	86
Tabel 4.10 Matriks Korelasi.....	87
Tabel 4.11 Hasil Uji Harvey .....	88
Tabel 4.12 Hasil Uji Durbin Watson.....	89
Tabel 4.13 Hasil Regresi Model .....	90
Tabel 4.14 Hasil Interaksi Ukuran Perusahaan dengan Penerbitan Sukuk dan Jenis Industri .....	92
Tabel 4.15 Hasil Interaksi Profitabilitas dengan Penerbitan Sukuk dan Jenis Industri.....	93
Tabel 4.16 Hasil Interaksi Umur Perusahaan dengan Penerbitan Sukuk dan Jenis Industri .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan.....	15
Gambar 2.2 Tiga Dimensi Keberlanjutan .....	15
Gambar 2.3 Kerangka Syariah .....	25
Gambar 4.1 Total Skor Indeks ISR Tahun 2009-2010 .....	63
Gambar 4.2 Total Skor Indeks ISR Masing-masing Tema Tahun 2009-2010 .....	66
Gambar 4.3 Boxplot Variabel ISR.....	86
Gambar 4.4 Histogram Residual.....	87
Gambar 4.5 Daerah Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson.....	89



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .....	111
Lampiran 2 Daftar Perusahaan Sampel.....	114
Lampiran 3 Skor Indeks ISR Tahun 2009.....	119
Lampiran 4 Skor Indeks ISR Tahun 2010.....	123
Lampiran 5 Rangkuman Skor Indeks ISR 2009-2010.....	127
Lampiran 6 Rangkuman Jumlah Perusahaan per Pokok Pengungkapan.....	132
Lampiran 7 Rangkuman Data Penelitian.....	134
Lampiran 8 Statistik Deskriptif.....	143
Lampiran 9 Statistik Deskriptif Skewness.....	144
Lampiran 10 Matriks Korelasi Pearson.....	145
Lampiran 11 Uji Harvey.....	146
Lampiran 12 Hasil Regresi Model.....	147
Lampiran 13 Hasil Regresi Model Interaksi 1.....	148
Lampiran 14 Hasil Regresi Model Interkasi 2.....	149

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Studi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) telah banyak dilakukan di negara berkembang maupun negara maju. Isu CSR kian menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis. Gagasan utama CSR menjadikan perusahaan dihadapkan bukan hanya pada konsep *single bottom line* dalam bentuk nilai perusahaan, melainkan juga pada konsep *triple bottom line* dalam bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Konsep *single bottom line* dianggap sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Konsep ini menekankan hanya pada pencapaian profit yang maksimal pada laporan laba rugi perusahaan. Friedman (1982) mengemukakan bahwa keberlanjutan perusahaan bukan hanya bergantung pada laba perusahaan (profit), melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di luar perusahaan (people) serta lingkungan (planet). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (shareholder), tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Jangkauan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan dinilai lebih luas daripada tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan melibatkan beberapa pihak, yaitu pelanggan, karyawan, investor, pemasok, kreditor, masyarakat, Pemerintah, dan kompetitor.

Di Indonesia, konsep CSR juga sudah mulai berkembang ke arah yang lebih positif. Beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk menerapkan praktik tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan mereka. Utama (2007) mengungkapkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap

perkembangan perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, pengungkapan CSR juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air bersih, perubahan iklim, dan sebagainya. Waryanto (2010) memaparkan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga mendapat dukungan dari Pemerintah. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya regulasi mengenai kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Konsep CSR tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang di ekonomi Islam. Dewasa ini sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya. Salah satu aspek yang mendapat sorotan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Siwar dan Hossain (2009) memaparkan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW juga dapat digunakan sebagai landasan dari tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti konvensional. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT untuk alam semesta. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat-Nya untuk menyelesaikan segala permasalahan di muka bumi. Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan juga sebuah petunjuk kehidupan bagi umat-Nya. Al-Quran berisi berbagai macam petunjuk mengenai hukum, ekonomi, sosial, politik, dan jihad. Mereka juga memaparkan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah* Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai *khalifah*, manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Allah SWT. Konsep CSR dalam Islam lebih ditekankan sebagai bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan. Dalam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan memiliki kontribusi terhadap konsep CSR yang telah berkembang sampai saat ini.

Selaras dengan hasil penelitian Siwar dan Hossain (2009), Dusuki (2008) juga menyimpulkan bahwa paradigma takwa kepada Allah SWT merupakan landasan utama dari CSR dalam perspektif Islam. Konsep CSR bukan merupakan

konsep yang asing dalam Islam. Sesuai dengan ketentuan syariah, dalam Islam telah dikenal konsep *khalifah*. Dalam hal ini, Islam memandang perusahaan tidak hanya sebagai *caretaker* bagi pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT. Hal ini menyiratkan bahwa sudah menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan CSR sebaik-baiknya, contohnya seperti menjaga lingkungan dengan baik, menjamin keselamatan kerja karyawan, dan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Dengan kata lain, paradigma takwa kepada Allah SWT menginspirasi perusahaan untuk selalu melakukan kegiatan bisnis dengan baik serta bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Gagal melakukan hal tersebut sama saja dengan melanggar perintah Allah SWT yang diyakini pasti ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan konsep syariah. Perusahaan tersebut diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang juga sesuai dengan konsep syariah. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan syariah yang bermunculan mengindikasikan bahwa ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ekonomi Islam tersebut juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lembaga atau institusi syariah semakin besar dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perusahaan-perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Pasar modal syariah Indonesia identik dengan *Jakarta Islamic Index (JII)*. Pasar modal ini terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun, Efek Syariah yang terdapat di pasar modal syariah tidak hanya berjumlah 30 saham syariah. Bapepam dan LK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) pada November 2007 yang kemudian menjadikan DES sebagai satu-satunya rujukan tentang Efek Syariah di pasar modal Indonesia.

Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah diekspektasikan untuk menyajikan suatu dimensi religi dalam

pengungkapan laporan tahunan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan Muslim. Dengan demikian, dibutuhkan *guideline* untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah membuat laporan tanggung jawab sosial yang turut menyajikan aspek-aspek religi dalam laporan tahunan dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu, Othman *et al.* (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan dengan hal-hal tersebut yang biasa disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR ini pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) kemudian dikembangkan lebih ekstensif oleh Othman *et al.* (2009) secara spesifik di Malaysia. Menurut Haniffa (2002), terdapat keterbatasan dalam laporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah Islam yang tidak hanya untuk membantu para pengambil keputusan Muslim tetapi juga untuk membantu perusahaan, terutama perusahaan yang sesuai ketentuan syariah, dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat sekitar.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Othman *et al.* (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran Dewan Direksi Muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, sedangkan jenis industri bukan faktor penting yang dapat mempengaruhi ISR secara signifikan. Penelitian terdahulu lainnya pernah dilakukan oleh Ayu (2010), tetapi ia tidak memasukkan variabel bebas spesifik syariah yang dianggap dapat mempengaruhi ISR. Hasil penelitiannya adalah total aktiva dan ROA mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR secara signifikan. Total aktiva berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan ROA berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR. Selain itu, jenis industri tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, tetapi tingkat pengungkapan ISR pada industri manufaktur lebih besar dibandingkan dengan industri non-manufaktur pada periode penelitian tahun 2006-2008.

Bertolak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengembangkan tulisan Othman *et al.* (2009) dengan menggunakan ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah di Indonesia disertai dengan penambahan dan perubahan variabel bebas yang

disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yakni menambah variabel bebas umur perusahaan dan mengganti variabel bebas ukuran Dewan Direksi Muslim dengan variabel bebas penerbitan sukuk. Hal ini dikarenakan data untuk mengidentifikasi apakah Dewan Direksi Muslim atau bukan tidak tersedia di Indonesia sehingga variabel bebas ukuran Dewan Direksi Muslim diganti dengan variabel bebas penerbitan sukuk yang mengindikasikan bahwa apakah perusahaan sampel menerbitkan sukuk atau tidak. Hal ini dilakukan karena kondisi Malaysia dan Indonesia bisa dikatakan berbeda. Di Malaysia, untuk mengidentifikasi Dewan Direksi Muslim dapat dilihat dari nama Dewan Direksi tersebut. Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia karena karakteristik nama penduduk Indonesia cenderung lebih heterogen sehingga sulit untuk diidentifikasi berdasarkan agama atau keyakinannya. Studi mengenai pengungkapan ISR masih sangat terbatas, studi terdahulu kebanyakan menggunakan *Global Reporting Initiatives* (GRI) sebagai *guideline* untuk *sustainability reporting*, terutama pada perusahaan konvensional. Selain itu, sebagian besar studi mengenai pengungkapan CSR perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah hanya spesifik terhadap bank syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang menerbitkan sukuk berbeda dibandingkan dengan tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan manufaktur berbeda dibandingkan dengan tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan non-manufaktur?

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah di perusahaan yang menerbitkan sukuk berbeda dibandingkan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah di perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk pada perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah tahun 2009-2010.
2. Mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah pada perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah dalam kurun waktu 2009-2010.
3. Mengetahui apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah pada perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah dalam kurun waktu 2009-2010.
4. Mengetahui apakah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah di perusahaan manufaktur berbeda dibandingkan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah di perusahaan non-manufaktur pada perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah tahun 2009-2010.
5. Mengetahui apakah umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah pada perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah dalam kurun waktu 2009-2010.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi penulis

Peneliti diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di

Program Sarjana Reguler Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor, khususnya investor Muslim, dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah agar dapat melakukan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, sosialisasi mengenai hasil penelitian ini perlu dilakukan oleh pihak akademisi agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

4. Bagi regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dalam menghasilkan aturan-aturan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama untuk perusahaan dan indeks pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, diskusi antara pihak akademisi dan pihak regulator sangat diperlukan untuk membahas hasil penelitian ini dalam rangka membentuk aturan-aturan yang lebih komprehensif.

### 1.5 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Indeks yang digunakan mengacu pada beberapa penelitian dengan rujukan utama tetap pada Othman *et al.* (2009) yang telah melakukan penilaian terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan di Bursa Efek Malaysia.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah di Indonesia pada tahun 2009-2010.
3. Sampel penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria berikut:
  - a. Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah tahun 2009-2010.

- b. Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah sebanyak empat periode dan tercatat (listed) di BEI selama tahun 2009-2010.
- c. Laporan tahunan menggunakan mata uang Rupiah.
- d. Laporan tahunan tersedia.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dipaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi tulisan secara keseluruhan.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu konsep pengungkapan (disclosure), tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), Daftar Efek Syariah, kerangka *Islamic Social Reporting*, dan penelitian-penelitian terdahulu. Landasan teori tersebut diperoleh dari berbagai studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, antara lain metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, metode penelitian, dan teknik pengolahan data.

### BAB 4 ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai analisis dan interpretasi dari hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis.

### BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Pengungkapan (Disclosure)

##### 2.1.1 Definisi Pengungkapan

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Noegraheni (2005) menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan tersebut. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Amurwani (2006) memaparkan bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penyajian dan pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Evans (2003) membatasi definisi pengungkapan pada hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan memiliki arti menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan erat kaitannya dengan empat pertanyaan (Evans, 2003) berikut:

1. Untuk siapa informasi diungkapkan?
2. Mengapa pengungkapan perlu untuk dibuat?

3. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan?
4. Kapan informasi harus diungkapkan?

Keempat pertanyaan tersebut harus dapat dijawab oleh perusahaan yang hendak melakukan pengungkapan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang akan menggunakan informasi tersebut, tujuan atau alasan dari dilakukannya pengungkapan, jumlah pengungkapan yang dibutuhkan, dan waktu yang tepat untuk melakukan pengungkapan.

Secara umum, terdapat tiga konsep pengungkapan (Hendriksen dan Breda, 1992 dan Evans, 2003). Ketiga konsep pengungkapan ini terkait dengan jawaban atas pertanyaan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Konsep tersebut antara lain:

1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (Fair Disclosure)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.

3. Pengungkapan Penuh (Full Disclosure)

Pengungkapan penuh menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan yang tepat atas informasi yang penting bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya harus disajikan dengan cukup, wajar, dan penuh. Tidak ada perbedaan riil di antara ketiga konsep tersebut jika mereka digunakan dalam konteks yang tepat.

Dalam ekonomi Islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparansi. Menurut Abu-Tapanjeh (2009), akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT. Konsep dasar akuntabilitas Islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan. Pengungkapan juga harus memberikan informasi

memadai yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan ekonomi dan bisnis yang konsisten. Konsep dasar ini merupakan etika yang kuat dalam sistem akuntansi Islam yang dapat meningkatkan kualitas pengungkapan agar lebih tepat dan transparan.

### **2.1.2 Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dan Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)**

Transparansi merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi perusahaan yang menyampaikan informasi keuangannya kepada publik (Hananto, 2009). Pengungkapan laporan keuangan perusahaan terbagi menjadi pengungkapan wajib (mandatory reporting) dan pengungkapan sukarela (voluntary reporting). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan yang berlaku di Indonesia adalah peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) melalui Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002, Surat Edaran Nomor: SE-02/BL/2008, dan Surat Edaran Nomor: SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Menurut Mayangsari (2009), jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Amurwani (2006) mengungkapkan bahwa tujuan BAPEPAM dan LK mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen. Akhtaruddin (2005) juga menyatakan bahwa permintaan terhadap penerbitan informasi keuangan perusahaan di seluruh dunia telah meningkat karena para pengguna informasi keuangan perusahaan telah lebih menyadari akan pentingnya informasi tersebut. Namun, biasanya pengungkapan yang disajikan tidak memenuhi kebutuhan para pengguna informasi keuangan perusahaan karena manajer cenderung mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini menimbulkan kesenjangan pengungkapan (disclosure gap) atau lebih dikenal dengan *principal-agent problems*. Dengan

**Universitas Indonesia**

demikian, peningkatan pengungkapan akan mengurangi kesenjangan antara manajemen dengan pihak luar perusahaan, meningkatkan nilai saham pada pasar modal, meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya, dan sebagainya (Karim, 1996).

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), pengungkapan sukarela merupakan berapa banyak informasi yang diungkapkan suatu perusahaan melebihi yang diwajibkan oleh BAPEPAM dan LK. Pengungkapan sukarela merupakan cara untuk mewujudkan transparansi dalam bidang bisnis. Selain itu, pengungkapan sukarela juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Dengan kata lain, pengungkapan sukarela yang lebih luas merupakan salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan (Mayangsari, 2009). Meek *et al.* (1995) memaparkan bahwa pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang dianggap relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

Perusahaan akan mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Menurut Irawan (2006), biaya pengungkapan informasi di laporan keuangan oleh perusahaan terbagi menjadi dua, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang timbul akibat diungkapkannya dan/atau tidak diungkapkannya informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang timbul sebagai konsekuensi dari keberadaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sedangkan, pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang murni timbul dari hasil analisis *cost and benefit* perusahaan yang bersangkutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengungkapan yang lebih banyak membutuhkan biaya adalah pengungkapan sukarela. Oleh karena hal tersebut, wajar apabila berbagai

**Universitas Indonesia**

perusahaan melakukan pengungkapan sukarela yang bentuk dan isinya berbeda-beda.

## **2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **2.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)**

Dalam dialog internasional, WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) mengemukakan bahwa CSR tidak memiliki definisi yang baku secara universal. Definisi CSR memiliki arti yang berbeda untuk pihak yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor lokal, seperti budaya, agama, hukum, dan kondisi pemerintahan. Definisi formal mengenai CSR diperoleh dari hasil dialog internasional bertajuk “*WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR*” di Netherlands pada 6-8 September 1998. Definisi CSR menurut WBCSD dalam Watts dan Holme (1999) adalah “*corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Satu kata kunci penting dari definisi tersebut adalah komitmen. CSR merupakan komitmen perusahaan sebagai pelaku bisnis untuk dapat berperilaku etis dan turut berkontribusi dalam membangun perekonomian negara. Secara garis besar, hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka membangun perekonomian negara adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta peduli terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Istilah CSR secara sederhana merujuk pada tanggung jawab bisnis secara etis kepada para pemangku kepentingan. CSR merupakan komitmen suatu organisasi untuk melakukan bisnis berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sembari menyeimbangkan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan (Siwar dan Hossain, 2009). Dalam penelitiannya, Garriga dan Mele (2004) mengklasifikasikan empat teori mengenai CSR, antara lain:

#### 1. Teori Instrumen (Instrumental Theories)

Dalam teori ini, perusahaan diasumsikan sebagai instrumen yang menciptakan kemakmuran dan itulah tanggung jawab sosialnya. Aspek

**Universitas Indonesia**

ekonomi yang dipertimbangkan dalam teori ini hanya interaksi antara bisnis dengan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan sosial hanya akan diterima jika, dan hanya jika, konsisten dengan kegiatan menciptakan kemakmuran tersebut.

2. Teori Politik (Political Theories)

Teori ini menekankan pada kekuatan sosial dari sebuah perusahaan, terutama dalam hal hubungannya dengan masyarakat dan tanggung jawabnya terhadap arena politik terkait dengan kekuatan sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tertentu.

3. Teori Integratif (Integrative Theories)

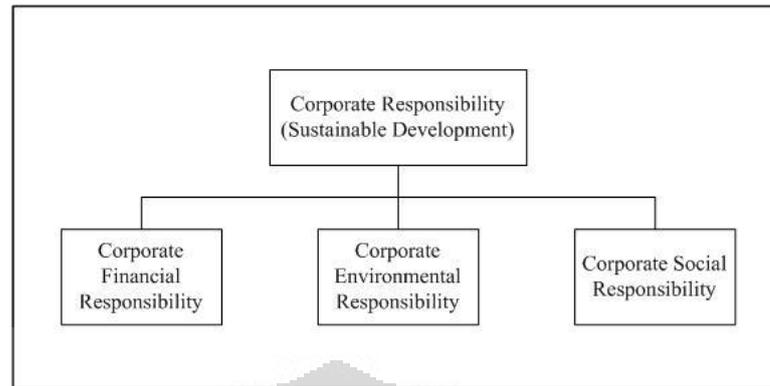
Teori ini menganggap bahwa suatu bisnis harus dapat mengintegrasikan segala tuntutan sosial. Teori ini menyatakan bahwa keberlangsungan dan pertumbuhan suatu bisnis tergantung pada masyarakat dan bahkan untuk keberadaan bisnis itu sendiri.

4. Teori Etika (Ethical Theories)

Teori ini memahami bahwa hubungan antara bisnis dan masyarakat tertanam dalam nilai-nilai etika. Hal ini menghasilkan suatu visi CSR dari sudut pandang etika, akibatnya perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai bentuk dari tuntutan etika yang di atas segalanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat teori tersebut merupakan konsep dasar dari perkembangan teori CSR. Teori CSR yang berkembang saat ini dapat dikatakan memiliki fokus utama terhadap empat aspek, yakni mencapai tujuan yang menghasilkan profit jangka panjang, menggunakan kekuatan bisnis sebagai jalur untuk melaksanakan tanggung jawab, mengintegrasikan tuntutan atau kebutuhan sosial, dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat sebagai bentuk dari perilaku etis perusahaan terhadap masyarakat.

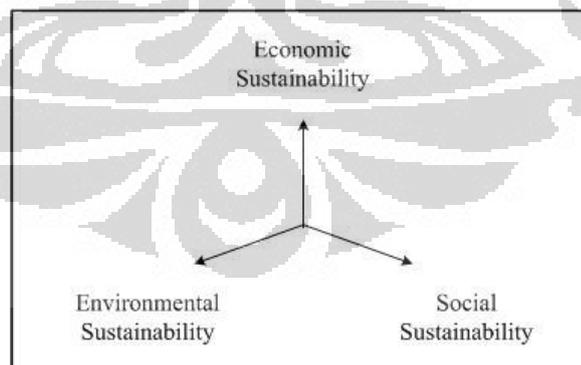
**Gambar 2.1 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan**



Sumber: Watts dan Holme (1999)

CSR merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan karena konsep CSR tepat untuk ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Gambar 2.1 di atas memperjelas integrasi antara pembangunan berkelanjutan dengan konsep CSR. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu tanggung jawab keuangan perusahaan, tanggung jawab lingkungan perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Watts dan Holme, 1999). Menurut Steurer *et al.* (2005), pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.

**Gambar 2.2 Tiga Dimensi Keberlanjutan**



Sumber: Dyllick dan Hockerts (2002)

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama, yakni ekonomi, ekologi, dan sosial. Dyllick dan Hockerts (2002) menyebut integrasi di antara ketiga dimensi tersebut sebagai *triple-bottom-line*. Hubungan di antara ketiga dimensi tersebut ditunjukkan dalam Gambar 2.2 di atas. Dalam

**Universitas Indonesia**

pemikiran yang sempit, keberlanjutan ekonomi dianggap hanya dapat memberikan keberhasilan jangka pendek. Oleh karena itu, dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial harus dipenuhi secara simultan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang karena ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

### **2.2.2 CSR Reporting**

Pelaporan CSR merupakan suatu bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaporan CSR merupakan salah satu aspek penting dari akuntabilitas perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Dewasa ini, pemahaman mengenai pelaporan CSR sudah lebih luas. Hal ini selaras dengan semakin berkembangnya akuntansi sosial sejak tahun 1970-an. Gray *et al.* (1987) mendefinisikan pelaporan CSR sebagai proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan akibat tindakan ekonomi suatu organisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat secara keseluruhan. Pelaporan CSR mencakup perluasan akuntabilitas suatu organisasi, tidak lagi hanya sekedar menyajikan akun-akun keuangan kepada pemegang saham. Perluasan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya sekedar menghasilkan uang untuk pemegang saham. Menurut Gond dan Herrbach (2006), pelaporan CSR merupakan wujud proses monitor, eksplorasi, dan interpretasi dari bentuk-bentuk akuntansi yang lebih luas seperti laporan sosial dan lingkungan. Pelaporan CSR memiliki akar fundamental yang sama dengan CSR dan dapat dihubungkan secara historis dengan praktik audit sosial.

Matthews (1997) memaparkan bahwa analisis konten dalam bentuk pelaporan CSR yang lengkap dan komprehensif memberikan indikasi yang lebih jelas mengenai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingannya. Pelaporan CSR yang komprehensif membutuhkan tiga macam informasi untuk setiap pokok-pokok CSR yang diungkapkan, yaitu: visi dan tujuan, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja (Bouten *et al.*, 2011). Pelaporan CSR seharusnya tidak hanya berisi komitmen, tetapi juga berisi elaborasi antara komitmen tersebut dengan hasil yang dicapai. *Business in the Community* (BITC) dalam Grosser dan Moon (2005) mengemukakan

**Universitas Indonesia**

bahwa pelaporan CSR dapat memperluas praktik bisnis karena perusahaan mengakui manfaat pelaporan tersebut lebih dari sekedar reputasi yang akan diperoleh apabila dialog dengan para pemangku kepentingan dilakukan secara lebih terbuka dan seimbang. Dengan kata lain, pelaporan CSR memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan suatu perusahaan.

Di Indonesia, salah satu regulasi mengenai pelaporan CSR diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dituangkan dalam *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Selain organisasi IAI, Pemerintah juga turut mendukung praktik pelaporan CSR melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2 huruf c menyatakan bahwa salah satu isi dari laporan tahunan wajib memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU Perseroan Terbatas pasal 74 menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Penanaman Modal pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Terkait dengan sanksi, pasal 34 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

**Universitas Indonesia**

Selain itu, Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa salah satu isi dari laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir, salah satunya mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Meskipun pelaporan CSR di Indonesia bersifat wajib, pelaporan CSR belum memiliki standar baku yang berlaku umum terkait dengan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan didalamnya sehingga setiap perusahaan dapat melakukan pelaporan CSR yang berbeda-beda. Pedoman (guideline) yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia adalah *Sustainability Reporting Guidelines* yang dikenal dengan Kerangka Pelaporan *Global Reporting Initiative* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2000, 2002, dan 2006 (G3). Keseluruhan dokumen-dokumen Kerangka Pelaporan GRI dikembangkan menggunakan proses konsensus melalui dialog antara pemangku kepentingan bisnis, komunitas investor, tenaga kerja, masyarakat sipil (Pemerintah), akuntan, akademisi, dan lain-lain. Kerangka pelaporan GRI dimaksudkan sebagai kerangka yang berlaku umum untuk pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu organisasi. Kerangka pelaporan GRI dirancang untuk digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, sektor, atau lokasi. Kerangka pelaporan GRI terdiri dari konten umum dan konten sektor spesifik yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di seluruh dunia yang secara umum berlaku untuk pelaporan kinerja keberlanjutan suatu organisasi (GRI, 2006).

### **2.3 Daftar Efek Syariah**

Pasar modal memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah investasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum

**Universitas Indonesia**

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek diperdagangkan. Pasar modal lebih dikenal dengan sebutan Bursa Efek. Bursa Efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya (Siamat, 2004). Dengan demikian, pasar modal dapat diartikan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemilik modal. Implementasinya adalah perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek dan pemilik modal dapat melakukan investasi di pasar modal melalui pembelian efek tersebut.

Dewasa ini perkembangan pasar modal tidak hanya terjadi pada pasar modal konvensional, tetapi juga terjadi pada pasar modal syariah. Terminologi pasar modal syariah diartikan BAPEPAM dan LK sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pasar modal syariah merupakan sistem yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Penerapan prinsip dasar syariah di pasar modal bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kegiatan di pasar modal syariah dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang berbentuk *muamalah*. Menurut kaidah fikih yang terdapat dalam Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003, hukum *muamalah* adalah *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah fikih tersebut berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Menurut BAPEPAM dan LK, konsep inilah yang menjadi prinsip dasar pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam meluncurkan *Jakarta Islamic Index* dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Pada dasarnya segala aspek yang berkaitan dengan pasar modal syariah juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis usaha, produk barang, jasa,

**Universitas Indonesia**

akad, dan cara pengelolaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah telah diatur dalam Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, antara lain:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
5. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.

Selain itu, DSN MUI juga menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi dalam pasar modal syariah juga harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta tidak boleh menggunakan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat, dan kezhaliman. Dengan demikian, portofolio efek seluruh perusahaan yang tercatat (listed) di BEI memiliki kesempatan diperdagangkan di pasar modal syariah meskipun perusahaan tersebut tidak terbentuk secara eksplisit sebagai perusahaan syariah. Portofolio efek perusahaan yang tercatat (listed) di BEI dapat diperdagangkan di pasar modal syariah apabila BAPEPAM dan LK menetapkan bahwa kegiatan usaha dan transaksi bisnis perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Pasar modal syariah merupakan tempat di mana efek syariah diperdagangkan. Efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Dalam peraturan tersebut, efek syariah didefinisikan sebagai efek sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya

**Universitas Indonesia**

yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK atau pihak yang disetujui BAPEPAM dan LK disebut Daftar Efek Syariah. Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi:

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini.
4. Saham reksa dana syariah.
5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah.
6. Efek beragun aset syariah.
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:
  - a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13.
  - b. memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
    - 1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus).
    - 2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).
8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
9. Efek syariah lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Daftar Efek Syariah merupakan panduan investasi bagi reksa dana syariah dalam menempatkan dana kelolaannya dan bagi investor yang memiliki keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah. Hal ini tentu memberikan sinyal positif bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara keseluruhan.

Di Indonesia, penerbitan efek-efek yang disebutkan di atas dapat dilakukan dengan beberapa akad. Akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.14, antara lain: akad ijarah, akad kafalah, akad mudharabah (qiradh), dan akad wakalah. Akad-akad inilah yang lazim digunakan dalam penerbitan efek syariah yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah adalah laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang berakhir 31 Desember atau 30 Juni serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik maupun dari pihak-pihak lain yang dapat dipercaya. Daftar Efek Syariah yang terakhir kali diterbitkan berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah yang baru oleh Ketua BAPEPAM dan LK. Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkan akan ditinjau secara periodik berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan dari emiten atau perusahaan publik tersebut.

#### **2.4 Islamic Social Reporting (ISR)**

Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah *aqidah* (belief and faith), *ibadah* (worship), dan *akhlaq* (morality and ethics). Selain itu, ada prinsip lain yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, yakni tauhid. Hal ini dikarenakan prinsip tauhid merupakan inti dari ajaran agama Islam. Ditinjau dari segi istilah, tauhid mengandung arti meng-Esakan Allah SWT dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 64 sebagai berikut:

“Katakanlah, “Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang berhak menyandang gelar seorang Muslim adalah orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai agamanya. Orang-orang tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah Allah SWT janjikan kepada mereka, antara lain: selamat dari neraka jahanam (Q.S. Al-Maidah: 72), mendapat ampunan atas seluruh dosa (Q.S. An-Nisa: 48), dan dijadikan berkuasa di dunia (Q.S. An-Nur: 55).

Dengan segala keuntungan yang Allah SWT janjikan, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 berikut:

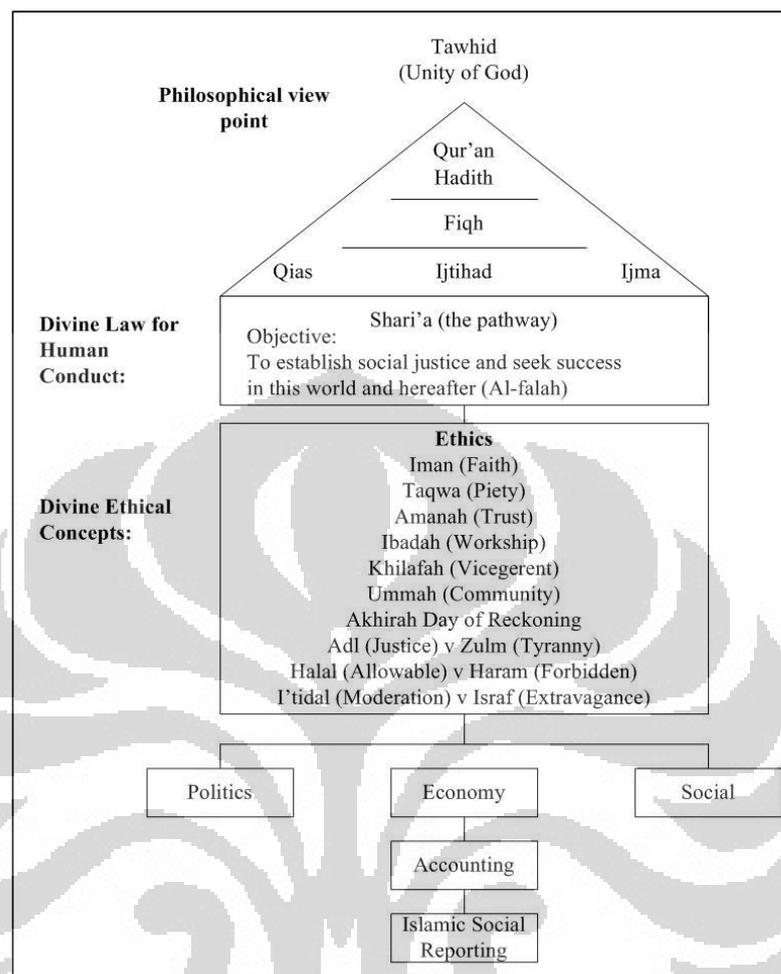
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai *khalifah* Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009). Dengan kata lain,

akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam.

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Untuk itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Prinsip syariah merupakan landasan dasar atas terbentuknya *Islamic Social Reporting* yang komprehensif. Prinsip syariah dalam *Islamic Social Reporting* menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Gambar 2.3 Kerangka Syariah



Sumber: Haniffa (2002)

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas, dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam. Tauhid memiliki makna yakin bahwa Allah SWT adalah esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), *asma'*, dan sifat-Nya (Muhammad, 2009). Hal ini mengandung arti bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Untuk itu, manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta tanpa terkecuali. Selanjutnya, tauhid melahirkan aturan-aturan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah berasal dari tiga sumber utama. Secara hierarki, sumber prinsip-prinsip syariah diawali dari Al-Quran, hadis, fikih, lalu sumber-sumber lain seperti qias, ijtihad, dan ijma. Prinsip-prinsip syariah fokus pada menegakkan keadilan sosial dan mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat (al-falah).

Universitas Indonesia

Gambar 2.3 juga menunjukkan bahwa konsep etika dalam Islam terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, nilai-nilai etika dalam Islam terdiri dari sepuluh konsep yang terdiri dari hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kesepuluh konsep etika tersebut adalah iman (faith), *taqwa* (piety), amanah (trust), ibadah (workship), *khilafah* (vicegerent), *ummah* (community), *akhirah day of reckoning*, *adl* (justice) dan *zulm* (tyranny), halal (allowable) dan haram (forbidden), serta *i'tidal* (moderation) dan *israf* (extravagance). Iman berarti percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai buku petunjuk bagi manusia di bumi. *Taqwa* berarti mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Amanah dari Sang Pencipta kepada manusia adalah menjaga, memelihara, dan melestarikan segala ciptaan-Nya. Ibadah merupakan bentuk penyembahan manusia kepada Allah SWT. Tugas manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah SWT. Meskipun merupakan tugas, pelaksanaannya bukan semata-mata untuk Allah SWT melainkan untuk kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri. *Khilafah* merupakan konsep di mana manusia sebagai utusan Allah SWT wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi milik-Nya. *Ummah* mengandung arti suatu sistem yang mengedepankan keadilan sosial. *Akhirah Day of Reckoning* merupakan konsep percaya pada hari akhir di mana segala perbuatan baik dan buruk manusia di bumi akan diberikan balasan berupa pahala dan dosa di akhirat. *Adl* mengandung arti adil, lurus, atau tidak berbuat kejam (zalim). Islam mengenal dua titik ekstrim hukum atas sebuah tindakan, yakni halal dan haram. Halal merupakan sesuatu yang sah, sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang. Konsep etika yang terakhir adalah kesederhanaan (*i'tidal*). Manusia dianjurkan untuk dapat bersikap secara sederhana tanpa berlebih-lebihan.

Prinsip-prinsip syariah tidak hanya berisi konsep-konsep etika dalam perspektif Islam, tetapi juga berisi berbagai macam petunjuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Sesuai dengan Gambar 2.3 di atas, *Islamic Social Reporting* berada pada lingkup aspek ekonomi atau secara lebih spesifik berada pada lingkup aspek akuntansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Social Reporting* merupakan kerangka

pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Haniffa (2002), *Islamic Social Reporting* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan Muslim.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting* yang disusun dari beberapa penelitian terkait dengan rujukan utama tetap pada Othman *et al.* (2009). Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)

Informasi yang diungkapkan dalam tema pendanaan dan investasi antara lain *interest-free* (riba) dan *speculative-free* (gharar). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279, kegiatan yang mengandung riba dan *gharar* dilarang (haram) dalam Islam (Othman dan Thani, 2010).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu ciri orang-orang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan riba dalam kegiatan bisnisnya karena sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275). Namun, dalam lingkungan bisnis sekarang ini sulit untuk menemukan perusahaan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan sistem politik dan ekonomi konvensional. Dalam kondisi darurat, salah satu mazhab menyebutkan bahwa bunga (riba) diperbolehkan secara temporer sampai kondisi ekonomi tidak lagi didominasi oleh kapitalisme. Di lain pihak, mazhab lain menyebutkan bahwa bunga (riba) hanya diperbolehkan pada situasi ekstrim yang dapat membahayakan jiwa manusia (Haniffa, 2002). Sama halnya dengan riba, *gharar* juga dilarang dalam Islam. *Gharar* merupakan ketidakpastian yang terjadi

akibat *incomplete information* dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena ada ketidakjelasan antara akad beli atau akad sewa yang sebenarnya berlaku (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Bentuk lain dari *gharar* dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa penyerahan (*future non delivery trading* atau *margin trading*), jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage*) baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*), melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi-transaksi derivatif lain (Arifin, 2009). Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi nilai transparansi kepada masyarakat, seluruh sumber pembiayaan dan investasi yang mengandung riba dan *gharar* harus diidentifikasi dan dilaporkan secara jelas. Sulaiman (2003) menambahkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan jumlah bunga yang dibayar, alasan pembayaran bunga, dan mengambil langkah untuk dapat menghindari keterlibatan bunga lain di masa depan.

Selain riba dan *gharar*, aspek lain yang harus diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah praktik pembayaran zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika mencapai nisab. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat (Q.S. Al-Baqarah: 43). Apabila manusia tidak memenuhi kewajibannya untuk mendirikan shalat dan membayar zakat, Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan wujud akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah mengeluarkan zakat dan mengungkapkan praktik pembayaran zakat tersebut dalam laporan tahunannya.

Pengungkapan selanjutnya terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien. Dalam Islam, manusia sangat dianjurkan untuk dapat hidup rukun dan saling tolong-menolong tidak terkecuali dalam hal utang-piutang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berikut:

**Universitas Indonesia**

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya Islam menyajikan umatnya untuk memberikan penangguhan pembayaran utang bagi peminjam (debitur) yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang atau lebih baik lagi untuk menghapus sebagian atau seluruh utang tersebut. Namun, penangguhan atau penghapusan utang tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja. Perusahaan harus menyelidiki alasan debitur atau klien terkait dengan ketidakmampuannya dalam pembayaran utang tersebut.

Aspek pengungkapan selanjutnya adalah *current value balance sheet*. Prinsip *current value balance sheet* bertolak dari konsep kewajiban membayar zakat, pengungkapan penuh (full disclosure), serta dalam rangka mencapai keadilan sosial ekonomi (socio-economy justice). Dengan demikian, selain mengungkapkan jumlah zakat yang dikeluarkan, perusahaan juga harus menampilkan neraca dengan nilai kini (current value balance sheet). Nilai kini dalam neraca akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Nilai kini dapat diperoleh dari estimasi nilai rata-rata transaksi yang terjadi atau transaksi yang akan terjadi apabila aset tersebut diperjualbelikan oleh perusahaan. Dalam ekonomi Islam, *current value balance sheet* sudah seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan operasi perusahaan (Sulaiman 2003). Namun, PSAK Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai di neraca. Salah satu aspek yang masih mengandung nilai historis adalah pengukuran setelah pengakuan aset tidak berwujud. Dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) disebutkan bahwa entitas hanya dapat menggunakan model harga perolehan dalam mengukur aset tidak berwujud. Tidak adanya pasar aktif untuk aset tidak berwujud menjadi dasar pokok bagi regulator untuk memberlakukan model harga perolehan pada aset tidak berwujud. Meskipun demikian, PSAK No. 19 (revisi 2009) sudah mulai diarahkan pada konsep *current value*. PSAK No. 19 (revisi 2009) yang mulai berlaku efektif pada tahun buku 1 Januari 2011 tersebut menyatakan bahwa entitas dapat memilih model harga perolehan atau model revaluasi dalam mengukur aset tidak berwujud.

**Universitas Indonesia**

Oleh karena itu, klasifikasi *current value balance sheet* tidak relevan jika dijadikan sebagai kriteria pengungkapan dalam penelitian ini.

Kriteria pengungkapan selanjutnya terkait dengan *value added statement*. *Value added* (nilai tambah) didefinisikan oleh Staden (2000) sebagai nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawannya. Sedangkan *value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah tersebut serta aplikasinya di antara para pemangku kepentingan perusahaan. Ditinjau dari segi bahasa, *value added statement* mengandung arti pernyataan nilai tambah, akan tetapi dewasa ini istilah *value added statement* lebih merujuk pada laporan pertambahan nilai. Di Indonesia, laporan pertambahan nilai belum berkembang seperti di negara-negara maju. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *value added statement* merujuk pada pernyataan nilai tambah yang ada dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan pembahasan dan penyesuaian di atas, kriteria pengungkapan pada tema pembiayaan dan investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang mengandung riba, *gharar* (termasuk *maysir*), zakat, kebijakan piutang, dan pernyataan nilai tambah perusahaan. Kelima kriteria tersebut terdapat dalam Lampiran 1.

## 2. Produk dan Jasa (Products and Services)

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sudah seharusnya diungkapkan secara menyeluruh di laporan tahunan. Selaras dengan penjelasan sebelumnya, Allah SWT tidak memperbolehkan makhluk-Nya untuk berbuat kerusakan di muka bumi (Q.S. Al-A'raf: 56). Kerusakan yang terjadi di bumi bukan hanya isu nasional bagi satu negara saja, melainkan juga isu internasional di seluruh belahan dunia. Bentuk-bentuk kerusakan tersebut antara lain: pemanasan global (*global warming*), efek rumah kaca, polusi air bersih, polusi udara, kekeringan, hutan gundul, dan lain-lain. Oleh karena itu, dewasa ini perusahaan-perusahaan di seluruh di dunia dituntut agar dapat menciptakan produk atau jasa yang ramah lingkungan atau lebih dikenal dengan *green product*.

Selain itu, identifikasi mengenai halal atau haram suatu produk atau jasa juga harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Secara logis, tujuannya agar para pemangku kepentingan mengetahui apakah barang atau jasa tersebut

diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram) oleh ajaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam H.R. Muslim: “Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi, dan patung.” Dengan demikian, seluruh produk atau jasa yang masuk dalam kategori haram, seperti minuman keras, babi, senjata tajam, judi, dan hiburan harus diungkapkan dalam laporan tahunan dan diidentifikasi kontribusinya terhadap laba perusahaan (Haniffa, 2002). Penting bagi para pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah barang atau jasa tersebut halal atau haram guna membantu mereka dalam mengambil keputusan. Di Indonesia, sertifikasi mengenai kehalalan produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keamanan dan kualitas produk juga merupakan aspek yang tidak kalah penting bagi para pemangku kepentingan, terutama konsumen. Barang atau jasa yang aman dan berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sudah seharusnya mengungkapkan keamanan dan kualitas barang atau jasa dalam laporan tahunannya agar para pemangku kepentingan tidak meragukan kredibilitas produk-produk yang telah dihasilkan perusahaan.

Kategori selanjutnya adalah pelayanan pelanggan. Secara teori, kepuasan pelanggan tidak hanya berhenti sampai kegiatan jual beli, tetapi juga berlanjut pada kegiatan pelayanan setelah pembelian. Dalam penelitiannya, Kamla (2007) menyimpulkan bahwa pengungkapan terkait hubungan pelanggan di laporan keuangan perusahaan-perusahaan Arab terbukti lebih luas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebijakan-kebijakan diupayakan untuk menciptakan liberalisasi pasar serta untuk mendorong keterlibatan modal swasta di dunia Arab. Hal tersebut memotivasi perusahaan-perusahaan Arab untuk terus membuat kebijakan yang berorientasi pelanggan (consumer-oriented) dengan tujuan untuk menarik investasi-investasi lain. Salah satu bentuk kebijakan yang berorientasi pelanggan adalah pelayanan terhadap keluhan pelanggan setelah proses jual beli.

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema produk dan jasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk ramah lingkungan, kehalalan produk, keamanan dan kualitas produk, dan pelayanan pelanggan. Keempat kriteria tersebut terdapat dalam Lampiran 1.

**Universitas Indonesia**

### 3. Karyawan (Employees)

Dalam *Islamic Social Reporting*, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan *adl*. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayar secara wajar. Selain itu, pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002). Selanjutnya, Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, edukasi dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja. Gray *et al.* (1995) pernah melakukan penelitian terhadap laporan CSR di UK pada periode 1979-1991. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pengungkapan paling luas laporan CSR terjadi pada tema karyawan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan seluas-luasnya terkait dengan aspek-aspek karyawan dalam laporan tahunan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, kriteria pengungkapan pada tema karyawan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jam kerja, hari libur dan cuti, tunjangan, remunerasi, pendidikan dan pelatihan kerja (pengembangan sumber daya manusia), kesetaraan hak antara pria dan wanita, keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba), karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah, karyawan Muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa saat Ramadhan, dan tempat ibadah yang memadai. Ketigabelas kriteria tersebut terdapat dalam Lampiran 1.

### 4. Masyarakat (Community)

Haniffa (2002) menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban orang lain di masyarakat. Hal itu mengimplikasikan bahwa sebenarnya Islam sangat menjunjung tinggi kebutuhan

*ummah* (masyarakat) di atas kebutuhan individu. Bentuk saling berbagi dan saling meringankan beban orang lain dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan *qard hassan* (meminjamkan sesuatu tanpa mengambil keuntungan). Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Selain itu, segala bentuk bantuan dan kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat juga harus diungkapkan secara jelas (Q.S. Al-Baqarah: 271). Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu memecahkan permasalahan sosial di masyarakat, seperti membantu memberantas buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf, memberikan beasiswa, dan lain-lain (Maali *et al.*, 2006 dan Othman dan Thani, 2010).

Dengan demikian, kriteria-kriteria dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, donasi, atau sumbangan, wakaf, *qard hassan*, sukarelawan dari kalangan karyawan, beasiswa sekolah, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah, pembangunan tunas muda, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau kegiatan sosial, dan menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Kesebelas kriteria tersebut dipaparkan dalam Lampiran 1.

##### 5. Lingkungan (Environment)

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi beserta isinya. Dengan kata lain, perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang merusak dan membahayakan lingkungan. Haniffa (2002) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan di sekitarnya. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam *Islamic Social Reporting* adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Othman dan Thani, 2010). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

**Universitas Indonesia**

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengancam keras segala bentuk kerusakan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Allah SWT secara tegas menyampaikan bahwa segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab manusia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal agar mereka bertobat.

Menurut Ayu (2010), terdapat dua penyesuaian kriteria pengungkapan dalam tema ini. Pertama, kriteria pengungkapan konservasi lingkungan dan kegiatan tidak membahayakan margasatwa dianggap memiliki bentuk nyata yang hampir sama sehingga kedua kriteria tersebut digabung menjadi satu kriteria. Kedua, kriteria pengungkapan produk atau proses yang berkaitan dengan lingkungan dinilai serupa dengan kriteria pengungkapan *green product* dalam tema produk dan jasa sehingga kriteria tersebut dihilangkan dari tema lingkungan. Dengan demikian, kriteria pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konservasi lingkungan, kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global, pendidikan mengenai lingkungan, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan. Keenam kriteria tersebut terdapat dalam Lampiran 1.

#### 6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional (Abu-Tapanjeh, 2009). Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep *khalifah*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berikut:

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?”

Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Makna ayat di atas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah diberikan kepercayaan oleh Dia untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggungjawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dari bumi beserta isinya. Dalam Islam, tujuan utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai *al-falah* dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, tujuan utama akuntabilitas adalah sebagai bentuk transparansi dalam rangka menciptakan pasar efisien yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Abu-Tapanjeh, 2009). Menurut Kasri (2009), perbedaan utama tata kelola perusahaan dalam sistem Islam dan sistem konvensional terletak pada aspek filosofi yang mencakup tujuan perusahaan, jenis keterlibatan kontrak, pemain kunci dalam praktik tata kelola perusahaan, serta hubungan di antara para pemain kunci tersebut. Dalam perspektif Islam, praktik tata kelola perusahaan merupakan salah satu bentuk kewajiban umat Muslim terhadap Allah SWT sehingga tercipta kontrak “implisit” antara manusia dengan Allah SWT dan kontrak “eksplisit” antara manusia dengan sesama manusia. Namun, pada praktiknya perbedaan tata kelola perusahaan dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terlihat sangat minor.

Munid (2007) memaparkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Akuntabilitas (Accountability)

Dalam hal akuntabilitas, umat Muslim harus percaya bahwa apapun yang telah diperbuat di bumi pasti akan ada balasannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan perintah Allah SWT semata-mata untuk mencapai *ridha* Allah SWT.

b. Transparansi (Transparency)

Konsep mengenai transparansi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Makna dari ayat tersebut menyiratkan bahwa tujuan perusahaan seharusnya bukan hanya untuk menghasilkan nilai-nilai moneter, melainkan juga untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus

**Universitas Indonesia**

mengungkapkan informasi-informasi yang terkait dengan upaya perusahaan dalam menyejahterakan masyarakat tersebut. Haniffa (2002) menambahkan bahwa sesuai dengan konsep transparansi, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan, kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, penggunaan sumber daya yang telah dimanfaatkan, dan upaya perlindungan lingkungan.

c. Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan terdapat dalam firman Allah SWT Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT menghimbau agar manusia dapat selalu berlaku adil dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di muka bumi.

d. Tanggung Jawab (Responsibility)

Konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan konsep akuntabilitas. Firman Allah SWT yang mendasari prinsip tanggung jawab terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku etis dalam setiap kegiatan bisnis mereka. Dengan kata lain, para pelaku kegiatan bisnis harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya titipan yang dipercayakan Allah SWT kepada mereka.

Dalam tema ini, terdapat beberapa penyesuaian kriteria pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Selaras dengan Ayu (2010), kriteria pengungkapan terkait jumlah pemegang saham Muslim, persentase Dewan Direksi Muslim, dan kegiatan yang mengandung judi dihilangkan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya informasi mengenai agama para pemegang saham di setiap perusahaan. Demikian pula dengan para Dewan Direksi Muslim, perusahaan-perusahaan Indonesia tidak mencantumkan informasi mengenai agama dalam profil mereka di laporan tahunan perusahaan. Hal tersebutlah yang membedakan kondisi Indonesia dengan kondisi Malaysia. Malaysia dikenal sebagai negara yang dominan warganya memeluk agama Islam sehingga Muslim atau tidaknya seseorang dapat diidentifikasi secara langsung melalui nama penduduknya. Selain itu, terkait dengan kriteria pengungkapan kegiatan yang

mengandung judi tidak dimasukkan dalam tema tata kelola perusahaan karena sudah termasuk dalam tema pembiayaan dan investasi. Berdasarkan pembahasan dan penyesuaian di atas, kriteria-kriteria pengungkapan tema tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, profil Dewan Direksi, pengungkapan ada atau tidaknya praktik monopoli usaha, pengungkapan ada atau tidaknya praktik menimbun bahan kebutuhan pokok, pengungkapan ada atau tidaknya praktik manipulasi harga, pengungkapan ada atau tidaknya perkara hukum, dan kebijakan anti korupsi. Kedelapan kriteria tersebut disajikan dalam Lampiran 1.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR telah banyak dilakukan. Isu CSR berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan isu CSR ternyata tidak hanya memberikan dampak positif bagi sistem ekonomi konvensional, tetapi juga bagi sistem ekonomi Islam. Hal tersebut ditandai dengan semakin maraknya penelitian-penelitian mengenai pengungkapan CSR dipandang dari perspektif Islam. CSR dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR). Namun, penelitian mengenai ISR masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian mengenai ISR dilakukan oleh peneliti Malaysia dengan menggunakan perusahaan-perusahaan Malaysia sebagai objek penelitiannya. Akibatnya, beberapa aspek yang spesifik melekat pada kondisi Malaysia sulit untuk diterapkan di negara lain.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia. Namun, pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni analisis mengenai hasil metode *content analysis* indeks ISR dan analisis mengenai pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat pengungkapan ISR. Penelitian mengenai pembahasan hasil metode *content analysis* indeks ISR pernah dilakukan oleh Maali *et al.* (2006) terhadap bank syariah di enam negara, Othman dan Thani (2010) terhadap perusahaan-

perusahaan di Bursa Malaysia, dan Fitria dan Hartanti (2010) terhadap bank syariah di Indonesia.

Sedangkan, penelitian terdahulu terkait dengan analisis pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat pengungkapan ISR pernah dilakukan oleh Othman *et al.* (2009) dan Ayu (2010). Othman *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Malaysia. Dalam penelitian tersebut, mereka menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang diadopsi dari Haniffa (2002) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan konteks penelitian mereka. Faktor-faktor yang diuji adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, komposisi Dewan Direksi Muslim, dan jenis industri. Hasil penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komposisi Dewan Direksi Muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan, jenis industri tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Ayu (2010) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk daftar *Jakarta Islamic Index* (JII). Namun, ia tidak memasukkan variabel bebas spesifik syariah yang dianggap dapat mempengaruhi ISR. Faktor-faktor yang diuji meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan jenis industri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan negatif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, profitabilitas positif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, dan jenis industri tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.

### **2.5.1 Faktor Penerbitan Sukuk**

Penelitian dahulu mengenai pengaruh penerbitan sekuritas terhadap tingkat pengungkapan perusahaan pernah dilakukan oleh Marwata (2001), Noegraheni (2005), dan Hossain *et al.* (2006). Ketiga hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penerbitan sekuritas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jenis sekuritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sukuk. Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak

terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Penelitian mengenai pengaruh penerbitan sukuk terhadap tingkat pengungkapan ISR masih sangat terbatas. Variabel penerbitan sukuk ini merupakan satu-satunya variabel spesifik syariah yang memungkinkan dijadikan sebagai variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap ISR dalam konteks Indonesia. Dalam penelitian ini, variabel penerbitan sukuk mengadopsi Hossain *et al.* (2006) yang mengidentifikasi sukuk dilihat dari keberadaannya pada laporan perusahaan di tahun penelitian. Menurut Hossain *et al.* (2006), informasi yang luas seharusnya diungkapkan bukan hanya saat sekuritas hendak diterbitkan, melainkan juga selama sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Menurut Schipper (1981), sepanjang sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan, tambahan informasi dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap terpenuhinya hak-hak mereka. Selain itu, tambahan informasi juga dibutuhkan sebagai salah satu bentuk *monitoring* pemegang obligasi atas penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut. Seorang investor Muslim pasti ingin mengetahui apakah dana yang mereka investasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Secara spesifik, perusahaan yang terdapat sukuk dalam laporan tahunannya diperkirakan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah di antara perusahaan yang menerbitkan sukuk dan perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk.

H1: Tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan yang menerbitkan sukuk berbeda dibandingkan dengan tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk.

### **2.5.2 Faktor Ukuran Perusahaan**

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Siregar dan Utama, 2005). Pernyataan

tersebut didukung dengan penelitian-penelitian yang banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang membuktikan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan tidak hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, tetapi juga terhadap tingkat pengungkapan wajib (Ayu, 2010). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara. Menurut Hossain *et al.* (2006), ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan jumlah karyawan, nilai total aset, dan volume penjualan. Namun, ketiga *proxy* tersebut sangat berkorelasi tinggi antara satu dengan yang lain. Sedangkan, Cooke (1992) memaparkan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan modal saham, *turnover*, jumlah pemegang saham, total aset, aset lancar, aset tetap, *shareholder's fund*, dan *bank borrowing*.

Penelitian Cooke (1992), Naser (1998), Owusu-Ansah (1998), Ho dan Wong (2001), Haniffa dan Cooke (2005), Barako (2007), Lopes dan Rodrigues (2007), Aljifri (2008), Liu dan Anbumozhi (2008), Hossain dan Hammami (2009), Khodadadi *et al.* (2010), Adelopo (2011), Omar dan Simon (2011), dan Zourarakis (n.d.) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan *proxy* total aset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib ataupun sukarela. Namun, ada pula penelitian yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian tersebut dihasilkan oleh Akhtaruddin (2005) dan Dahawy (2009).

Secara lebih spesifik, penelitian terkait ukuran perusahaan dan ISR pernah dilakukan oleh Othman *et al.* (2009) dan Ayu (2010). Hasil penelitian Othman *et al.* (2009) selaras dengan kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni ukuran perusahaan secara positif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian Ayu (2010) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki sumber daya lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil. Dengan demikian,

**Universitas Indonesia**

perusahaan yang lebih besar sudah pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam (Othman *et al.*, 2009). Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

### 2.5.3 Faktor Profitabilitas

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka untuk mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Teori keagenan memaparkan bahwa manajer perusahaan dengan profit yang lebih tinggi kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti promosi jabatan dan kompensasi. Sebaliknya, apabila profit perusahaan menurun, manajer akan cenderung mengurangi informasi yang diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa profit perusahaan mengalami penurunan (Inchausti, 1997). Dalam beberapa penelitian, terminologi profitabilitas biasa disebut dengan kinerja ekonomi (*economic performance*). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain ROA, ROE, ROCE, laba per saham, dividen dalam suatu periode, margin keuntungan, tingkat pengembalian, dan lain-lain.

Penelitian Naser (1998), Owusu-Ansah (1998), Chau dan Gray (2002), Akhtaruddin (2005), Haniffa dan Cooke (2005), dan Omar dan Simon (2011) membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Hossain dan Hammami (2009) dan Adelopo (2011) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Selain itu, Ho dan Wong (2001),

**Universitas Indonesia**

Hossain *et al.* (2006), Aljifri (2008), Liu dan Anbumozhi (2008), Chau dan Gray (2010), Zourarakis (n.d.) justru menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Hasil ini selaras dengan hasil pemaparan Haniffa (2002) yang menyatakan bahwa dalam pandangan Islam perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan penuh tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi.

Secara spesifik terhadap ISR, Othman *et al.* (2009) dan Ayu (2010) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan di atas, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

#### **2.5.4 Faktor Jenis Industri**

Beberapa penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa jenis industri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan kepada masyarakat. Menurut Owusu-Ansah (1998), terdapat beberapa alasan mengapa tingkat pengungkapan perusahaan tidak mungkin sama pada jenis industri yang berbeda. Pertama, industri tertentu memiliki aturan sangat ketat karena kontribusi mereka terhadap keseluruhan pendapatan ekspor dan pendapatan nasional negara. Kedua, perusahaan industri tertentu mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan secara memadai karena sifat dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya, perusahaan industri pertambangan yang diketahui memiliki perlakuan khusus dalam akuntansi dan pelaporan depresiasi, depleksi, dan eksplorasi sumur minyak. Ketiga, perbedaan pengungkapan juga dapat dihubungkan dengan jenis lini produk atau keragaman produk perusahaan dalam suatu perekonomian. Industri spesifik tertentu akan memanifestasi diri mereka dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, perusahaan produk konsumen dan perusahaan multiproduk. Perusahaan produk konsumen merupakan perusahaan yang sangat peduli dengan citra publik sehingga perusahaan tersebut akan cenderung mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan

**Universitas Indonesia**

multiproduk sudah pasti memiliki informasi yang lebih banyak yang harus diungkapkan ke publik.

Dalam berbagai penelitian, para peneliti mengelompokkan perusahaan-perusahaan ke dalam jenis industri tertentu. Pengelompokan jenis industri dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing penelitian. Ho dan Wong (2001) mengelompokkan menjadi industri konglomerasi, perbankan dan keuangan, manufaktur, dan lain-lain, Akhtaruddin (2005) mengelompokkan menjadi perusahaan tradisional dan modern, Haniffa dan Cooke (2005) mengelompokkan menjadi industri konsumen, konstruksi/properti, perdagangan/jasa, perkebunan/pertambangan, dan industrial, Aljifri (2008) mengelompokkan menjadi sektor perbankan, asuransi, industrial, dan jasa, serta Zourarakis (n.d.) mengelompokkan menjadi perusahaan keuangan dan non-keuangan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan hasil yang beragam.

Dalam penelitian ini, jenis industri dikelompokkan menjadi perusahaan yang masuk ke dalam industri manufaktur dan non-manufaktur. Menurut Suwaidan (1997) dalam Omar dan Simon (2011), perusahaan manufaktur menghasilkan polusi yang lebih banyak daripada perusahaan non-manufaktur sehingga informasi tambahan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur. Dengan kata lain, perusahaan manufaktur sudah seharusnya melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan non-manufaktur.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Cooke (1989), Cooke (1992), Hossain *et al.* (2006), dan Omar dan Simon (2011) yang membuktikan bahwa perusahaan pada industri manufaktur melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan pada industri non-manufaktur. Namun, Inchausti (1997), Naser (1998) dan Owusu-Ansah (1998) menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap perusahaan manufaktur dan non-manufaktur dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaan.

Sedangkan, penelitian yang spesifik terhadap ISR pernah dilakukan oleh Othman *et al.* (2009) dan Ayu (2010). Mereka menemukan bahwa jenis industri tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini

**Universitas Indonesia**

memprediksi bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah di antara perusahaan manufaktur dan non-manufaktur.

H4: Tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur berbeda dibandingkan dengan tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan non-manufaktur.

### **2.5.5 Faktor Umur Perusahaan**

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dan sukarela adalah umur perusahaan. Dalam penelitian ini, umur perusahaan dihitung sejak perusahaan *listing* atau terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan dengan umur yang lebih muda diprediksi akan melakukan penyebaran informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan umur yang lebih tua dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian risiko operasi serta untuk meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap posisi mereka. Selain itu, perusahaan dengan umur yang lebih muda membutuhkan waktu yang lebih banyak agar familiar dengan persyaratan pengungkapan yang diwajibkan oleh aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan dengan umur yang lebih muda kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan (Haniffa dan Cooke, 2002).

Di sisi lain, perusahaan dengan umur yang lebih tua kemungkinan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunannya dibandingkan dengan perusahaan dengan umur yang lebih muda. Menurut Akhtaruddin (2005), perusahaan dengan umur yang lebih tua akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunannya dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar. Owusu-Ansah (1998) menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan mengapa perusahaan dengan umur yang lebih tua akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan umur yang lebih muda. Pertama, perusahaan dengan umur yang lebih muda akan mengalami kerugian kompetitif apabila ia mengungkapkan mengenai pengeluaran riset, pengeluaran modal, dan pengembangan produk. Kerugian kompetitif akan muncul ketika informasi yang diungkapkan oleh perusahaan yang baru terbentuk itu digunakan oleh kompetitor lain. Di sisi lain, perusahaan dengan umur yang lebih tua justru termotivasi untuk

mengungkapkan informasi-informasi itu karena penyajian tersebut tidak akan membahayakan posisi kompetitif mereka. Kedua, biaya dan kemudahan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang diperlukan juga dapat dianggap sebagai kendala. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang sangat besar bagi perusahaan dengan umur yang lebih muda. Ketiga, perusahaan dengan umur yang lebih muda tidak memiliki *track record* yang dapat diandalkan dalam melakukan pengungkapan publik. Beberapa perusahaan dibentuk melalui proses akuisisi atau merger, akan tetapi ada juga perusahaan yang dibentuk dari awal. Perusahaan yang dibentuk dari awal sudah pasti tidak memiliki historis kegiatan operasi sebelumnya sehingga perusahaan yang baru terbentuk cenderung kurang memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas.

Penelitian Owusu-Ansah (1998), Liu dan Anbumozhi (2008), Hossain dan Hammami (2009), dan Omar dan Simon (2011) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara umur perusahaan dengan tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela. Namun, Marwata (2001), Sembiring (2003), dan Akhtaruddin (2005) menemukan bahwa umur perusahaan bukan merupakan *proxy* yang signifikan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, penelitian ini memperkirakan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih tua akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas.

H5: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian merupakan suatu proses sederhana untuk menemukan solusi atas sebuah masalah setelah melakukan studi secara menyeluruh dan menganalisis faktor-faktor situasional (Sekaran dan Bougie, 2010). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis* untuk mengetahui berapa besar tingkat pengungkapan dari 46 pokok pengungkapan ISR. Kolbe dan Burnett (1991) dalam buku Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan bahwa *content analysis* merupakan metode penelitian observasional yang digunakan secara sistematis untuk mengevaluasi isi simbolis dari seluruh bentuk komunikasi yang tercatat. *Content analysis* dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan juga laporan tahunan perusahaan. Metode *content analysis* memungkinkan penulis untuk menganalisis berapa besar jumlah informasi dan mengidentifikasi secara sistematis terkait sifat-sifatnya, seperti ada atau tidaknya kata-kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu.

Dalam penelitian Othman *et al.* (2009), mereka menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi jenis pengungkapan ISR dengan cara membaca dan menganalisis laporan tahunan perusahaan. Jenis pengungkapan ISR tersebut dikodekan ke dalam *coding sheet*. Karakteristik pengungkapan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, atau grafik dikodekan sesuai dengan tema pengungkapannya. Dalam penelitian tersebut, mereka tidak menghitung berapa banyak jumlah kemunculan dari pokok yang diungkapkan dalam setiap laporan tahunan perusahaan. Sepanjang terdapat minimal satu pokok yang diungkapkan dalam bentuk apapun, pokok pengungkapan tersebut dinyatakan tersedia. Metode ini tidak terlepas dari kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari metode ini terkait dengan subjektivitas untuk menginterpretasikan pokok-pokok ISR dalam proses pengkodean. Namun, metode

tersebut merupakan metode yang paling cocok untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan indeks ISR yang disusun dari beberapa penelitian terkait dengan rujukan utama tetap pada Othman *et al.* (2009) dengan beberapa penyesuaian. Oleh karena itu, metode *content analysis* yang digunakan dalam penelitian ini akan sama seperti penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, data perusahaan yang digunakan meliputi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Laporan tahunan telah dijelaskan lebih rinci dalam BAB 2. Laporan keberlanjutan merupakan praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keberlanjutan diartikan secara umum sebagai laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan PKBL merupakan laporan atas pelaksanaan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Landasan teori dan pengembangan hipotesis yang dibentuk merupakan hasil pencarian dan pengumpulan data dari beberapa literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan penelitian. Pencarian dan pengumpulan jurnal ilmiah dilakukan dengan menggunakan fasilitas jurnal *online* melalui beberapa situs web, seperti ELSEVIER, JSTOR, ProQuest, dan lain-lain.

Data yang harus dimiliki pertama kali adalah daftar perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah sebanyak empat periode dan tercatat (listed) di BEI selama kurun waktu 2009-2010. Daftar tersebut dapat diperoleh dari situs web BAPEPAM dan LK ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)). Berdasarkan daftar tersebut, perusahaan-perusahaan diseleksi untuk dijadikan sampel. Setelah memperoleh daftar perusahaan sampel, data-data perusahaan yang dibutuhkan untuk dasar pengisian indeks ISR

dapat diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web masing-masing perusahaan, REUTERS 3000 Xtra Hosted Terminal Platform di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis (PDEB) FEUI, dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI. Data perusahaan yang diperoleh meliputi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL.

### 3.3 Populasi, Metode Pengambilan Sampel, Sampel Penelitian, dan Data Panel

Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau sesuatu yang menjadi perhatian yang akan diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia. Daftar Efek Syariah merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK atau pihak yang disetujui BAPEPAM dan LK. Setelah menentukan populasi, tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses memilih jumlah elemen secukupnya dari populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman terhadap suatu sifat atau karakteristik memungkinkan kita untuk menggeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran dan Bougie, 2010). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan proses pengambilan sampel yang membatasi jumlah sampel sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian kuantitatif (Sekaran dan Bougie, 2010). Dalam penelitian ini, tahap-tahap pengambilan sampelnya adalah:

1. Perusahaan masuk dalam Daftar Efek Syariah dan tercatat (listed) di BEI selama kurun waktu 2009-2010. Daftar Efek Syariah selalu diperbaharui oleh BAPEPAM dan LK setiap enam bulan sekali (satu periode) sehingga sampel yang digunakan adalah perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah sebanyak empat periode.

2. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai satuan mata uang dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh sampel agar hasilnya tidak bias.
3. Laporan perusahaan tersedia di ruang publik.

Berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan kriteria-kriteria di atas, sampel dari penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah dan tercatat (listed) di BEI sebanyak empat periode selama kurun waktu 2009-2010 adalah 140 perusahaan.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai satuan mata uang pelaporan sebanyak 9 perusahaan, yaitu PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT. Indo Kordsa Tbk (BRAM), PT. Citra Tubindo Tbk (CTBN), PT. Darma Henwa Tbk (DEWA), PT. Titan Kimia Nusantara Tbk (FPNI), PT. International Nickel Indonesia Tbk (INCO), PT. Indo Rama Synthetics Tbk (INDR), PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan PT. Rig Tenders Tbk (RIGS).
3. Perusahaan yang laporannya tidak tersedia di situs web BEI, situs web masing-masing perusahaan, REUTERS 3000 Xtra Hosted Terminal Platform di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis (PDEB) FEUI, dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI sebanyak 14 perusahaan, antara lain PT. Argha Karya Prima Ind. Tbk (AKPI), PT. Sepatu Bata Tbk (BATA), PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT. Cipendawa Tbk (CPDW), PT. Dyviacom Intrabumi Tbk (DNET), PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT. Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII), PT. Panasia Indosyntex Tbk (HDTX), PT. Indonesia Air Transport Tbk (IATA), PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE), PT. Pyridam Farma Tbk (PYFA), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBB), PT. Siantar Top Tbk (STTP), dan PT. Trias Sentosa Tbk (TRST).

Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 117 perusahaan.

Gambar 3.1 di bawah ini merupakan rangkuman hasil proses pengambilan sampel yang telah dilakukan.

**Tabel 3.1 Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel**

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebanyak empat periode dan tercatat (listed) di BEI selama kurun waktu 2009-2010	140
2.	Eliminasi perusahaan yang menggunakan mata uang selain Rupiah	(9)
3.	Eliminasi keterbatasan data	(14)
Total Perusahaan		117

Sumber: Hasil olah penulis

Daftar perusahaan sampel disajikan lebih lengkap dalam Lampiran 2. Dalam lampiran tersebut terdapat kode *ticker* perusahaan, nama perusahaan, serta penggolongan sektor dan sub sektor perusahaan berdasarkan Fact Book IDX 2009 dan 2010.

Sesuai dengan penjelasan mengenai sampel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan data panel. Dalam suatu penelitian biasanya dikenal tiga jenis data, antara lain data *cross section*, data *time series*, dan data panel. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data panel adalah data yang dikumpulkan secara *cross section* dan diikuti oleh periode waktu tertentu (Nachrowi dan Usman, 2006). Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Oleh karena itu, data panel pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Penelitian dengan menggunakan data panel akan memiliki jumlah data yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, model yang digunakan dalam penelitian data panel akan lebih kompleks.

### 3.4 Metode Penelitian

#### 3.4.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai (Sekaran dan Bougie, 2010). Variabel juga dapat diartikan sebagai karakteristik yang dapat diamati dari suatu objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori (Riduwan dan Akdon, 2005). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Sekaran dan Bougie (2010) mendefinisikan variabel terikat sebagai variabel yang menjadi perhatian utama dari peneliti dengan tujuan untuk mengetahui variabel-variabel bebas yang mempengaruhinya dan menemukan jawaban atau solusi atas suatu masalah. Sedangkan, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif ataupun negatif.

Sesuai dengan tujuan penelitian, variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai dari indeks ISR yang diperoleh dari masing-masing perusahaan setiap tahun. Nilai indeks tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *content analysis* pada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan ISR tanpa pembobotan. Adharani (2005) dalam Oktoviana (2009) memaparkan mengenai dua pertimbangan penggunaan teknik tanpa pembobotan dalam *skoring* indeks pengungkapan sukarela. Pertama, laporan tahunan disampaikan untuk tujuan umum sehingga informasi yang diberikan tidak dapat dilihat dari sudut kepentingan tertentu. Suatu informasi tertentu tidak dapat dianggap lebih penting daripada informasi yang lain karena kadar kepentingan tiap-tiap pihak berbeda. Suatu informasi yang dianggap penting oleh satu pihak mungkin saja dianggap kurang penting oleh pihak lain ataupun sebaliknya. Kedua, pembobotan dapat mengandung subjektifitas karena tergantung pada penilaian dan argumentasi masing-masing peneliti. Oleh karena itu, *skoring* indeks ISR dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* tanpa pembobotan.

Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 46 pokok pengungkapan yang tersusun dalam enam tema. Masing-masing pokok pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila pokok pengungkapan ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila sebaliknya. Nilai-nilai tersebut akan dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan. Nilai menurut tema akan menggambarkan tema apa yang menjadi pusat perhatian utama masing-masing perusahaan. Nilai yang diperhitungkan sebagai indeks ISR adalah nilai secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai terbesar adalah 46 dan nilai terkecil adalah 0 untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Variabel terikat ini diberi simbol ISR. Sedangkan, variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari lima faktor, antara lain:

1. Penerbitan Sukuk

Penerbitan sukuk dapat diidentifikasi dari laporan keuangan perusahaan atau situs web BEI yang menyediakan daftar sukuk berdasarkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK. Penerbitan sukuk merupakan variabel boneka (*dummy variable*). Variabel boneka adalah variabel yang memiliki dua atau lebih tingkatan yang berbeda yang dikodekan dengan 0 atau 1. Variabel boneka memungkinkan peneliti untuk menggunakan variabel nominal atau variabel ordinal sebagai variabel bebas untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi variabel terikat (Sekaran dan Bougie, 2010). Dalam penelitian ini, perusahaan yang menerbitkan sukuk diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk diberi nilai 0. Variabel bebas ini diberi simbol DSUKUK.

2. Ukuran Perusahaan

*Proxy* dari ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah natural logaritma dari total aset yang nilainya dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel bebas ini menggunakan satuan mata Rupiah dan diberi simbol SIZE.

### 3. Profitabilitas

Nilai profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Rasio ini dapat dihitung dengan membagi nilai laba bersih (net income) terhadap total aset rata-rata (average total asset). Data nilai laba bersih dapat diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif selama periode dalam laporan tahunan perusahaan, sedangkan data nilai total aset dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel bebas ini menggunakan satuan mata uang Rupiah dan diberi simbol PROFIT.

### 4. Jenis Industri

Pengklasifikasian jenis industri yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Fact Book IDX 2010. Tabel 3.2 di bawah ini merupakan klasifikasi jenis industri berdasarkan Fact Book IDX 2010.

**Tabel 3.2 Jenis Industri berdasarkan Fact Book IDX 2010**

<b>A.</b>	<b><i>Primary Sectors (Extractive)</i></b>
	<i>Sector 1 Agriculture</i>
	<i>Sector 2 Mining</i>
<b>B.</b>	<b><i>Secondary Sectors (Processing/Manufacturing Industry)</i></b>
	<i>Sector 3 Basic Industry and Chemicals</i>
	<i>Sector 4 Miscellaneous Industry</i>
	<i>Sector 5 Consumer Goods Industry</i>
<b>C.</b>	<b><i>Tertiary Sectors (Service)</i></b>
	<i>Sector 6 Property, Real Estate, and Building Construction</i>
	<i>Sector 7 Infrastructure, Utilities, and Transportation</i>
	<i>Sector 8 Finance</i>
	<i>Sector 9 Trade, Service, and Investment</i>

Sumber: Fact Book IDX 2010

Jenis industri merupakan variabel boneka (variabel dummy). Dalam penelitian ini, perusahaan yang termasuk ke dalam industri manufaktur diberi nilai 1 dan perusahaan selain industri manufaktur diberi nilai 0. Variabel bebas ini diberi simbol DINDS.

## 5. Umur Perusahaan

Umur perusahaan dihitung dari selisih antara tahun penelitian dengan tahun pencatatan atau tahun IPO (first issue) di BEI. Informasi tersebut dapat diperoleh dari situs web BEI dan/atau laporan tahunan masing-masing perusahaan. Variabel bebas ini diberi simbol AGE.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, rangkuman mengenai variabel bebas, *proxy*, dan dugaan tanda dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 Rangkuman Variabel Bebas, *Proxy*, dan Dugaan Tanda**

Simbol Variabel	Variabel	<i>Proxy</i>	Dugaan Tanda	Penelitian Terdahulu
SUKUK	Penerbitan Sukuk	Perusahaan yang menerbitkan sukuk dan perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk	+	Noegraheni (2005) dan Hossain <i>et al.</i> (2006)
SIZE	Ukuran Perusahaan	Natural logaritma dari total aset	+	Haniffa & Cooke (2005), Hossain & Hammami (2009), dan Othman <i>et al.</i> (2009)
PROFIT	Profitabilitas	Return on Asset (ROA) = laba bersih / total aset rata-rata	+	Othman <i>et al.</i> (2009) dan Ayu (2010)
INDS	Jenis Industri	Industri manufaktur dan industri non-manufaktur	+	Hossain <i>et al.</i> (2006), Othman <i>et al.</i> (2009), dan Ayu (2010)
AGE	Umur Perusahaan	Selisih antara tahun penelitian dengan tahun pencatatan atau tahun IPO (first issue) di BEI	+	Liu & Anbumozhi (2008) dan Hossain & Hammami (2009)

Sumber: Hasil olah penulis

### 3.4.2 Hipotesis dan Model Penelitian

Pengujian hipotesis bertujuan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan. Signifikan memiliki arti bahwa nilai koefisien regresi secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien *slope* sama dengan nol, dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Nachrowi dan Usman, 2006). Mereka juga memaparkan bahwa secara umum tahapan metodologi terdiri dari enam tahapan. Pertama, mengajukan hipotesis atau pertanyaan dengan mengacu pada teori. Kedua, mengajukan model ekonometri yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam rangka menjawab hipotesis atau pertanyaan tersebut. Ketiga, mengestimasi parameter dari model tersebut dengan menggunakan *software computer*. Keempat, melakukan verifikasi terhadap hasil estimasi parameter untuk menentukan apakah hasil tersebut sesuai dengan model atau tidak. Kelima, jika hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa model sudah layak, model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan atau nilai variabel. Keenam, prediksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan demikian, salah satu kegunaan utama dari suatu penelitian adalah hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Dalam pengujian hipotesis, interval kepercayaan  $100(1 - \alpha)$  persen dikenal sebagai daerah penerimaan hipotesis nol, sedangkan daerah  $\alpha$  dikenal sebagai daerah penolakan hipotesis nol atau daerah kritis. Oleh karena itu, batas keyakinan atau titik ujung interval kepercayaan disebut nilai kritis (Gujarati dan Porter, 2009). Maksud dari  $\alpha = 5\%$  adalah apabila dalam populasi yang sama percobaan dilakukan sebanyak 100 kali maka penduga koefisien regresi akan berada pada interval tersebut sebanyak 95 kali. Nilai  $\alpha$  juga dapat dinyatakan sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dapat ditolerir. Umumnya, untuk ilmu sosial, termasuk ekonomi dan keuangan, besarnya  $\alpha$  adalah 5% (Nachrowi dan Usman, 2006).

Sesuai hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ISR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DSUKUK_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 PROFIT_{it} + \beta_4 DINDS_{it} + \beta_5 AGE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Dimana:

ISR	= indeks pengungkapan ISR
DSUKUK	= 1 jika perusahaan menerbitkan sukuk dan 0 jika sebaliknya
SIZE	= natural logaritma dari total aset
PROFIT	= rasio laba bersih terhadap total aset rata-rata (return on asset)
DINDS	= 1 jika perusahaan merupakan industri manufaktur dan 0 jika perusahaan merupakan industri non-manufaktur
AGE	= selisih antara tahun penelitian dengan tahun pencatatan atau tahun IPO (first issue) di BEI
i	= perusahaan sampel (i = 1, 2, 3, ...)
t	= tahun 2009, 2010
$\beta_0$	= konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= koefisien regresi
$\varepsilon$	= error

Berdasarkan teori yang dipresentasikan oleh Siswantoro dan Agung (2010), model tersebut mengandung asumsi tersembunyi (hidden assumption) bahwa faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan memiliki pengaruh yang sama terhadap tingkat pengungkapan ISR pada kelompok perusahaan yang menerbitkan sukuk, perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk, perusahaan manufaktur, dan perusahaan non-manufaktur. Mereka mengemukakan bahwa secara umum variabel bebas numerik memiliki pengaruh yang berbeda pada dua kelompok yang terbagi atas variabel bebas boneka (dummy). Dalam studinya, mereka menyimpulkan bahwa model interaksi harus digunakan apabila terdapat dua atau

lebih variabel bebas, khususnya apabila terdapat variabel bebas kategorikal yang direpresentasikan menggunakan variabel boneka (dummy). Hal ini dikarenakan variabel boneka (dummy) merupakan alat untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok yang didefinisikan oleh variabel boneka (dummy) tersebut. Dengan demikian, model interaksi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pengaruh variabel bebas numerik terhadap variabel terikat numerik di antara dua variabel bebas boneka (dummy) atau empat kelompok perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ISR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DSUKUK_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 PROFIT_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 DSUKUK_{it} * SIZE_{it} + \beta_6 DSUKUK_{it} * PROFIT_{it} + \beta_7 DSUKUK_{it} * AGE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

$$ISR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DINDS_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 PROFIT_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 DINDS_{it} * SIZE_{it} + \beta_6 DINDS_{it} * PROFIT_{it} + \beta_7 DINDS_{it} * AGE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

Dimana:

ISR	= indeks pengungkapan ISR
DSUKUK	= 1 jika perusahaan menerbitkan sukuk dan 0 jika sebaliknya
SIZE	= natural logaritma dari total aset
PROFIT	= rasio laba bersih terhadap total aset rata-rata (return on asset)
DINDS	= 1 jika perusahaan merupakan industri manufaktur dan 0 jika perusahaan merupakan industri non-manufaktur
AGE	= selisih antara tahun penelitian dengan tahun pencatatan atau tahun IPO (first issue) di BEI
DSUKUK*SIZE	= interaksi antara ukuran perusahaan dengan variabel boneka (dummy) penerbitan sukuk
DSUKUK*PROFIT	= interaksi antara profitabilitas dengan variabel boneka (dummy) penerbitan sukuk

DSUKUK*AGE	= interaksi antara umur perusahaan dengan variabel boneka (dummy) penerbitan sukuk
DINDS*SIZE	= interaksi antara ukuran perusahaan dengan variabel boneka (dummy) jenis industri
DINDS*PROFIT	= interaksi antara profitabilitas dengan variabel boneka (dummy) jenis industri
DINDS*AGE	= interaksi antara umur perusahaan dengan variabel boneka (dummy) jenis industri
$i$	= perusahaan sampel ( $i = 1, 2, 3, \dots$ )
$t$	= tahun 2009, 2010
$\beta_0$	= konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	= koefisien regresi
$\varepsilon$	= error

### 3.5 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan *software computer* Eviews 6.0, SPSS 17, dan Minitab 16 sebagai perangkat pengolahan data. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Dalam kebanyakan penelitian pada tingkat yang sangat minimal, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa sering fenomena tertentu terjadi, rata-rata dari sekelompok data, dan tingkat variabilitas dalam kelompok. Semua itu dikenal sebagai statistik deskriptif. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena yang menarik perhatian. Riduwan dan Akdon (2005) memaparkan bahwa tujuan statistik deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang akurat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki atau diteliti. Berdasarkan Riduwan dan Akdon (2005) dan Sekaran dan Bougie (2010), statistik deskriptif yang sering

digunakan dapat ditunjukkan melalui beberapa ukuran, yakni frekuensi, tendensi sentral (mean, median, modus), dan dispersi (kisaran, varians, standar deviasi).

### **3.5.2 Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdistribusi normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan melihat nilai rasio skewness masing-masing variabel. Apabila nilai rasio skewness berkisar antara -2 dan +2 dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

### **3.5.3 Analisis Residual**

Analisis residual dilakukan untuk mengetahui apakah residual mengikuti distribusi normal. Analisis residual dapat dilakukan dengan melihat histogram dari residual. Apabila histogram berbentuk kurva yang menyerupai lonceng (bell-shaped) maka residual mengikuti distribusi normal.

### **3.5.4 Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini menggunakan model regresi linier ganda. Model regresi linier ganda merupakan model regresi yang digunakan untuk membuat hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Model regresi linier ganda memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimate).

Pada dasarnya, prinsip-prinsip model regresi linier ganda tidak berbeda dengan prinsip-prinsip model regresi linier sederhana. Namun, dalam model regresi linier ganda akan ditemukan beberapa permasalahan, seperti multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Secara statistik, permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengganggu model sehingga akan menyesatkan dalam interpretasi dan kesimpulan. Untuk itu, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius (Nachrowi dan Usman, 2002). Uji asumsi klasik tersebut antara lain:

### 1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan di mana antara dua variabel bebas atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau tinggi tetapi tidak sempurna. Konsekuensinya, apabila terdapat multikolinearitas sempurna, koefisien regresi tidak tentu dan kesalahan standar (standard error) tidak terhingga. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji formal pada perangkat pengolah data seperti SPSS dan Eviews, yakni dengan Eigenvalues dan Conditional Index, VIF dan Tolerance, dan Correlation Matrix.

### 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana variansi dari residual (error) pada model regresi tidak konstan atau berubah-ubah. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap disebut homoskedastisitas. Dalam praktiknya, heteroskedastisitas banyak ditemui pada data *cross section* karena pengamatan dilakukan pada individu yang berbeda pada saat yang sama. Namun, bukan berarti heteroskedastisitas tidak muncul dalam data *time series* (Nachrowi dan Usman, 2006). Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa pengujian, antara lain: metode grafik, Uji Park, Uji Glejser, Uji Spearman's Rank Correlation, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Breusch-Pagan-Godfrey, Uji White, dan Uji Harvey (Nachrowi dan Usman, 2006 dan Gujarati dan Porter, 2009).

### 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan masalah yang menjadi fokus utama dari data *time series* karena pada dasarnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data masa lalu. Autokorelasi merupakan keadaan di mana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Permasalahan autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa cara, yakni: metode grafik, Uji Run, Lagrange Multiplier (LM) atau Uji Breusch-Godfrey (BG), dan Uji Durbin Watson.

### 3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk memeriksa apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan. Untuk itu, beberapa uji yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) yang dinotasikan dengan  $R^2$  merupakan ukuran yang penting dalam regresi untuk menginformasikan apakah model regresi terestimasi dengan baik atau tidak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Secara lebih spesifik, nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Apabila koefisien determinasi sama dengan 0 ( $R^2 = 0$ ), variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sedangkan, apabila koefisien determinasi sama dengan 1 ( $R^2 = 1$ ), variasi dari Y dapat diterangkan oleh X secara keseluruhan. Dengan demikian, ukuran *goodness of fit* dari suatu model ditentukan oleh  $R^2$  yang nilainya antara nol dan satu (Nachrowi dan Usman, 2006).

2. Uji-F

Uji-F merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menguji hipotesis. Uji-F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama. Dengan kata lain, Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Signifikansi Uji-F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dapat dikatakan bahwa paling tidak ada satu koefisien regresi yang signifikan secara statistik (Nachrowi dan Usman, 2006). Selain itu, Uji-F juga dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas statistik F dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Apabila probabilitas statistik  $F <$  tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 maka model regresi tersebut dapat digunakan untuk menguji signifikansi antarvarians (Riduwan dan Akdon, 2005).

### 3. Uji-t

Setelah melakukan pengujian koefisien regresi secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien regresi secara individu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Uji-t. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Signifikansi Uji-t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , nilai  $t$  berada dalam daerah penolakan sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan  $(1-\alpha) \times 100\%$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas signifikan secara statistik (Nachrowi dan Usman, 2006). Cara lain yang dapat digunakan dalam Uji-t adalah dengan membandingkan probabilitas statistik  $t$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Apabila probabilitas statistik  $t <$  tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 maka variabel bebas tersebut signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat (Riduwan dan Akdon, 2005).

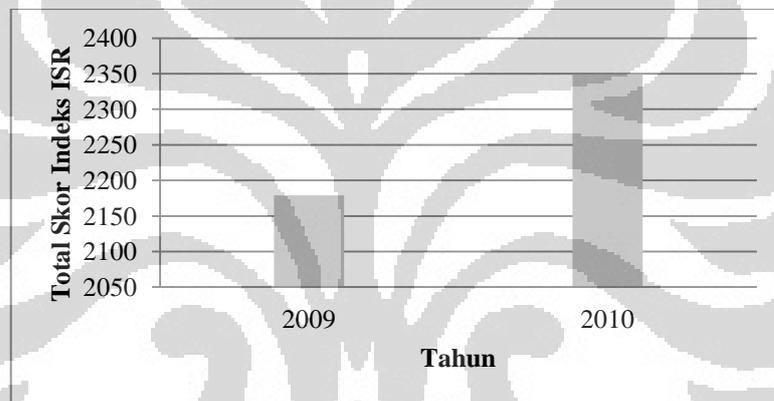
## BAB 4

### ANALISIS PENELITIAN

#### 4.1 Analisis Hasil *Content Analysis*

Skor indeks ISR yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *content analysis* terhadap laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL 234 perusahaan sampel dalam kurun waktu 2009-2010. Hasil *content analysis* skor indeks ISR secara lebih lengkap disajikan dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4.

**Gambar 4.1 Total Skor Indeks ISR Tahun 2009-2010**



Sumber: Hasil olah penulis

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan skor indeks ISR mengalami peningkatan, yaitu dengan total sebanyak 2.179 pokok pengungkapan di tahun 2009 dan 2.349 pokok pengungkapan di tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang kegiatan operasinya sesuai dengan prinsip syariah telah melakukan peningkatan pelaksanaan, pelaporan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah selama kurun waktu 2009-2010. Hasil ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan praktik tanggung jawab sosial dan syariah di Indonesia.

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah setiap perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan baik, namun ada pula perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan

sangat minim meskipun perusahaan tersebut telah dikategorikan sebagai perusahaan syariah oleh badan otoritas pasar modal dan lembaga keuangan. Perbedaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah setiap perusahaan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Salah satu contoh faktor internal adalah *nature* dari kegiatan operasi dan kebijakan pimpinan setiap perusahaan. Menurut Fitria dan Hartanti (2010), kebijakan pimpinan sangat mempengaruhi pola pelaksanaan tanggung jawab sosial di perusahaan syariah. Sedangkan, salah satu contoh faktor eksternal adalah tekanan dari para pemangku kepentingan masing-masing perusahaan syariah untuk melaksanakan, melaporkan, dan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah sifatnya sukarela, tidak ada standar mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial secara syariah, dan tidak ada standar mengenai pokok-pokok pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan syariah menjadi tidak seragam.

**Tabel 4.1 Daftar Perusahaan dengan Skor Indeks ISR Tiga Tertinggi dan Tiga Terendah Tahun 2009-2010**

No.	Skor Indeks ISR Tertinggi				Skor Indeks ISR Terendah			
	2009		2010		2009		2010	
	Kode	Skor	Kode	Skor	Kode	Skor	Kode	Skor
1.	SMGR TINS UNTR	33	TINS	36	AIMS	6	AIMS	7
2.	ANTM	32	ANTM ELSA	35	RAJA	7	PSKT RDTX SUGI	8
3.	CTRA PTBA	31	AALI SMGR	34	SUGI	8	LPIN PGLI	9

Sumber: Hasil olah penulis

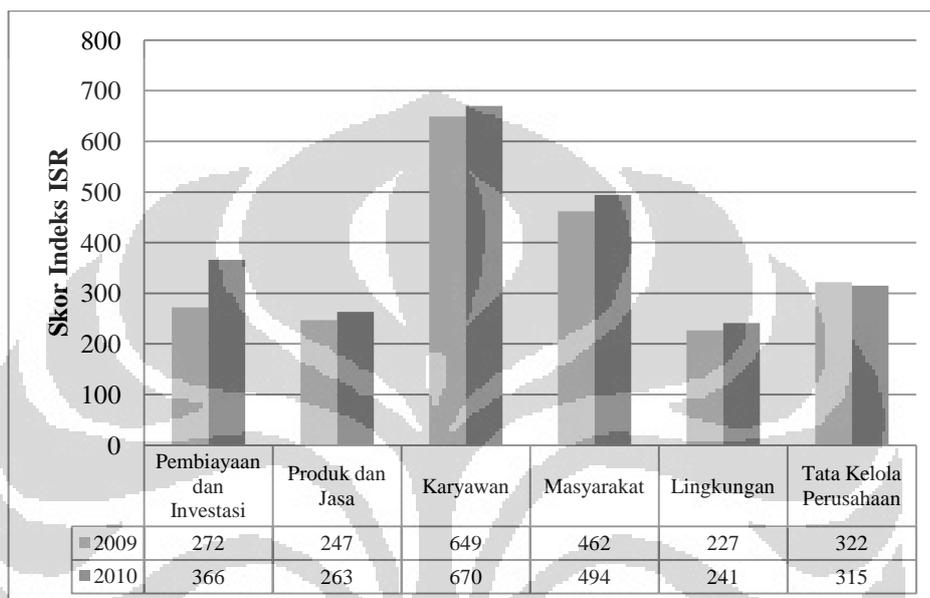
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa skor indeks ISR tertinggi tahun 2009 diduduki oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (SMGR), PT. Timah (Persero) Tbk (TINS), dan PT. United Tractors Tbk (UNTR) dengan skor 33. Sedangkan, skor indeks ISR tertinggi tahun 2010 dimiliki oleh PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) dengan skor 36. Skor indeks ISR tiga tertinggi didominasi oleh perusahaan BUMN yang bergerak di industri manufaktur bidang semen

(SMGR), eksportir dan produsen timah (TINS), dan pertambangan (ANTM dan PTBA). Perusahaan BUMN sangat logis jika melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas karena lebih dari setengah kepemilikan BUMN berasal dari dana pemerintah atau APBN. Dengan kata lain, sebagian besar kepemilikan BUMN merupakan dana masyarakat yang mereka setorkan ke pemerintah melalui sistem pajak. Oleh karena itu, BUMN sudah seharusnya melakukan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih baik dan lebih luas kepada seluruh para pemangku kepentingannya termasuk masyarakat. Selain itu, perusahaan non-BUMN yang juga menduduki posisi skor indeks ISR tiga tertinggi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor alat berat (UNTR), jasa hulu migas (ELSA), properti (CTRA), dan perkebunan (AALI). Di sisi lain, PT. Akbar Indomakmur Stimec Tbk (AIMS) menempati posisi skor indeks ISR terendah selama dua tahun berturut-turut, yakni dengan skor 6 pada tahun 2009 dan skor 7 pada tahun 2010. Secara tidak langsung, PT. Akbar Indomakmur Stimec Tbk (AIMS) hanya melakukan pengungkapan pokok-pokok tanggung jawab sosial secara syariah sebesar 13%-15% dalam laporan tahunannya.

Apabila diperhatikan secara seksama, daftar perusahaan yang menempati posisi tiga tertinggi dan tiga terendah relatif sama, meskipun skor indeks ISR masing-masing perusahaan cenderung meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup konsisten dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah. Perusahaan dengan skor indeks ISR tinggi akan konsisten untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan baik. Sedangkan, perusahaan dengan skor indeks ISR rendah juga akan konsisten untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan sangat minim. Namun, skor indeks ISR yang rendah tidak dapat mutlak disalahartikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan baik karena terdapat dua kemungkinan, yakni perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial secara syariah akan tetapi tidak diungkapkan dalam laporan-laporannya atau perusahaan tersebut memang tidak melakukan tanggung jawab sosial secara syariah.

Pembahasan *content analysis* juga dapat dilakukan dari segi masing-masing tema indeks ISR. Indeks ISR terdiri dari enam tema, antara lain pembiayaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Hasil *content analysis* skor indeks ISR masing-masing tema disajikan lebih lengkap dalam Lampiran 5.

**Gambar 4.2 Total Skor Indeks ISR Masing-masing Tema Tahun 2009-2010**



Sumber: Hasil olah penulis

Sesuai dengan Gambar 4.2 di atas, secara umum skor indeks ISR masing-masing tema mengalami peningkatan selama tahun 2009-2010, kecuali tema tata kelola perusahaan yang mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dari 322 pokok pengungkapan di tahun 2009 menjadi 315 pokok pengungkapan di tahun 2010. Tema pembiayaan dan investasi meningkat dari 272 pokok pengungkapan di tahun 2009 menjadi 366 pokok pengungkapan di tahun 2010. Peningkatan pada tema inilah yang paling signifikan dibandingkan dengan peningkatan pada tema lainnya. Tema produk dan jasa mengalami peningkatan dari 247 pokok pengungkapan pada tahun 2009 menjadi 263 pengungkapan pada tahun 2010. Tema karyawan meningkat dari 649 pokok pengungkapan menjadi 670 pokok pengungkapan di masing-masing tahun 2009 dan 2010. Selain itu, tema masyarakat juga turut mengalami kenaikan dari 462 pokok pengungkapan pada 2009 menjadi 494 pokok pengungkapan pada 2010. Terakhir, tema lingkungan juga meningkat dari 227 pokok pengungkapan untuk tahun 2009

menjadi 241 pokok pengungkapan untuk tahun 2010. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, secara keseluruhan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah mengalami peningkatan dari 2.179 pokok pengungkapan di tahun 2009 menjadi 2.349 pokok pengungkapan di tahun 2010.

Pembahasan selanjutnya terkait daftar perusahaan dengan skor indeks ISR tertinggi dan terendah per masing-masing tema. Setiap perusahaan memiliki *concern* yang berbeda-beda terhadap aspek yang ingin perusahaan tonjolkan dalam laporan-laporan ataupun *press release* yang perusahaan terbitkan. Aspek-aspek tersebut tentu selaras dengan visi dan misi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila perusahaan dengan karakteristik bisnis yang berbeda memiliki kecenderungan pengungkapan yang berbeda atas keenam tema indeks ISR tersebut.

**Tabel 4.2 Daftar Perusahaan dengan Skor Indeks Tema ISR Tertinggi Tahun 2009-2010**

No.	Tema	Skor Indeks Tema ISR Tertinggi			
		2009		2010	
		Kode	Skor	Kode	Skor
1.	Pembiayaan dan Investasi	AALI, ADHI, CSAP, CTRA, EPMT, ISAT, RBMS, SSIA, TLKM, TOTL, UNTR, dan WIKA	4	ABBA, CTRA, ELSA, RBMS, dan WIKA	5
2.	Produk dan Jasa	KAEF	4	KAEF, MRAT, TPIA, dan UNVR	4
3.	Karyawan	HITS dan ISAT	10	ISAT	11
4.	Masyarakat	TINS dan UNTR	10	TINS	10
5.	Lingkungan	AALI, ANTM, ASGR, INTP, PTBA, PTSN, SGRO, SMGR, TINS, TPIA, dan UNTR	5	AALI, ANTM, ASGR, ASII, CTRA, INTP, KLBF, PTBA, PTSN, SGRO, SMGR, TINS, UNTR, dan UNVR	5
6.	Tata Kelola Perusahaan	TINS dan TLKM	5	TINS dan TLKM	5

Sumber: Hasil olah penulis

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, penjelasan untuk masing-masing tema akan dijelaskan satu per satu. Pertama, daftar perusahaan yang memiliki kecenderungan pengungkapan pada tema pembiayaan dan investasi menurun dari 12 perusahaan menjadi 5 perusahaan selama 2009-2010. Namun, ada pula perusahaan yang tetap konsisten menaruh perhatian lebih pada pengungkapan tema pembiayaan dan investasi, yaitu PT. Ciputra Development Tbk (CTRA), PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS), dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan non-manufaktur yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Ketiga perusahaan ini memiliki kepentingan yang sama dalam hal pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, fokus utama ketiga perusahaan tersebut terletak pada tema pembiayaan dan investasi dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariaah.

Kedua, sebaliknya, perusahaan yang *concern* dengan tema produk dan jasa mengalami peningkatan dari 1 perusahaan di tahun 2009 menjadi 4 perusahaan di tahun 2010. Satu-satunya perusahaan yang konsisten untuk tetap fokus pada pengungkapan yang lebih komprehensif dalam aspek produk dan jasa adalah PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF). Seperti yang kita ketahui, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) merupakan perusahaan BUMN dan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, sudah sewajarnya PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) melakukan pengungkapan yang lebih utama pada tema produk dan jasa karena bidang usahanya berhubungan dengan tanggung jawab moral kesehatan masyarakat luas. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) harus meyakinkan masyarakat luas bahwa obat-obatan yang dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan, halal, aman untuk dikonsumsi, serta memiliki kualitas terbaik. Selain itu, pelayanan kesehatan yang dilakukan juga harus memadai dan sesuai dengan standar mutu internasional.

Ketiga, serupa dengan tema pembiayaan investasi, daftar perusahaan yang menaruh perhatian penuh pada pengungkapan tema karyawan menurun dari 2 perusahaan pada tahun 2009 menjadi 1 perusahaan pada tahun 2010. Perusahaan yang selalu konsisten memomorsatukan pengungkapan tema karyawan dalam laporan-laporannya adalah PT. Indosat Tbk (ISAT). PT. Indosat (ISAT)

merupakan perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional. Dalam berbagai laporannya, PT. Indosat (ISAT) memang terlihat memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan-karyawannya.

Keempat, pada tahun 2009 terdapat dua perusahaan yang skor indeks tema ISR tertingginya terletak pada tema masyarakat, yaitu PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) dan PT. United Tractors Tbk (UNTR). Namun, pada tahun 2010 hanya PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) yang konsisten tetap menjadikan tema masyarakat sebagai tema yang mendapat perhatian penuh dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah. Salah satu faktor yang dianggap menyebabkan PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) melakukan pengungkapan lebih luas pada tema masyarakat karena PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) merupakan perusahaan BUMN dan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah. Sebagai perusahaan BUMN atau perusahaan milik masyarakat sekaligus perusahaan penambang timah, PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) merasa wajib melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Bentuk konkrit tanggung jawab sosial terhadap masyarakat diwujudkan PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) dalam program kemitraan. Program kemitraan merupakan wujud komitmen PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) beroperasi. Program ini juga sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan Program Bina Lingkungan (BL). Jika dilihat dari sifat Keputusan Menteri tersebut, program ini wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN. Namun, pada kenyataannya hanya PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) yang terbukti telah melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif terkait dengan tema masyarakat di laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan PKBL-nya dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kelima, tema lingkungan merupakan tema indeks ISR yang paling banyak mendapat sorotan utama dari beberapa perusahaan. Dalam penelitian ini, terlihat

bahwa dalam kurun waktu 2009-2010 semakin banyak perusahaan yang melaksanakan, melaporkan, dan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara syariah yang berfokus pada lingkungan. Di tahun 2009 terdapat 11 perusahaan yang *concern* utama laporan tanggung jawab sosial syariahnya mengarah pada tema lingkungan, sedangkan di tahun 2010 jumlahnya terus bertambah menjadi 14 perusahaan. Secara umum, perusahaan-perusahaan tersebut konsisten untuk selalu berkomitmen mengedepankan praktik tanggung jawab sosial terhadap lingkungan serta mengungkapkannya secara lengkap dan komprehensif dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL-nya. Perusahaan yang menitikberatkan pengungkapan laporan-laporannya pada tema lingkungan didominasi oleh perusahaan BUMN, manufaktur, pertambangan, properti, dan perkebunan. Perusahaan tersebut sengaja menonjolkan aspek lingkungan sebagai aspek utama dalam pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah. Hal ini dikarenakan *nature* bisnis perusahaan tersebut bersentuhan langsung dengan alam atau lingkungan. Tidak ada satupun perusahaan yang ingin dikenal sebagai perusahaan perusak lingkungan hanya karena memiliki latar belakang *profit-oriented*. Bertolak dari hal tersebut, perusahaan tersebut merasa berkepentingan dan berkewajiban untuk melaksanakan, melaporkan, dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan fokus utama pada aspek lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menjaga reputasi (image) perusahaan di hadapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingannya.

Keenam, tema yang terakhir adalah tema tata kelola perusahaan. Dalam tema ini, PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) dan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) membuktikan konsistensinya untuk terus *concern* pada isu tata kelola perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah. Kedua perusahaan tersebut memiliki skor indeks ISR tertinggi pada tema tata kelola perusahaan dalam kurun waktu 2009-2010. Kedua perusahaan tersebut memang bergerak dalam bidang usaha yang berbeda, PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) merupakan perusahaan penambang timah sedangkan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) merupakan perusahaan jasa telekomunikasi. Namun, kedua perusahaan tersebut memiliki satu kesamaan,

yakni sama-sama merupakan perusahaan BUMN. Peraturan mengenai tata kelola perusahaan pada perusahaan BUMN sudah pasti lebih komprehensif. Dalam hal ini, PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) dan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) berhasil mengungkapkan aspek tata kelola perusahaan dengan baik sesuai dengan indeks ISR dibandingkan dengan perusahaan BUMN lain.

Dalam rangka mempertajam analisis, bagian selanjutnya merupakan pembahasan mengenai pokok-pokok pengungkapan setiap tema. Rangkuman mengenai jumlah perusahaan yang disajikan per pokok pengungkapan dapat dilihat dalam Lampiran 6. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tema pengungkapan dalam indeks ISR terbagi menjadi enam tema besar, yakni pembiayaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Berikut adalah penjelasan hasil *content analysis* untuk setiap tema indeks ISR:

#### 1. Tema Pembiayaan dan Investasi

Tema pembiayaan dan investasi terdiri dari lima pokok pengungkapan. Pokok pengungkapan kegiatan yang mengandung riba merupakan pokok pengungkapan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Pada tahun 2009 dan 2010 terdapat 115 perusahaan yang konsisten mengungkapkan kegiatan yang mengandung riba dalam laporannya. Pengungkapan tersebut mencakup jumlah utang yang mengandung bunga, jumlah beban bunga, tujuan penggunaan utang yang mengandung bunga, serta pendapatan bunga. Pengungkapan mengenai apakah perusahaan melakukan kegiatan yang mengandung *gharar* atau tidak mengalami peningkatan dari 54 perusahaan di tahun 2009 menjadi 80 perusahaan di tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan syariah di Indonesia sudah mulai baik dalam mengungkapkan apakah mereka terlibat dalam kegiatan *gharar* atau tidak. Hal ini memberikan dampak positif bagi para investor Muslim dalam mengambil keputusan investasi.

Sebagai perusahaan yang sahamnya dikategorikan sebagai saham syariah oleh BAPEPAM dan LK, sudah selazimnya perusahaan tersebut melakukan pembayaran zakat serta mengungkapkannya. Namun, dalam penelitian ini hanya 5 perusahaan di tahun 2009 dan 8 perusahaan di tahun 2010 yang mengungkapkan perihal terkait kegiatan zakat yang telah mereka lakukan. Hal ini menunjukkan

bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum secara komprehensif mengungkapkan kegiatan zakat yang telah mereka lakukan. Tidak diungkapkannya perihal zakat dalam laporan perusahaan mengandung dua kemungkinan, yakni perusahaan telah membayar zakat akan tetapi tidak mengungkapkannya di laporan perusahaan atau perusahaan memang tidak membayar zakat sama sekali sehingga perusahaan tidak melakukan pengungkapan dalam laporannya.

Pokok pengungkapan selanjutnya adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih. Perusahaan yang mengungkapkan hal ini meningkat cukup signifikan dari 16 perusahaan pada 2009 menjadi 82 perusahaan pada 2010. Salah satu faktor utama yang diduga menyebabkan lonjakan yang cukup signifikan ini adalah dengan diberlakukannya PSAK 50 (Revisi 2006) pada 1 Januari 2010 (sesuai dengan surat pengumuman DSAK IAI No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008). Dalam PSAK 50 disebutkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan mengenai risiko-risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan, salah satunya adalah risiko kredit. Dampak dari hal tersebut membuat sebagian besar perusahaan mengungkapkan kebijakan atas pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih secara lebih komprehensif dalam laporannya.

Pokok pengungkapan yang terakhir dalam tema ini terkait dengan ada atau tidaknya pernyataan nilai tambah dalam laporan perusahaan. Jumlah perusahaan yang mengungkapkan hal ini relatif konsisten dalam kurun waktu 2009-2010 karena pernyataan nilai tambah biasanya diungkapkan pada bagian visi, misi, nilai-nilai perusahaan, laporan Dewan Komisaris, atau laporan Dewan Direksi yang isinya cenderung hampir sama setiap tahun.

Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang mengungkapkan masing-masing pokok pengungkapan pembiayaan dan investasi mengalami peningkatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin ke sini perusahaan syariah semakin meningkatkan kualitas pengungkapan pembiayaan dan investasinya agar lebih sesuai dengan prinsip Islam.

## 2. Tema Produk dan Jasa

Dalam tema produk dan jasa terdapat empat pokok pengungkapan. Pertama, pokok pengungkapan terkait dengan produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan. Jumlah perusahaan yang mengungkapkan hal ini mengalami peningkatan sebanyak 11 perusahaan selama tahun 2009-2010. Peningkatan ini berhubungan erat dengan semakin merebaknya isu pemanasan global dalam beberapa tahun belakangan. Isu pemanasan global memicu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk dapat menghasilkan produk dan/atau melakukan kegiatan operasi yang ramah lingkungan.

Kedua, pokok pengungkapan yang berhubungan dengan kehalalan produk. Pada tahun 2009, perusahaan yang melakukan pengungkapan mengenai kehalalan produk hanya PT. Mahaka Media Tbk (ABBA) dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF). Pada tahun 2010, perusahaan yang melakukan pengungkapan mengenai kehalalan produk mengalami peningkatan, yakni terdiri dari PT. Mahaka Media Tbk (ABBA), PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), PT. Mustika Ratu Tbk (MRAT), PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (PTIA), dan PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Hal ini memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan Muslim, khususnya konsumen Muslim, untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan perusahaan tersebut halal atau tidak. Meskipun menurut BAPEPAM dan LK perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah merupakan perusahaan yang produknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagian besar perusahaan masih tidak mengungkapkan mengenai kehalalan produknya dalam laporan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang tidak mengungkapkan kehalalan produk dalam laporannya bukan berarti bahwa produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak halal. Oleh karena itu, alangkah lebih baik apabila perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan syariah tersebut melakukan pengungkapan mengenai status kehalalan produk dalam laporannya.

Pokok pengungkapan yang ketiga dan keempat adalah keamanan dan kualitas produk serta pelayanan pelanggan. Pokok pengungkapan ini menekankan pada pengungkapan sistem manajemen mutu, pelayanan jual-beli, dan penanganan komplain atau keluhan konsumen. Kedua pokok pengungkapan ini merupakan

pokok pengungkapan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan kualitas produk serta pelayanan pelanggan telah menjadi *concern* utama bagi sebagian besar perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen Muslim.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap tema produk dan jasa mengalami peningkatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin ke sini perusahaan syariah semakin berupaya memenuhi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen Muslim.

### 3. Karyawan

Tema karyawan terdiri dari tiga belas pokok pengungkapan. Pada tahun 2009 dan 2010, pokok pengungkapan tunjangan dan remunerasi merupakan pokok pengungkapan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tunjangan dan remunerasi merupakan aspek paling penting bagi kesejahteraan karyawan sehingga perusahaan sudah seharusnya memberikan tunjangan dan remunerasi yang memadai kepada seluruh karyawannya.

Selain tunjangan dan remunerasi, pokok pengungkapan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja atau pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sorotan penting bagi perusahaan. Hasil *content analysis* menunjukkan bahwa terdapat 112 perusahaan di tahun 2009 dan 111 perusahaan di tahun 2010 yang melakukan pengungkapan terkait pendidikan dan pelatihan kerja atau pengembangan sumber daya manusia dalam laporannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan-karyawannya. Perusahaan biasanya memberikan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan secara personal dan kebutuhan perusahaan secara profesional. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap, produktifitas, dan karir. Di beberapa perusahaan biasanya juga terdapat kegiatan survei yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan. Kegiatan ini dilakukan agar pendidikan dan pelatihan tidak hanya berorientasi pada kuantitas tetapi juga berorientasi pada kualitas. Pokok pengungkapan ini tampak pada bentuk dan sistem pendidikan dan pelatihan, frekuensi pendidikan dan pelatihan, jumlah

karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan tersebut.

Selanjutnya, sekitar 45%-71% perusahaan melakukan pengungkapan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, dan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Pokok pengungkapan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja terlihat dari pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (LK3) perusahaan, contohnya *zero accident* program dan sertifikasi dari pihak independen seperti OHSAS 18001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sedangkan, pokok pengungkapan mengenai kesetaraan hak antara pria dan wanita terlihat dari komitmen perusahaan untuk menjunjung tinggi asas kewajaran dan kesetaraan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik yang merujuk pada Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan berbagai konvensi International Labour Organization (ILO).

Selanjutnya, terlihat bahwa perusahaan tidak terlalu menaruh perhatian penuh pada pengungkapan jam kerja, hari libur dan cuti, keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan, karyawan dari kelompok khusus, karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah, karyawan Muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa di saat Ramadhan, dan tempat ibadah yang memadai. Hanya sekitar 0%-37% perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap masing-masing pokok pengungkapan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hak-hak dasar karyawan Muslim yang belum diungkapkan secara baik dalam laporan perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan syariah di Indonesia belum melakukan pengungkapan aspek-aspek karyawan secara komprehensif. Padahal, perusahaan sudah seharusnya memenuhi kebutuhan spiritual karyawan dan mengungkapkannya dalam laporan perusahaan agar masyarakat Islam mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan sesuai dengan ajaran Islam (Hanifa, 2002 dan Othman dan Thani, 2010).

#### 4. Masyarakat

Pokok pengungkapan pada tema masyarakat terbagi menjadi sebelas bagian. Selaras dengan tema-tema lain, secara rata-rata, jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap pokok-pokok pengungkapan masyarakat mengalami peningkatan. Pokok pengungkapan yang paling banyak diungkapkan di tahun 2009 dan 2010 adalah pengungkapan terkait sedekah, donasi, atau sumbangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan syariah di Indonesia telah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya melakukan infak dan sedekah dengan tujuan untuk saling meringankan beban orang lain. Meskipun demikian, bentuk saling berbagi yang lain, seperti wakaf dan *qard hassan*, masih kurang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan. Informasi tersebut diperoleh dari hasil *content analysis* yang menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2010 tidak ada perusahaan yang mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan wakaf kepada pihak lain. Meskipun mengalami peningkatan, jumlah perusahaan yang mengungkapkan *qard hassan* hanya 7 dan 16 perusahaan di tahun 2009 dan 2010. Pokok pengungkapan *qard hassan* ditandai dengan pemberian pinjaman lunak kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Pokok pengungkapan lain yang cukup menonjol dalam laporan-laporan perusahaan adalah pengungkapan mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau kegiatan sosial, dan menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Perihal tersebut cukup menjadi sorotan utama setiap perusahaan karena kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, merupakan indikator yang sangat erat hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas masyarakat miskin diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diwajibkan bagi seluruh BUMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pokok pengungkapan lain yang tidak terlalu banyak dilakukan perusahaan terkait dengan sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa sekolah, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah, dan pembangunan tunas muda. Berdasarkan hasil *content analysis*, keempat program tersebut merupakan program yang tidak umum dimiliki seluruh perusahaan. Karakteristik keempat program tersebut sifatnya bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan dengan memperhitungkan terlebih dahulu tujuan, biaya, dan manfaat dari keempat program tersebut bagi perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepedulian perusahaan syariah di Indonesia terhadap masyarakat sudah tergolong baik. Penjelasan terkait biaya yang dikeluarkan, pihak yang menerima bantuan, dan bukti konkrit berupa foto juga telah diungkapkan secara komprehensif oleh sebagian besar perusahaan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pengungkapan aspek-aspek spesifik yang terkait dengan prinsip Islam, seperti wakaf dan *qard hassan*. Perusahaan syariah seharusnya melakukan pengungkapan secara detail dan lengkap tidak terkecuali terhadap aspek-aspek spesifik yang terkait dengan prinsip Islam agar para pemangku kepentingan Muslim mengetahui apakah tanggung jawab sosial yang diberikan perusahaan kepada masyarakat telah sesuai dengan prinsip Islam.

#### 5. Lingkungan

Tema lingkungan terbagi menjadi lima pokok pengungkapan. Dalam kurun waktu 2009 sampai 2010, jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap masing-masing pokok pengungkapan pada tema lingkungan mengalami peningkatan. Pokok pengungkapan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan adalah pokok pengungkapan konservasi lingkungan, yakni sebanyak 63 perusahaan di tahun 2009 dan 66 perusahaan di tahun 2010. Pokok pengungkapan tertinggi kedua dan ketiga adalah pokok pengungkapan kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global dan sistem manajemen lingkungan. Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global dapat diwujudkan dalam bentuk minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik terlihat dari kepemilikan sertifikasi ISO 14001

Sistem Manajemen Lingkungan. Ketiga pokok pengungkapan tersebut sebagian besar dilakukan oleh perusahaan di industri pertambangan, properti, dan perkebunan.

Selain itu, pokok pengungkapan selanjutnya yang hanya menjadi *concern* utama tidak lebih dari 25% perusahaan adalah pokok pengungkapan pendidikan mengenai lingkungan dan pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak banyaknya perusahaan yang melakukan dan mengungkapkan mengenai pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan adalah faktor biaya. Oleh karena itu, biasanya perusahaan yang telah melakukan dan mengungkapkan hal tersebut hanyalah perusahaan-perusahaan besar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan semakin meningkat seiring dengan semakin rusaknya alam semesta akibat aktivitas operasi berbagai perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan diwujudkan oleh perusahaan dalam komitmen untuk selalu menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hanya konsisten terjadi pada perusahaan besar. Dengan kata lain, masih banyak perusahaan kecil yang kurang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi pada perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan syariah. Perusahaan syariah seharusnya memiliki rasa kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan non-syariah karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai segala bentuk kerusakan yang ada di bumi.

#### 6. Tata Kelola Perusahaan

Tema tata kelola perusahaan mencakup delapan pokok pengungkapan. Di antara kelima tema sebelumnya, tema tata kelola perusahaan merupakan tema yang paling konsisten diungkapkan oleh perusahaan syariah di Indonesia. Pokok pengungkapan yang hampir dilakukan oleh seluruh perusahaan adalah pokok pengungkapan struktur kepemilikan saham dan profil Dewan Direksi. Kedua pokok pengungkapan tersebut merupakan pokok pengungkapan yang diwajibkan oleh BAPEPAM dan LK yang dituangkan dalam Peraturan BAPEPAM-LK

Nomor K.X.6. Meskipun telah diwajibkan, ada beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan mengenai struktur kepemilikan saham dan/atau profil Dewan Direksi dalam laporan tahunan mereka, yakni PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT. Hero Supermarket Tbk (HERO), PT. Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN), PT. Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI), dan PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC).

Di sisi lain, pokok pengungkapan yang tidak dilakukan sama sekali oleh perusahaan adalah pokok pengungkapan mengenai status kepatuhan terhadap syariah, pengungkapan ada atau tidaknya praktik menimbun bahan kebutuhan pokok, dan pengungkapan ada atau tidaknya praktik manipulasi harga. Status kepatuhan terhadap syariah secara implisit tercakup dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK tentang Daftar Efek Syariah yang diterbitkan setiap periode. Namun, meskipun Ketua BAPEPAM dan LK telah menyatakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, perusahaan-perusahaan tersebut tetap tidak melakukan pengungkapan terkait dengan status kepatuhan terhadap syariah dalam laporannya. Pokok pengungkapan terkait dengan ada atau tidaknya praktik menimbun bahan kebutuhan pokok dan praktik manipulasi harga tidak dilakukan oleh perusahaan diduga karena pengungkapan tersebut bisa dikatakan sebagai pengungkapan yang dapat merusak citra perusahaan.

Dari kedelapan pokok pengungkapan, hanya pokok pengungkapan ada atau tidaknya perkara hukum yang mengalami penurunan. Pada tahun 2009 terdapat 56 perusahaan dan pada tahun 2010 terdapat 50 perusahaan yang melakukan pengungkapan mengenai ada atau tidaknya perkara hukum. Penurunan ini dapat mengandung dua arti, yakni perkara hukum yang dihadapi perusahaan semakin berkurang tetapi tidak diungkapkan dalam laporan perusahaan atau perusahaan semakin enggan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya perkara hukum yang sedang dialami oleh perusahaan. Perusahaan menganggap tidak melakukan pengungkapan terhadap ada atau tidaknya perkara hukum mengindikasikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam perkara hukum sama sekali. Seperti yang kita ketahui bersama, ketidakterlibatan perusahaan dalam perkara hukum merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan di mata

publik. Selain itu, Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 hanya mewajibkan pengungkapan terkait dengan perkara hukum yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota Dewan Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Dengan kata lain, apabila perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, BAPEPAM-LK tidak mewajibkan perusahaan untuk mencantulkannya dalam laporan tahunan perusahaan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan perusahaan syariah terhadap tema tata kelola perusahaan masih didominasi dengan motivasi hanya untuk mematuhi pengungkapan wajib dari BAPEPAM dan LK. Padahal, sebagai perusahaan syariah, sudah seharusnya perusahaan melakukan pengungkapan tata kelola perusahaan berbasis syariah dengan seluas-luasnya. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi para investor Muslim dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2002, investor akan bersedia membeli saham dengan harga premium untuk perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan berkualitas tinggi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis keenam tema tersebut adalah perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia masih kurang komprehensif dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang spesifik terhadap aspek-aspek syariah. Hal tersebut memberikan dampak tersendiri bagi para investor Muslim dalam melakukan pertimbangan investasi. Daftar Efek Syariah merupakan panduan investasi bagi para investor yang ingin berinvestasi pada portofolio efek syariah. Daftar Efek Syariah hanya menyajikan informasi mengenai daftar perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah tanpa memberikan informasi lebih dalam mengenai apakah kegiatan operasi sehari-hari dan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Satu-satunya sumber informasi lain yang dapat diakses oleh para investor Muslim dalam rangka melakukan pertimbangan investasi adalah laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL perusahaan. Oleh karena itu, keterbatasan pengungkapan aspek-aspek spesifik syariah pada laporan-laporan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentu akan mempengaruhi pola investasi para investor Muslim.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya pengungkapan perusahaan syariah terhadap aspek-aspek spesifik syariah dalam laporan tahunan perusahaan. Pertama, masih sempitnya pemahaman mengenai konsep tanggung jawab sosial secara syariah di kalangan perusahaan syariah di Indonesia. Kedua, konsep indeks ISR belum terlalu berkembang di Indonesia. Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih lambat karena indeks ISR masih merupakan sesuatu yang baru dan tidak banyak diketahui oleh perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Selain itu, salah satu standar pengungkapan yang diterima secara umum dan paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, adalah Global Reporting Initiative (GRI) G3. Ketiga, pokok pengungkapan yang sebagian besar dipenuhi oleh perusahaan adalah pokok pengungkapan yang sifatnya memenuhi unsur kepatuhan. Kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan aspek-aspek spesifik syariah secara sukarela masih sangat minim. Terakhir, kurangnya tekanan dari para pemangku kepentingan, khususnya *standard setter*, dalam menggalakkan pengungkapan aspek-aspek spesifik syariah pada perusahaan syariah. Akibatnya, perusahaan syariah di Indonesia tidak terlalu lengkap dalam melakukan pengungkapan aspek-aspek spesifik syariah. Meskipun demikian, kurang lengkapnya pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah tidak dapat langsung disalahartikan bahwa perusahaan tersebut kurang atau tidak patuh terhadap prinsip syariah. Rendahnya skor indeks ISR pada suatu perusahaan syariah dapat diartikan dalam dua kondisi, yakni perusahaan telah melakukan pokok-pokok tanggung jawab sosial secara syariah tetapi tidak mengungkapkannya dalam laporan perusahaan atau perusahaan memang tidak melakukan pokok-pokok tanggung jawab sosial seperti yang ada dalam indeks ISR.

Secara keseluruhan, pokok pengungkapan indeks ISR masih sangat sederhana dan setiap pokok pengungkapannya masih mengandung makna yang cukup luas sehingga diperlukan batasan-batasan yang jelas agar masing-masing pokok pengungkapan dapat dievaluasi dengan baik. Untuk kedepannya, bukan tidak mungkin indeks ISR berkembang menjadi pedoman pengungkapan yang diterima secara umum bagi perusahaan-perusahaan syariah atau dikonvergensi ke

dalam indeks GRI sebagai satu bagian (section) khusus untuk pengungkapan aspek-aspek spesifik syariah (Fitria dan Hartanti, 2010).

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis selanjutnya terkait dengan hasil regresi model dalam penelitian ini. Keseluruhan rangkuman data penelitian yang digunakan dalam proses regresi tersebut disajikan dalam Lampiran 7. Sedangkan, hasil output statistik deskriptif dari Eviews 6.0 disajikan dalam Lampiran 8.

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Proporsi Variabel *Dummy***

	<b>Proporsi Dummy = 1</b>	<b>Proporsi Dummy = 0</b>
DSUKUK	5,98%	94,02%
DINDS	31,62%	68,38%

Sumber: Hasil olah penulis

Tabel 4.3 menggambarkan mengenai proporsi variabel penerbitan sukuk dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan jenis industri manufaktur dan non-manufaktur pada 117 perusahaan sampel dalam penelitian ini. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah tidak menjadikan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan utama mereka. Secara statistik, hanya sekitar 5,98% atau 6% perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah yang menerbitkan atau memiliki sukuk pada kurun waktu 2009-2010. Berdasarkan Fact Book IDX Mei 2011, ada sekitar 7,48% perusahaan yang melakukan penerbitan sukuk dari total keseluruhan perusahaan yang tercatat (listed) di BEI. Salah satu perusahaan yang menjadikan sukuk sebagai sumber pendanaan yang cukup penting adalah PT. Indosat Tbk (ISAT). Hal ini terbukti dengan salah satu penghargaan yang diraih oleh PT. Indosat Tbk (ISAT) dalam kategori Kinerja Perusahaan/GCG di tahun 2009, yakni sebagai Penerbit Sukuk Terbesar dari Karim Business Consulting. Tabel 4.3 juga menunjukkan mengenai proporsi perusahaan jenis industri manufaktur dan non-manufaktur. Sesuai dengan tabel tersebut, terdapat 31,62% perusahaan manufaktur dan 68,38% perusahaan non-manufaktur dalam sampel penelitian ini. Berdasarkan Fact Book IDX Mei 2011, perusahaan manufaktur dan non-manufaktur terdiri dari masing-masing 42,99% dan 57,01% dari total keseluruhan perusahaan yang tercatat (listed) di BEI. Dengan demikian, proporsi perusahaan

yang menerbitkan sukuk dan perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan manufaktur dan non-manufaktur dalam sampel penelitian ini kurang lebih telah sesuai kondisi pasar modal Indonesia yang sebenarnya.

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel ISR**

Tahun	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Dev.
2009	6	33	19	7
2010	7	36	20	7
Total	6	36	19	7

Sumber: Hasil olah penulis

Tabel 4.4 menggambarkan mengenai statistik deskriptif skor indeks ISR. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks ISR secara keseluruhan masih kurang dari setengah total pokok pengungkapan indeks ISR. Rata-rata skor indeks ISR secara keseluruhan adalah 19, sedangkan total indeks ISR berjumlah 46 pokok pengungkapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah pada 2009-2010 memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial masih cukup jauh dari kriteria-kriteria ISR. Skor indeks ISR terendah dimiliki oleh PT. Akbar Indomakmur Stimec Tbk (AIMS) pada tahun 2009 dengan skor 6. Skor indeks ISR tertinggi dimiliki oleh PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) pada tahun 2010 dengan skor 36. Secara keseluruhan, standar deviasi skor indeks ISR bernilai 7. Hal ini mengandung arti bahwa skor indeks ISR menyimpang kurang lebih sebesar 7 dari rata-rata skor indeks ISR secara keseluruhan.

**Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan yang Diukur dengan Total Aset**

Tahun	Minimum (Ribuan Rp)	Maksimum (Ribuan Rp)	Rata-rata (Ribuan Rp)	Std. Dev. (Ribuan Rp)
2009	6.930.528	97.814.460.000	4.423.756.116	13.287.964.100
2010	3.062.204	112.857.000.000	5.014.308.604	14.867.975.354
Total	3.062.204	112.857.000.000	4.719.032.360	14.072.939.517

Sumber: Hasil olah penulis

Tabel 4.5 menampilkan statistik deskriptif dari variabel bebas ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset. Secara keseluruhan, rata-rata total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah mencapai Rp 4.719.032.360.651 dan standar deviasinya sebesar Rp 14.072.939.517.302.

Dengan kata lain, nilai total aset memiliki variabilitas sebesar Rp 14.072.939.517.302 atau menyimpang kurang lebih Rp 14.072.939.517.302 dari rata-rata total aset secara keseluruhan. Tidak ada *cut-off* yang jelas untuk mengelompokkan suatu perusahaan sebagai perusahaan kecil, sedang, ataupun besar. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI relatif sangat beragam. Hal ini terlihat dari nilai total aset terendah sebesar Rp 3.062.204.781 dan nilai total aset tertinggi sebesar Rp 112.857.000.000.000. Ada dua kemungkinan mengapa total aset suatu perusahaan bernilai rendah, yakni *nature* bisnis dari perusahaan tersebut tidak membutuhkan kepemilikan aset yang sangat besar atau perusahaan tersebut masih baru.

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Profitabilitas yang Diukur dengan ROA**

Tahun	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Dev.
2009	-15,03%	43,52%	6,28%	8,75%
2010	-33,76%	52,78%	7,67%	10,63%
Total	-33,76%	52,78%	6,98%	9,74%

Sumber: Hasil olah penulis

Tabel 4.6 menyajikan tentang statistik deskriptif variabel bebas profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA. Nilai ROA terendah di tahun 2009 dimiliki oleh PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk (AKKU) dengan nilai -15,03%. Nilai ROA terendah di tahun 2010 dimiliki oleh PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) dengan nilai -33,76%. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya nilai ROA perusahaan tersebut adalah krisis global yang terjadi pada akhir tahun 2008. Di samping itu, ada pula perusahaan yang tidak terkena dampak krisis global sehingga dapat menghasilkan nilai ROA yang cukup baik. PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) membukukan ROA tertinggi di tahun 2009 dengan nilai sebesar 43,52%. Di tahun 2010, ROA tertinggi berhasil dicapai oleh PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dengan nilai sebesar 52,78%. Rata-rata ROA seluruh perusahaan sampel dalam kurun waktu 2009-2010 adalah 6,98%. Nilai tersebut mengandung arti bahwa rata-rata kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari setiap satu rupiah aset yang digunakan adalah sebesar 6,98%. Nilai standar deviasi ROA sebesar 9,74% menunjukkan bahwa

nilai ROA mengalami penyimpangan sebesar kurang lebih 9,74% dari rata-rata nilai ROA secara keseluruhan. ROA memberikan ukuran yang lebih baik dalam mengukur profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih.

**Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Umur Perusahaan**

Tahun	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Dev.
2009	1	28	11	7
2010	2	29	12	7
Total	1	29	11	7

Sumber: Hasil olah penulis

Tabel 4.7 merupakan gambaran mengenai statistik deskriptif pada variabel bebas umur perusahaan. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata umur perusahaan yang tercatat di BEI adalah 11 tahun dengan tingkat variabilitas sebesar 7 tahun. Dalam penelitian ini, umur perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI berada pada kisaran 1 sampai 29 tahun. Jumlah perusahaan dengan umur tertua dan termuda masing-masing sebanyak 1 perusahaan dan 12 perusahaan. Satu-satunya perusahaan dengan umur tertua yang tercatat di BEI dalam penelitian ini adalah PT. Merck Tbk (MERK).

### 4.3 Uji Normalitas Data

**Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Skewness Awal**

	N	Mean	Std. Dev.	Skewness		Rasio Skewness
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Std. Error	
ISR	234	19,3504	6,94159	0,379	0,159	2,38
SIZE	234	27,5878	1,84710	-0,146	0,159	-0,92
PROFIT	234	0,00637	0,09742	0,991	0,159	6,23
AGE	234	0,44850	6,86070	0,008	0,159	0,05

Sumber: Hasil olah penulis

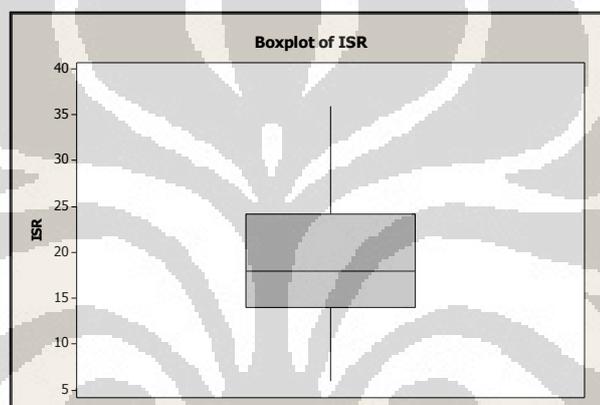
Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa distribusi data variabel ISR dan PROFIT tidak terdistribusi normal karena nilai rasio skewnessnya di atas +2. Data yang terdistribusi normal memiliki nilai rasio skewness antara -2 dan +2. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan pencilan (outlier).

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Skewness setelah Outlier Dikeluarkan

	N	Mean	Std. Dev.	Skewness		Rasio Skewness
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Std. Error	
ISR	227	19,2467	6,88405	0,400	0,162	2,48
SIZE	227	27,5521	1,85004	-0,122	0,162	-0,76
PROFIT	227	0,0622	0,07477	1,250	0,162	1,55
AGE	227	11,1586	6,66396	-0,075	0,162	-0,46

Sumber: Hasil olah penulis

Gambar 4.3 Boxplot Variabel ISR

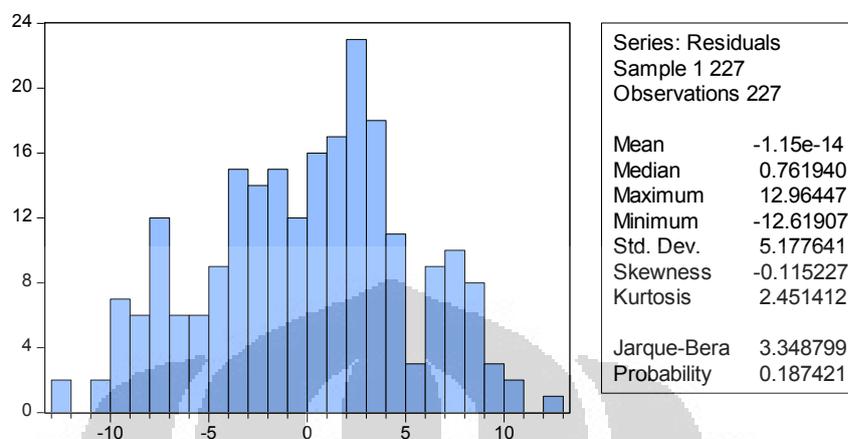


Sumber: Hasil output Minitab 16

Pencilan dikeluarkan dengan kriteria  $\pm 3$  kali standar deviasi sesuai dengan studi Siregar dan Utama (2005). Hasil output statistik deskriptif skewness sebelum dan setelah pencilan dikeluarkan dari SPSS 17 terdapat dalam Lampiran 9. Setelah pencilan dikeluarkan, dalam Tabel 4.9 tampak bahwa distribusi data variabel ISR tidak terdistribusi normal dengan nilai rasio skewness sebesar 2,48 meskipun dalam *boxplot* Gambar 4.3 tampak bahwa sebenarnya tidak ada pencilan dalam data tersebut. Secara logika, tidak akan ada pencilan pada data variabel ISR karena nilainya pasti berkisar antara 0 sampai 46. Apabila skor tersebut diubah dalam bentuk indeks maka nilainya akan berkisar antara 0 dan 1. Nachrowi dan Usman (2006) dan Gujarati dan Porter (2009) menyatakan bahwa normalitas bukan menjadi masalah yang terlalu berarti apabila ukuran sampelnya besar (lebih dari 30). Dalam Sekaran dan Bougie (2010) disebutkan bahwa *rule of thumb* dalam menentukan jumlah sampel berkisar 30-500 sampel.

## 4.4 Analisis Residual

**Gambar 4.4 Histogram Residual**



Sumber: Hasil output Eviews 6.0

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini tampak pada histogram yang berbentuk kurva menyerupai lonceng (bell-shaped). Selain itu, nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, yakni sebesar 0,187421. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini telah mengikuti distribusi normal.

## 4.5 Uji Asumsi Klasik

### 4.5.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mengandung arti bahwa adanya hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel pada model regresi. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi Pearson. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.10 Matriks Korelasi**

	ISR	DSUKUK	SIZE	PROFIT	DINDS	AGE
ISR	1	0,0656	0,6461	0,3962	-0,0477	0,0749
DSUKUK	0,0656	1	0,2018	-0,0806	-0,0027	0,1537
SIZE	0,6461	0,2018	1	0,4598	-0,0408	0,1216
PROFIT	0,3962	-0,0806	0,4598	1	0,2070	0,2148
DINDS	-0,0477	0,0027	-0,0408	0,2070	1	0,3940
AGE	0,0749	0,1537	0,1216	0,2148	0,3940	1

Sumber: Hasil olah penulis

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi semua variabel lebih kecil dari 0,8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi. Hasil output matriks korelasi dari Eviews 6.0 disajikan dalam Lampiran 10.

#### 4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi tidak memiliki varians yang sama. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Obs\*R-squared pada uji harvey.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Harvey**

<b>F-statistic</b>	1,240850	<b>Probabilitas</b>	0,2910
<b>Obs*R-squared</b>	6,198670	<b>Probabilitas</b>	0,2874

Sumber: Hasil olah penulis

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0,2874 yang berarti lebih besar daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual pada model regresi konstan (homoskedastisitas). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil output uji harvey dari Eviews 6.0 disajikan dalam Lampiran 11.

#### 4.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antarobservasi dalam satu variabel. Autokorelasi dapat terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik durbin watson.

**Tabel 4.12 Hasil Uji Durbin Watson**

Keterangan	Nilai
n	227
k'	5
dL (227,5)	1,7176
dU (227,5)	1,8199
4-dL	2,2824
4-dU	2,1801
d-stat	2,0019
n = banyaknya observasi k' = banyaknya variabel bebas dL = batas bawah tabel DW dU = batas atas tabel DW	

Sumber: Hasil olah penulis

**Gambar 4.5 Daerah Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson**

Sumber: Hasil olah penulis

Dalam Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai statistik durbin watson sebesar 2,0019. Selanjutnya, dalam Gambar 4.5 ditunjukkan bahwa nilai statistik durbin watson 2,0019 berada pada daerah tidak ada korelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi.

#### 4.6 Analisis Hasil Regresi

Hasil output regresi model dari Eviews 6.0 disajikan dalam Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14. Berikut adalah rangkuman hasil regresi model yang telah dilakukan:

Tabel 4.13 Hasil Regresi Model

Variabel	Hipotesa	Koefisien	t-Statistik	p-value
C		-41,9704	-6,9965	0,0000
DSUKUK	+	-1,2962	-0,9451	0,3456
SIZE	+	2,2053	9,7504	0,0000***
PROFIT	+	12,0083	2,1003	0,0368**
DINDS	+	-0,7617	-1,0042	0,3163
AGE	+	0,0019	0,0353	0,9718
N		227		
Adjusted R-squared		0,4215		
F-statistik		33,9352		
p-value (F-statistik)		0,0000		

\*\*\* signifikan 1%

\*\* signifikan 5%

Sumber: Hasil olah penulis

#### 4.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dinotasikan dengan *adjusted R<sup>2</sup>*. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sesuai dengan Tabel 4.13, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dalam penelitian ini sebesar 42,15%. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 42,15% mengandung arti bahwa variabel terikat skor indeks *Islamic Social Reporting* mampu dijelaskan 42,15% oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya 57,85% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

#### 4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji signifikan simultan atau Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Sesuai dengan Tabel 4.13, nilai statistik F dan nilai probabilitas statistik F dalam penelitian ini masing-masing sebesar 33,9352 dan 0,0000. Nilai probabilitas statistik F tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel skor indeks *Islamic Social Reporting*.

#### 4.6.3 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji signifikansi parsial atau Uji-t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis uji signifikansi parsial atau uji-t pada kelima variabel bebas:

##### 1. Sukuk

Dalam Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai statistik t dan nilai probabilitas statistik t (p-value) pada variabel bebas sukuk masing-masing sebesar -0,9451 dan 0,3456. Nilai probabilitas statistik t (p-value) lebih besar daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan tingkat keyakinan 95%. Dengan demikian,  $H_0$  tidak dapat ditolak yang berarti variabel bebas sukuk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil ini kontras dengan hasil penelitian Noegraheni (2005) dan Hossain et al. (2006) yang pernah membuktikan bahwa penerbitan obligasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claessens dan Fan (2003), terbukti bahwa perusahaan di Asia, termasuk Indonesia, merupakan perusahaan yang struktur kepemilikannya cenderung *family ownership concentration*. Struktur kepemilikan tersebut membawa dampak tersendiri terhadap karakteristik sumber pendanaan perusahaan. Karakteristik itu dapat terlihat dari kondisi pasar modal Indonesia. Dari sekian banyak Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Indonesia, hanya sekitar 400-450 perusahaan yang tercatat (listed) di BEI sampai tahun 2011. Kemudian, penawaran umum kepada publik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata hanya sekitar 20%-30%. Dengan kata lain, sumber pendanaan perusahaan Indonesia masih didominasi oleh dana selain dari penawaran umum kepada publik, seperti dana dari pihak keluarga dan pinjaman ke bank. Seperti kita ketahui bersama, perusahaan yang kepemilikan mayoritasnya terletak pada pihak keluarga dan pihak bank cenderung tidak terdorong untuk melakukan transparansi tinggi karena mereka memiliki akses langsung terhadap manajemen perusahaan dan tidak ada tuntutan dari pihak terkait. Pengungkapan yang seluas-luasnya hanya dibutuhkan oleh pemilik minoritas seperti publik atau masyarakat. Dengan

demikian, salah satu faktor yang menyebabkan penerbitan sukuk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah masih sangat minimnya perusahaan syariah di Indonesia yang menjadikan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan mereka sehingga kesadaran antara perusahaan yang menerbitkan sukuk dengan perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk relatif tidak ada perbedaan dalam hal melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

## 2. Ukuran Perusahaan

**Tabel 4.14 Hasil Interaksi Ukuran Perusahaan dengan Penerbitan Sukuk dan Jenis Industri**

DSUKUK	T	SIZE		DINDS	T	SIZE	
		Koef.	Prob.			Koef.	Prob.
0	1	2,1815	0,0000***	0	1	2,0943	0,0000***
0	2	2,2162	0,0000***	0	2	2,1241	0,0000***
1	1	2,2951	0,0000***	1	1	2,2243	0,0000***
1	2	2,3574	0,0000***	1	2	2,2467	0,0000***

\*\*\* signifikan 1%

Sumber: Hasil olah penulis

Tabel 4.13 menunjukkan nilai statistik t pada variabel bebas ukuran perusahaan sebesar 9,7504. Sedangkan, nilai probabilitas statistik t (p-value) pada variabel bebas ukuran perusahaan sebesar 0,0000. Nilai probabilitas statistik t (p-value) tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan tingkat keyakinan 95%. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak yang berarti secara keseluruhan variabel bebas ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Koefisien ukuran perusahaan yang bernilai positif 2,2053 mengandung arti bahwa setiap peningkatan 1% ukuran perusahaan atau total aset mampu meningkatkan skor indeks ISR sebesar 2,2053%. Tabel 4.14 menggambarkan hasil penelitian lebih lanjut atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Tabel tersebut menegaskan bahwa pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah terjadi pada perusahaan yang menerbitkan sukuk, perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk, perusahaan manufaktur, perusahaan non-manufaktur, dan tahun 2009-2010. Dengan kata lain, pengaruh ukuran

perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah sama untuk keempat kelompok variabel boneka (dummy) dan tahun penelitian 2009-2010.

Hasil ini bertolak belakang dengan hasil studi Ayu (2010), akan tetapi konsisten dengan studi Othman *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan *proxy* total aset mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan, Liu dan Anbumozhi (2008), Hossain dan Hammami (2009), Khodadadi *et al.* (2010), Adelopo (2011), dan Omar dan Simon (2011) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib ataupun sukarela. Perusahaan yang lebih besar sudah pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Secara spesifik, semakin besar ukuran perusahaan syariah, semakin bertambah pula para pemangku kepentingan Muslim yang ikut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan syariah yang lebih besar akan cenderung untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas dibandingkan perusahaan syariah yang lebih kecil.

### 3. Profitabilitas

**Tabel 4.15 Hasil Interaksi Profitabilitas dengan Penerbitan Sukuk dan Jenis Industri**

DSUKUK	T	PROFIT		DINDS	T	PROFIT	
		Koef.	Prob.			Koef.	Prob.
0	1	9,6047	0,2253	0	1	11,4406	0,2413
0	2	13,8188	0,0531*	0	2	16,5602	0,0637*
1	1	-34,2588	0,5313	1	1	11,6258	0,3494
1	2	-87,1014	0,1291	1	2	11,9947	0,2737

\* signifikan 10%

Sumber: Hasil olah penulis

Berdasarkan Tabel 4.13, secara keseluruhan variabel bebas profitabilitas mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan nilai statistik t sebesar 2,1003 dan nilai probabilitas statistik t (p-value) sebesar 0,0368. Nilai probabilitas statistik t (p-value) tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan tingkat

keyakinan 95% sehingga  $H_0$  ditolak. Koefisien profitabilitas yang bernilai positif 12,0083 mengandung arti bahwa setiap peningkatan 1% nilai ROA mampu meningkatkan skor indeks ISR sebesar 12,0083%. Secara spesifik, Tabel 4.15 menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah berbeda antara perusahaan yang menerbitkan sukuk, perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk, perusahaan manufaktur, non-manufaktur dan tahun 2009-2010. Dari tabel tersebut tampak bahwa pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* terjadi pada kelompok perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk tahun 2010 dan kelompok perusahaan non-manufaktur tahun 2010. Tahun 2010 dinilai oleh sebagian besar perusahaan sebagai tahun yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan tahun 2009 karena dampak dari krisis global sudah mulai teratasi dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil ini sesuai dengan temuan Othman *et al.* (2009) dan Ayu (2010) yang membuktikan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *proxy* nilai ROA mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan, Naser (1998), Owusu-Ansah (1998), Chau dan Gray (2002), Akhtaruddin (2005), Haniffa dan Cooke (2005), dan Omar dan Simon (2011) berhasil membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela. Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung mengungkapkan informasi secara lebih luas. Terminologi profitabilitas identik dengan kinerja ekonomi perusahaan. Semakin tinggi kinerja ekonomi perusahaan, nilai perusahaan pun akan relatif meningkat. Tingginya nilai perusahaan diyakini oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian investor, khususnya investor Muslim. Dengan demikian, perusahaan syariah yang semakin untung akan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas.

#### 4. Jenis Industri

Nilai statistik t dan nilai probabilitas statistik t (p-value) pada variabel bebas jenis industri yang ditunjukkan dalam Tabel 4.13 adalah sebesar -1,0042 dan 0,3163. Nilai probabilitas statistik t (p-value) lebih besar daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan tingkat keyakinan 95%. Dengan demikian,  $H_0$  tidak dapat ditolak yang berarti variabel bebas jenis industri mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil ini konsisten dengan hasil studi Othman *et al.* (2009) di Malaysia dan Ayu (2010) di Indonesia.

Menurut Othman *et al.* (2009), salah satu penyebabnya karena terdapat perbedaan praktik operasi dan pengungkapan yang signifikan di antara berbagai macam industri. Hal tersebut merefleksikan karakteristik yang unik pada masing-masing industri. Di Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai kewajiban praktik CSR mengikat perusahaan secara keseluruhan tanpa membedakan menurut industri tertentu. Dengan demikian, baik perusahaan syariah yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun non-manufaktur bisa dikatakan memiliki kesadaran yang relatif sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

#### 5. Umur Perusahaan

**Tabel 4.16 Hasil Interaksi Umur Perusahaan dengan Penerbitan Sukuk dan Jenis Industri**

DSUKUK	T	AGE		DINDS	T	AGE	
		Koefisien	Prob.			Koefisien	Prob.
0	1	-0,0058	0,9408	0	1	0,0671	0,4765
0	2	-0,0251	0,7465	0	2	0,0617	0,5221
1	1	-0,2501	0,5551	1	1	-0,2572	0,1233
1	2	-0,0315	0,9430	1	2	-0,2062	0,1882

Sumber: Hasil olah penulis

Terakhir, Tabel 4.13 menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas umur perusahaan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan nilai statistik t sebesar 0,0353 dan nilai probabilitas statistik t (p-value) sebesar 0,9718. Nilai probabilitas statistik t (p-value) tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%

dengan tingkat keyakinan 95% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak. Pengujian secara lebih spesifik dalam Tabel 4.16 menunjukkan bahwa umur perusahaan memang mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah pada seluruh kelompok perusahaan dan tahun dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini selaras dengan Marwata (2001), Sembiring (2003), dan Akhtaruddin (2005) yang menemukan bahwa umur perusahaan bukan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dan/atau sukarela. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih tua pasti melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas dibandingkan perusahaan dengan umur yang lebih muda. Dengan kata lain, perusahaan dengan umur yang lebih tua memungkinkan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih sempit dan perusahaan dengan umur yang lebih muda juga memungkinkan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas. Beberapa perusahaan dengan umur yang lebih tua melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih sempit karena perusahaan tersebut masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap tanggung jawab sosial secara syariah. Selain itu, perusahaan dengan umur yang lebih tua tidak dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang dianggap telah memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih memadai sehingga mampu melakukan pengungkapan lebih luas. Beberapa perusahaan dengan umur yang lebih muda kemungkinan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian risiko dan meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor Muslim, terhadap posisi mereka. Sembiring (2003) memaparkan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih tua tidak menjamin akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih luas meskipun pengalaman publikasi laporannya sudah lebih banyak. Hal tersebut didukung oleh Marwata (2001) yang berhasil membuktikan bahwa pengalaman publikasi laporan tidak berhubungan dengan kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perusahaan syariah dan isu tanggung jawab sosial perusahaan di berbagai negara mendorong kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya pelaksanaan, pelaporan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, tidak diragukan lagi apabila perusahaan dan para pemangku kepentingan di industri syariah membutuhkan standar pengungkapan yang dapat diterima secara umum dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

*Content analysis* dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa luas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang dilakukan oleh perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan sukuk memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah perusahaan syariah di Indonesia yang melakukan penerbitan sukuk masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah perusahaan yang menerbitkan sukuk dan perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk relatif tidak ada perbedaan.
2. Baik secara keseluruhan maupun secara spesifik pada empat kelompok variabel boneka (dummy) dan tahun penelitian, hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perusahaan syariah yang lebih besar memiliki kecenderungan untuk

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan syariah yang lebih kecil.

3. Secara keseluruhan, profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Secara spesifik, pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* terjadi pada kelompok perusahaan yang tidak menerbitkan sukuk tahun 2010 dan kelompok perusahaan non-manufaktur tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah berbeda untuk setiap kelompok perusahaan dan tahun penelitian.
4. Jenis industri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam pada perusahaan syariah manufaktur dan non-manufaktur relatif tidak ada perbedaan yang signifikan.
5. Baik secara keseluruhan maupun secara spesifik pada empat kelompok variabel boneka (dummy) dan tahun penelitian, umur perusahaan terbukti memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini mengandung arti bahwa perusahaan syariah dengan umur yang lebih tua tidak menjamin melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas. Sebaliknya, perusahaan syariah dengan umur yang lebih muda juga belum tentu melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih minim.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya untuk periode tahun 2009 dan 2010 karena data keuangan di tahun 2008 dikhawatirkan terganggu akibat krisis global.
2. Penggunaan indeks ISR yang pokok pengungkapannya merupakan hasil pengembangan dan penyesuaian penulis memungkinkan adanya pokok pengungkapan yang kurang dikembangkan secara komprehensif.

3. Subjektivitas penulis dalam memberikan nilai pada saat melakukan penilaian (skoring) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan indeks ISR.
4. Sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan penilaian pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah hanya terbatas pada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan/atau laporan PKBL perusahaan yang bersangkutan.

### 5.3 Saran

Penelitian lanjutan menjadi suatu hal penting dalam rangka mendukung perkembangan *islamic social reporting* di Indonesia. Berikut adalah saran penulis untuk penelitian selanjutnya:

1. Memperluas jumlah sampel dengan memperpanjang periode penelitian menjadi tiga tahun atau lebih. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan daftar perusahaan yang masuk dalam Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) yang baru diterbitkan oleh BEI pada 12 Mei 2011. Dengan menggunakan indeks tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih menggambarkan kondisi pasar modal syariah Indonesia yang sebenarnya.
2. Penelitian selanjutnya harus dapat mengembangkan pokok-pokok pengungkapan indeks ISR secara lebih komprehensif dengan tidak lupa memperhatikan karakteristik dan kondisi di Indonesia. Hal ini dilakukan agar indeks ISR yang digunakan dapat lebih merefleksikan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam dan dapat diterapkan di Indonesia.
3. Metode *content analysis* dalam penelitian ini sarat akan subjektivitas dalam melakukan interpretasi terhadap pokok pengungkapan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan metode *content analysis* lain yang dapat mengurangi tingkat subjektivitas terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan-laporannya.
4. Menambah sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan penilaian pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah, seperti *press release*, informasi yang diungkapkan di situs web perusahaan, dan sumber informasi lain.

Selain saran terkait dengan penelitian selanjutnya, saran untuk pihak-pihak terkait juga diperlukan dalam rangka turut mendukung perkembangan praktik CSR secara syariah dan indeks ISR di Indonesia. Berikut adalah saran untuk beberapa pihak terkait:

#### 1. BAPEPAM dan LK

Langkah BAPEPAM dan LK yang bekerja sama dengan DSN MUI dalam rangka untuk mengembangkan pasar modal syariah Indonesia dengan cara menerbitkan Daftar Efek Syariah sebenarnya sudah baik. Sayangnya, langkah tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi kepada perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, perusahaan tersebut kurang menyadari bahwa ia telah mendapat sorotan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Muslim. Ekspektasi para pemangku kepentingan Muslim terhadap daftar tersebut lebih dari hanya sekedar sebagai panduan investasi. Para pemangku kepentingan Muslim pasti berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah juga berperilaku layaknya suatu entitas Islam. *Expectation gap* ini sebaiknya dapat diminimalisir oleh BAPEPAM dan LK selaku regulator pasar modal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan BAPEPAM dan LK adalah dengan mengeluarkan suatu regulasi yang sifatnya memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk berperilaku sesuai dengan prinsip syariah, tidak terkecuali dalam hal tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki dorongan untuk melakukan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih komprehensif.

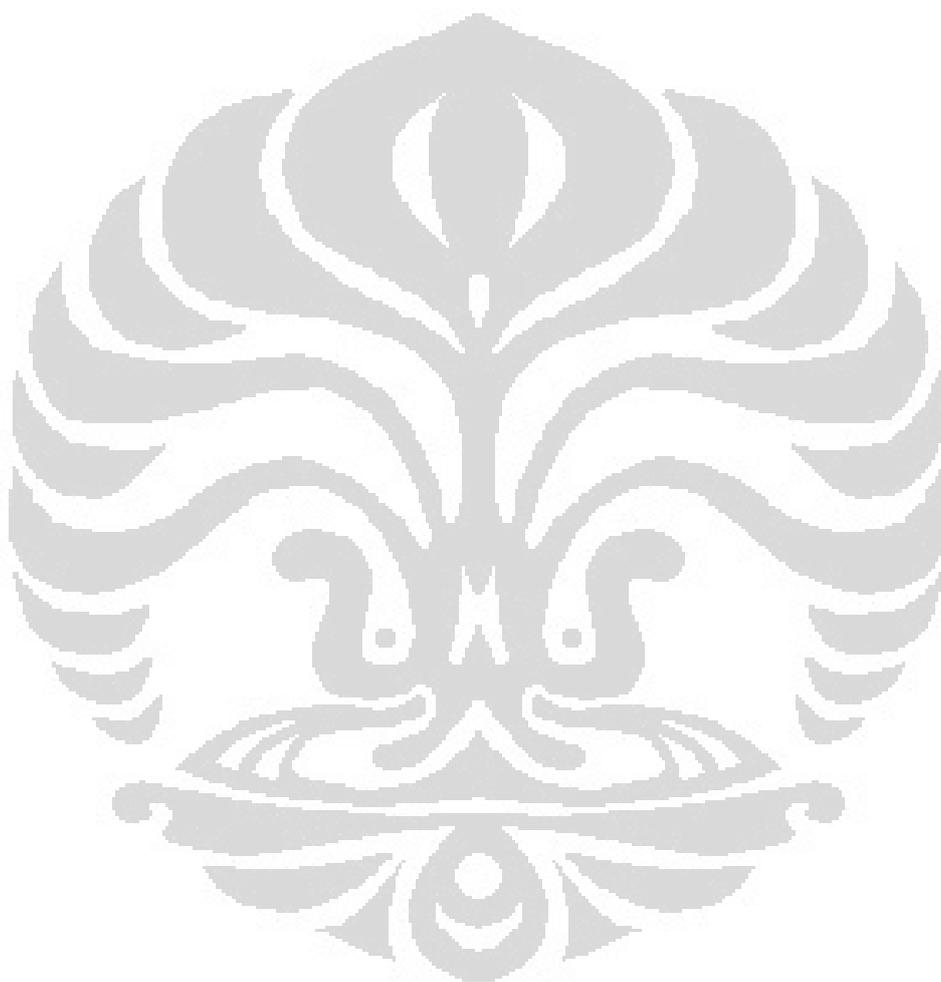
#### 2. Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah

Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan tanggung jawab sosial secara syariah sebagai konsekuensi dari kebijakan BAPEPAM dan LK terkait dengan dikeluarkan daftar nama perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kategori perusahaan yang memiliki efek atau sekuritas syariah.

#### 3. Akademisi

Pihak akademisi dalam dimensi Perguruan Tinggi seharusnya melakukan diskusi berkala dengan BAPEPAM-LK dan perwakilan dari perusahaan-

perusahaan yang *listed* di BEI terkait dengan hasil-hasil penelitian mahasiswa. Hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BAPEPAM-LK untuk menghasilkan aturan-aturan yang lebih komprehensif dalam rangka menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih efisien. Selain itu, hasil-hasil penelitian tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.



## DAFTAR REFERENSI

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20 , 556-567.
- Adelopo, I. (2011). Voluntary Disclosure Practices amongst Listed Companies in Nigeria. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* , 1-8.
- Akhtaruddin, M. (2005). Corporate Mandatory Disclosure Practices in Bangladesh. *The International Journal of Accounting*, 40 , 399-422.
- Aljifri, K. (2008). Annual Report Disclosure in a Developing Country: The Case of the UAE. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 24 , 93-100.
- Amurwani, A. (2006). Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity Capital. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia* . Yogyakarta.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Ayu, D. F. (2010). Analisis Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Jakarta Islamic Index (JII). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* . Depok.
- Barako, D. G. (2007). Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management*, 1 , 113-128.
- Bouten, L., Everaert, P., Liedekerke, L. V., Moor, L. D., & Christiaens, J. (2011). Corporate Social Responsibility Reporting: A Comprehensive Picture? *Accounting Forum*, 35 , 187-204.

- Chau, G. K., & Gray, S. J. (2002). Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore. *The International Journal of Accounting*, 37 , 247-265.
- Chau, G., & Gray, S. J. (2010). Family Ownership, Board Independence and Voluntary Disclosure; Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 19 , 93-109.
- Claessens, S., & Fan, J. P. (2003). Corporate Governance in Asia: A Survey. *International Review of Finance* , 1-42.
- Cooke, T. E. (1989). Disclosure in the Corporate Annual Report of Swedish Companies. *Accounting and Business Research*, 19 , 113-124.
- Cooke, T. E. (1992). The Impact of Size, stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations. *Accounting and Business Research*, 22 , 229-237.
- Dahawy, K. (2009). Company Characteristics and Disclosure Level: The Case of Egypt. *International Research Journal of Finance and Economics*, 34 , 194-208.
- Dusuki, A. W. (2008). What Does Islam Say about Corporate Social Responsibility? *Review of Islamic Economics*, 12 , 5-28.
- Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 11 , 130-141.
- Evans, T. G. (2003). *Accounting Theory: Contemporary Accounting Issues*. United States of America: Thomson.
- Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative

Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto* , 1-33.

Friedman, M. (1982). *Capitalism and Freedom*. USA: The University of Chicago.

Garriga, E., & Mele, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. *Journal of Business Ethics*, 53 , 51-71.

Global Reporting Initiative (GRI). (2006). *Sustainability Reporting Guidelines G3*. Amsterdam: Global Reporting Initiative.

Gond, J.-P., & Herrbach, O. (2006). Social Reporting as an Organisational Learning Tool? A Theoretical Framework. *Journal of Business Ethics*, 65 , 359-371.

Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1987). *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*. USA: Prentice-Hall.

Gray, S. J., Meek, G., & Roberts, C. (1995). Intenational Capital Market Pressures and Voluntary Annual Report Disclosures by US and UK Multinationals. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 6 , 43-68.

Grosser, K., & Moon, J. (2005). Gender Mainstreaming and Corporate Social Responsibility; Reporting Workplace Issues. *Journal of Business Ethics*, 62 , 327-340.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition*. Singapore: McGraw-Hill.

Hananto, D. (2009). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Tahunan. *Journal of Islamic Business and Economics*, 3 , 1-14.

Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, Corporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, 38 , 317-349.

- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24 , 391-430.
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1 , 128-146.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. (1992). *Accounting Theory*. USA: Irwin Professional Publishing.
- Ho, S. S., & Wong, K. S. (2001). A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing, & Taxation*, 10 , 139-156.
- Hossain, M., & Hammami, H. (2009). Voluntary Disclosure in the Annual Reports of an Emerging Country: The Case of Qatar. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 25 , 255-265.
- Hossain, M., Islam, K., & Andrew, J. (2006). Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Countries: Evidence from Bangladesh. *Asian Pacific Conference on International Accounting Issues* (hal. 1-22). Hawaii: Research Online University of Wollongong.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009, Juni 19). *ED PSAK 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan*. Dipetik September 28, 2011, dari Ikatan Akuntan Indonesia:  
[http://www.iaiglobal.or.id/prinsip\\_akuntansi/exposure.php?id=13](http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/exposure.php?id=13)
- Inchausti, B. G. (1997). The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulations on Information Disclosed by Spanish Firms. *The European Accounting Review*, 1 , 45-68.
- Irawan, B. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia* . Yogyakarta.

- Kamla, R. (2007). Critically Appreciating Social Accounting and Reporting in the Arab Middle East: A Postcolonial Perspective. *Advances in International Accounting*, 20 , 105-177.
- Karim, A. (1996). The Association between Corporate Attributes and the Extent of Corporate Disclosure. *Journal of Business Studies, University of Dhaka*, 17 , 89-124.
- Kasri, R. A. (2009). Corporate Governance: Conventional vs Islamic Perspective. *Working Paper Series SSRN* , 1-11.
- Khodadadi, V., Khazami, S., & Aflatooni, A. (2010). The Effect of Corporate Governance Structure on the Extent of Voluntary Disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal*, 3 , 151-164.
- Liu, X., & Anbumozhi, V. (2009). Determinants Factors of Corporate Environmental Information Disclosure: An Empirical Study of Chinese Listed Companies. *Journal of Cleaner Production*, 17 , 593-600.
- Lopes, P. T., & Rodrigues, L. L. (2007). Accounting fo Financial Instruments: An Analysis of the Determinants of Disclosure in the Portuguese Stock Exchange. *The International Journal of Accounting*, 42 , 25-56.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *ABACUS*, 42 , 266-289.
- Marwata. (2001). Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 4* , 155-173.
- Mathews, M. R. (1997). Twenty-five years of social and environmental accounting research: Is there a silver jubilee to celebrate? *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 10 , 481-531.

- Mayangsari, N. (2009). Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan dan Non Keuangan terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah .* Surakarta.
- Meek, G., Reberts, C., & Gray, S. (1995). Factors Influencing Voluntary Report Disclosure by U.S., U.K., and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 26 , 555-572.
- Muhammad, S. (2009). Ringkasan Fiqih Islam (Tauhid dan Keimanan).
- Munid, D. S. (2007). Corporate Governance in Islamic Perspective. *5th International Islamic Finance Conference: "Thirty Five Years On-The Future of Islamic Finance"*. Kuala Lumpur.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Naser, K. (1998). Comprehensiveness of Disclosure of Non-Financial Companies Listed on the Amman Financial Market. *International Journal of Commerce & Management*, 8 , 88-119.
- Nasucha, Y., Rohmadi, M., & Wahyudi, A. B. (2010). *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Noegraheni. (2005). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Publik Non Industri Keuangan di Bursa Efek Jakarta. *EQUITY*, 2 , 61-70.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktoviana, A. (2009). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di BEI tahun 2007. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* . Depok.

Omar, B., & Simon, j. (2011). Corporate Aggregate Disclosure Practices in Jordan. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 27 , 166-186.

Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 12 , 135-144.

Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 9 , 4-20.

Owusu-Ansah, S. (1998). The Impact of Corporate Attributes on the Extent of Mandatory Disclosure and Reporting by Listed Companies in Zimbabwe. *The International Journal of Accounting*, 33 , 605-631.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Riduwan, & Akdon. (2005). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Saeed, M. H. (2001, October 18). *Islamic Derivatives?* Dipetik November 10, 2011, dari [islamic-finance.com: http://www.islamic-finance.com/item103\\_f.htm](http://www.islamic-finance.com/item103_f.htm)

- Schipper, K. (1981). Discussion of Voluntary Corporate Disclosure: The Case of Interim Reporting. *Journal of Accounting Research*, 19 , 85-88.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business Fifth Edition*. UK: John Wiley & Sons.
- Sembiring, E. R. (2003). Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 6* , 249-259.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earning Management). *Simposium Nasional Akuntansi VII, Solo, 15-16 September 2005* , 475-490.
- Siswanto, D., & Agung, I. G. (2010). The Importance of the Effect of Exogenous Interaction Factors on Endogenous Variabels in Accounting Modeling. *3rd International Accounting Conference*. Bali.
- Siwar, C., & Hossain, M. T. (2009). An analysis of Islamic CSR concept and the opinions of Malaysian managers. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 20 , 290-298.
- Staden, C. v. (2000). The Value Added Statement: Bastion of Social Reporting or Dinosaur of Financial Reporting? 1-15.
- Steurer, R., Langer, M. E., Konrad, A., & Martinuzzi, A. (2005). Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations. *Journal of Business Ethics*, 61 , 263-281.
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek, & Sipil)* . Depok.

- Sulaiman, M. (2003). The Influence of Riba and Zakat on Islamic Accounting. *Indonesian Management and Accounting Review*, 2 , 149-167.
- Sulaiman, M., & Willet, R. (2003). Using the Hofstede-Gray framework to argue normatively for an extension of Islamic Corporate Reports. *Malaysian Accounting Review*, 2 , 1-35.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Utama, S. (2007). Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FEUI* . Jakarta.
- Waryanto. (2010). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro* . Semarang.
- Watts, P., & Holme, L. (1999). CSR: Meeting Changing Expectations. *WBCSD Publication* .
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.
- Zourarakis, N. S. (t.thn.). Voluntary Disclosure: Evidence from UK.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Islamic Social Reporting (ISR)

<b>Pokok-pokok Pengungkapan</b>		<b>Poin</b>	<b>Sumber Referensi</b>
<b>A</b>	<b>TEMA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI</b>		
1	Kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartatnti (2010)
2	Pengungkapan kegiatan yang mengandung <i>gharar</i> atau tidak ( <i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant, dan lain-lain</i> )	1	Haniffa (2002) Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
3	Zakat	1	Haniffa (2002) Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
5	Pernyataan nilai tambah perusahaan	1	Sulaiman dan Willet (2003) Othman <i>et al.</i> (2009)
<b>B</b>	<b>TEMA PRODUK DAN JASA</b>		
6	Produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
7	Kehalalan produk	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009)
8	Keamanan dan kualitas produk	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
9	Pelayanan pelanggan		Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
<b>C</b>	<b>TEMA KARYAWAN</b>		
10	Jam kerja	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
11	Hari libur dan cuti	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
12	Tunjangan	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)

13	Remunerasi	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
14	Pendidikan dan pelatihan kerja (pengembangan sumber daya manusia)	1	Haniffa (2002) Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
15	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	1	Haniffa (2002) Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
17	Kesehatan dan keselamatan kerja	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
18	Lingkungan kerja	1	Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
19	Karyawan dari kelompok khusus (cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
20	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
21	Karyawan Muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa di saat Ramadhan	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
22	Tempat ibadah yang memadai	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
<b>D</b>	<b>TEMA MASYARAKAT</b>		
23	Sedekah, donasi, atau sumbangan	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009)
24	Wakaf	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009)
25	<i>Qard Hassan</i>	1	Haniffa (2002) Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009)
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
29	Pembangunan tunas muda	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
32	Kegiatan amal atau kegiatan sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)	1	Othman <i>et al.</i> (2009)

33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan.	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
<b>E</b>	<b>TEMA LINGKUNGAN</b>		
34	Konservasi lingkungan	1	Haniffa (2002) Maali <i>et al.</i> (2006) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
35	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain)	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
36	Pendidikan mengenai lingkungan	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
37	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
38	Sistem manajemen lingkungan	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
<b>F</b>	<b>TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>		
39	Status kepatuhan terhadap syariah	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
40	Struktur kepemilikan saham	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
41	Profil Dewan Direksi	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
42	Pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
43	Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
44	Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
45	Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
46	Kebijakan anti korupsi ( <i>code of conduct</i> , <i>whistleblowing system</i> , dan lain-lain)	1	Othman <i>et al.</i> (2009)
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	

## Lampiran 2. Daftar Perusahaan Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan	Sektor	Sub Sektor
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	Pertanian	Perkebunan
2	ABBA	Abdi Bangsa Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Periklanan, Percetakan, dan Media
3	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Ritel
4	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
5	AIMS	Akbar Indomakmur Stimec Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
6	AKKU	Aneka Kemasan Utama Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Plastik dan Pengemasan
7	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perusahaan Investasi
8	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Keramik, Kaca, dan Porselen
9	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	Pertambangan	Pertambangan Logam dan Mineral
10	ASGR	Astra Graphia Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Komputer dan Jasa
11	ASIA	Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
12	ASII	Astra International Tbk	Aneka Industri	Otomotif dan Komponen
13	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
14	AUTO	Astra Otoparts Tbk	Aneka Industri	Otomotif dan Komponen
15	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
16	BAYU	Bayu Buana Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
17	BISI	Bisi International Tbk	Pertanian	Tanaman
18	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
19	BMTR	Global Mediacom Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perusahaan Investasi
20	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
21	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Logam dan sejenisnya
22	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	Pertambangan	Pertambangan Logam dan Mineral

23	CNKO	Central Korporindo Internasional Tbk	Pertambangan	Penggalian Tanah/Batu
24	COWL	Cowell Development Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
25	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Ritel
26	CTRA	Ciputra Development Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
27	CTRS	Ciputra Surya Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
28	DGIK	Duta Graha Indah Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
29	DILD	Intiland Development Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
30	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk	Industri Barang Konsumsi	Farmasi
31	EKAD	Ekadharma International Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Kimia
32	ELSA	Elnusa Tbk	Pertambangan	Produksi Minyak Mentah dan Gas Alam
33	EPMT	Enseval Putra Megatrading Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
34	ESTI	Ever Shine Textile Industry Tbk	Aneka Industri	Tekstil dan Garmen
35	FAST	Fast Food Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
36	FISH	FKS Multi Agro Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
37	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
38	GPRA	Perdana Gapura Prima Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
39	GZCO	Gozco Plantations Tbk	Pertanian	Perkebunan
40	HERO	Hero Supermarket Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Ritel
41	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	Transportasi
42	HOME	Hotel Mandarine Regency Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
43	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
44	IGAR	Kageo Igar Jaya Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Plastik dan Pengemasan
45	IIKP	Inti Agri Resources Tbk	Pertanian	Perikanan

46	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	Aneka Industri	Kabel
47	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Kimia
48	INPP	Indonesian Paradise Property Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
49	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Semen
50	ISAT	Indosat Tbk	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	Telekomunikasi
51	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
52	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Logam dan sejenisnya
53	JRPT	Jaya Real Property Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
54	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk	Industri Barang Konsumsi	Farmasi
55	KARK	Dayaindo Resources International Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
56	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk	Aneka Industri	Kabel
57	KBLM	Kabelindo Murni Tbk	Aneka Industri	Kabel
58	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk	Industri Barang Konsumsi	Peralatan Rumah Tangga
59	KICI	Kedaung Indah Can Tbk	Industri Barang Konsumsi	Peralatan Rumah Tangga
60	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk	Pertambangan	Pertambangan Batubara
61	KLBF	Kalbe Farma Tbk	Industri Barang Konsumsi	Farmasi
62	KOIN	Kokoh Inti Arebama Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Ritel
63	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
64	LION	Lion Metal Works Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Logam dan sejenisnya
65	LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk	Industri Barang Konsumsi	Peralatan Rumah Tangga
66	LMSH	Lion Mesh Prima Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Logam dan sejenisnya
67	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk	Aneka Industri	Otomotif dan Komponen
68	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
69	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	Pertanian	Perkebunan
70	MAMI	Mas Murni Indonesia Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata

71	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk	Aneka Industri	Otomotif dan Komponen
72	MERK	Merck Tbk	Industri Barang Konsumsi	Farmasi
73	MICE	Multi Indocitra Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
74	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Periklanan, Percetakan, dan Media
75	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Ritel
76	MRAT	Mustika Ratu Tbk	Industri Barang Konsumsi	Kosmetik dan Rumah Tangga
77	MTDL	Metrodata Electronics Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Komputer dan Jasa
78	MYOH	Myoh Technology Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Komputer dan Jasa
79	MYOR	Mayora Indah Tbk	Industri Barang Konsumsi	Makanan dan Minuman
80	PDES	Destinasi Tirta Nusantara Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
81	PGLI	Pembangunan Graha Lestari Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
82	PJAA	Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
83	PSAB	Pelita Sejahtera Abadi Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
84	PSKT	Pusako Tarinka Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, dan Pariwisata
85	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pertambangan	Pertambangan Batubara
86	PTSN	Sat Nusapersada Tbk	Aneka Industri	Elektronik
87	RAJA	Rukun Raharja Tbk	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	Transportasi
88	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Ritel
89	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
90	RDTX	Roda Vivatex Tbk	Aneka Industri	Tekstil dan Garmen
91	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	Aneka Industri	Tekstil dan Garmen
92	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
93	SCMA	Surya Citra Media Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Periklanan, Percetakan, dan Media
94	SGRO	Sampoerna Agro Tbk	Pertanian	Perkebunan
95	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Plastik dan Pengemasan
96	SIPD	Sierad Produce Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Makanan Hewan

97	SKLT	Sekar Laut Tbk	Industri Barang Konsumsi	Makanan dan Minuman
98	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
99	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Semen
100	SMRA	Summarecon Agung Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Properti dan Real Estate
101	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	Aneka Industri	Otomotif dan Komponen
102	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
103	SUGI	Sugi Samapersada Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
104	TCID	Mandom Indonesia Tbk	Industri Barang Konsumsi	Kosmetik dan Rumah Tangga
105	TINS	Timah (Persero) Tbk	Pertambangan	Pertambangan Logam dan Mineral
106	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	Telekomunikasi
107	TMPO	Tempo Inti Media Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Periklanan, Percetakan, dan Media
108	TOTL	Total Bangun Persada Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
109	TPIA	Tri Polyta Indonesia Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Kimia
110	TRIL	Triwira Insanlestari Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
111	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk	Industri Barang Konsumsi	Farmasi
112	ULTJ	Ultra Jaya Milk Tbk	Industri Barang Konsumsi	Makanan dan Minuman
113	UNTR	United Tractors Tbk	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Usaha Grosir
114	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	Industri Barang Konsumsi	Kosmetik dan Rumah Tangga
115	WIKA	Wijaya Karya Tbk	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
116	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk	Industri Dasar dan Kimia	Plastik dan Pengemasan
117	ZBRA	Zebra Nusantara Tbk	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	Transportasi

Lampiran 3. Skor Indeks ISR Tahun 2009

No.	Kode	A	1	2	3	4	5	TA	B	6	7	8	9	TB	C	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TC	D	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	TD	E	34	35	36	37	38	TE	F	39	40	41	42	43	44	45	46	TF	T
1	AALI	1	1	0	1	1	4	1	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	29						
2	ABBA	1	0	1	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	5	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	19					
3	ACES	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	18								
4	ADHI	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	26							
5	AIMS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6								
6	AKKU	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	20							
7	ALKA	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10									
8	AMFG	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	7	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	3	24							
9	ANTM	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	32									
10	ASGR	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	28								
11	ASIA	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	12							
12	ASII	1	1	1	0	0	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	0	0	1	1	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	28								
13	ASRI	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10								
14	AUTO	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	26							
15	BAPA	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	13					
16	BAYU	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12							
17	BISI	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	18								
18	BKDP	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	18							
19	BMTR	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	6	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	23								
20	BSDE	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	14								
21	BTON	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	16							
22	CITA	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	11								
23	CNKO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11							
24	COWL	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	18					
25	CSAP	1	1	0	1	1	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	12							
26	CTRA	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	31							
27	CTRS	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13							
28	DGIK	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	18							

29	DILD	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	17					
30	DVLA	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	1	1	4	20								
31	EKAD	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	2	12	
32	ELSA	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	4	30	
33	EPMT	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	7	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	26
34	ESTI	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	16
35	FAST	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	8	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	8	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	29	
36	FISH	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11			
37	GMTD	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	20					
38	GPRA	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	15				
39	GZCO	1	0	0	1	1	3	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	18		
40	HERO	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1	0	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1	2	14		
41	HITS	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	10	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	24						
42	HOME	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	3	23	
43	ICON	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	3	15
44	IGAR	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	15	
45	IKP	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	3	19
46	IKBI	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14				
47	INCI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	13		
48	INPP	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	20	
49	INTP	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	7	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	29		
50	ISAT	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	10	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	8	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	30
51	JKON	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	24	
52	JPRS	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	17	
53	JRPT	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	6	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	24	
54	KAEF	1	1	0	0	1	3	1	1	1	1	4	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	28		
55	KARK	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	2	20		
56	KBLI	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	20				
57	KBLM	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	17		
58	KDSI	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	3	17								
59	KICI	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11					
60	KKGI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	10		

61	KLBF	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	28
62	KOIN	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	13			
63	LAMI	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	11			
64	LION	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	14				
65	LMPI	1	0	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	14			
66	LMSH	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	2	15		
67	LPIN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	10				
68	LPKR	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	1	1	4	26				
69	LSIP	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	7	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	2	24				
70	MAMI	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	19					
71	MASA	1	1	0	0	0	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	18			
72	MERK	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	16			
73	MICE	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	16				
74	MNCN	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	23			
75	MPPA	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	15			
76	MRAT	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	3	25			
77	MTDL	1	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	19			
78	MYOH	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	15			
79	MYOR	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	15			
80	PDES	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9			
81	PGLI	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9			
82	PJAA	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	24				
83	PSAB	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14				
84	PSKT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9				
85	PTBA	1	1	0	0	0	2	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	8	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	31					
86	PTSN	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	0	3	23					
87	RAJA	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7					
88	RALS	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15					
89	RBMS	1	1	1	0	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14					
90	RDTX	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9					
91	RICY	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12					
92	SCBD	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	1	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	18				

93	SCMA	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	21	
94	SGRO	1	1	0	0	1	3	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	5	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	0	3	26
95	SIAP	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	17	
96	SIPD	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	20	
97	SKLT	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	9	
98	SMDM	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	14
99	SMGR	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	33		
100	SMRA	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	7	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	3	23	
101	SMSM	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	21	
102	SSIA	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	1	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	3	22	
103	SUGI	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	8	
104	TCID	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	12
105	TINS	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	7	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	5	0	1	1	1	0	0	1	1	5	33	
106	TLKM	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	8	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	1	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	1	5	29	
107	TMPO	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	18	
108	TOTL	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	21	
109	TPIA	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	0	0	2	26	
110	TRIL	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	11	
111	TSPC	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	13	
112	ULTJ	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	18
113	UNTR	1	1	1	0	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	7	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	33	
114	UNVR	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	8	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	28	
115	WIKA	1	0	1	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	7	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	28	
116	YPAS	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	3	15	
117	ZBRA	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	16
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>82</b>	<b>272</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>247</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>649</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>462</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>322</b>	<b>2179</b>

Lampiran 4. Skor Indeks ISR Tahun 2010

No.	Kode	A	1	2	3	4	5	TA	B	6	7	8	9	TB	C	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TC	D	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	TD	E	34	35	36	37	38	TE	F	39	40	41	42	43	44	45	46	TF	T
1	AALI	1	1	0	1	0	3	1	0	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	34			
2	ABBA	1	1	1	1	1	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	20			
3	ACES	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	19						
4	ADHI	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5	1	1	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	1	1	3	25					
5	AIMS	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7							
6	AKKU	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	1	0	3	19						
7	ALKA	1	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	3	16								
8	AMFG	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	2	28								
9	ANTM	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	35								
10	ASGR	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	29								
11	ASIA	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	12			
12	ASII	1	1	1	1	0	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	9	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	33								
13	ASRI	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	2	14								
14	AUTO	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	26								
15	BAPA	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	3	13						
16	BAYU	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13								
17	BISI	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	20						
18	BKDP	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	2	18										
19	BMTR	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	21							
20	BSDE	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	17										
21	BTON	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	3	16									
22	CITA	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	11									
23	CNKO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	11							
24	COWL	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	18						
25	CSAP	1	1	0	1	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	11								
26	CTRA	1	1	1	1	1	5	1	0	1	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	0	1	3	32										
27	CTRS	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14							
28	DGIK	1	1	0	1	1	4	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	19										
29	DILD	1	1	1	1	0	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	3	22										

30	DVLA	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	7	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	7	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	4	23				
31	EKAD	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	14
32	ELSA	1	1	1	1	1	5	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	35						
33	EPMT	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	6	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	26					
34	ESTI	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	3	18					
35	FAST	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	8	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	30					
36	FISH	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	15									
37	GMTD	1	0	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	22						
38	GPRA	1	0	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	17							
39	GZCO	1	1	0	1	1	4	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	19						
40	HERO	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	13							
41	HITS	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	10	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	27							
42	HOME	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	24					
43	ICON	1	0	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	3	16				
44	IGAR	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	17					
45	IKP	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	3	20					
46	IKBI	1	1	0	1	0	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	20						
47	INCI	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	14					
48	INPP	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	2	21						
49	INTP	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	29						
50	ISAT	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	11	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	33						
51	JKON	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	26				
52	JPRS	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	3	20					
53	JRPT	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	6	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	6	1	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	26				
54	KAEF	1	1	0	0	1	3	1	1	1	1	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	1	0	1	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	3	27					
55	KARK	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	2	22					
56	KBLI	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	20						
57	KBLM	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2	17					
58	KDSI	1	1	0	1	0	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	18						
59	KICI	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12						
60	KKGI	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	10						
61	KLBF	1	1	0	0	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	29						



94	SGRO	1	1	0	0	1	3	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	5	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	0	3	26
95	SIAP	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2	17	
96	SIPD	1	0	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	21	
97	SKLT	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	12	
98	SMDM	1	1	0	1	0	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	16
99	SMGR	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	34		
100	SMRA	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	6	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	3	23		
101	SMSM	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	4	22	
102	SSIA	1	1	0	1	0	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	1	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	3	21	
103	SUGI	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	8		
104	TCID	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	12	
105	TINS	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	5	0	1	1	1	0	0	1	1	5	36		
106	TLKM	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	1	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	1	5	31		
107	TMPO	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	18		
108	TOTL	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	8	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	2	27		
109	TPIA	1	1	0	1	1	4	1	1	1	1	4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	2	27	
110	TRIL	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	11		
111	TSPC	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14		
112	ULTJ	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	18	
113	UNTR	1	1	0	1	1	4	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	8	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	33		
114	UNVR	1	1	0	1	1	4	1	1	1	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	5	0	1	1	0	0	0	1	1	4	31		
115	WIKA	1	1	1	1	1	5	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	8	1	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	1	1	4	30	
116	YPAS	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	3	20		
117	ZBRA	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	14	
<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>366</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>263</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>114</b>	<b>117</b>	<b>111</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>670</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>494</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>60</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>315</b>	<b>2349</b>



## Lampiran 5. Rangkuman Skor Indeks ISR 2009-2010

No.	Kode	Pembiayaan dan Investasi		Produk dan Jasa		Karyawan		Masyarakat		Lingkungan		Tata Kelola Perusahaan		Total	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	AALI	4	3	2	3	6	10	8	9	5	5	4	4	29	34
2	ABBA	3	5	1	1	5	5	8	7	0	0	2	2	19	20
3	ACES	2	3	3	3	4	4	6	6	1	1	2	2	18	19
4	ADHI	4	4	2	2	7	7	5	5	4	4	4	3	26	25
5	AIMS	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	2	2	6	7
6	AKKU	3	3	2	2	7	6	2	2	3	3	3	3	20	19
7	ALKA	3	4	0	0	3	3	1	4	0	2	3	3	10	16
8	AMFG	2	4	2	3	7	7	6	8	4	4	3	2	24	28
9	ANTM	3	4	2	3	9	10	9	9	5	5	4	4	32	35
10	ASGR	3	3	3	3	7	7	6	7	5	5	4	4	28	29
11	ASIA	2	2	2	2	4	4	1	1	0	0	3	3	12	12
12	ASII	3	4	3	3	8	9	8	8	3	5	3	4	28	33
13	ASRI	3	3	2	2	3	4	0	1	0	2	2	2	10	14
14	AUTO	2	2	2	2	8	7	6	7	4	4	4	4	26	26
15	BAPA	2	2	1	1	5	5	1	1	1	1	3	3	13	13
16	BAYU	2	3	2	2	5	5	1	1	0	0	2	2	12	13
17	BISI	2	3	2	2	7	7	3	4	1	1	3	3	18	20
18	BKDP	3	3	2	2	6	6	2	2	3	3	2	2	18	18
19	BMTR	3	3	2	2	6	5	6	7	2	0	4	4	23	21
20	BSDE	2	2	2	3	4	4	1	3	3	3	2	2	14	17
21	BTON	1	2	2	2	5	5	2	2	2	2	4	3	16	16
22	CITA	2	2	0	0	5	4	1	2	1	1	2	2	11	11
23	CNKO	2	2	0	0	4	3	2	2	0	1	3	3	11	11

Universitas Indonesia

24	COWL	3	3	2	2	7	7	2	2	0	0	4	4	18	18
25	CSAP	4	3	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	12	11
26	CTRA	4	5	3	3	9	8	8	8	4	5	3	3	31	32
27	CTRS	1	2	2	2	5	5	2	2	0	0	3	3	13	14
28	DGIK	2	4	1	1	8	8	3	3	1	1	3	2	18	19
29	DILD	2	4	2	2	5	4	4	5	1	4	3	3	17	22
30	DVLA	2	2	2	2	7	7	4	7	1	1	4	4	20	23
31	EKAD	1	2	2	2	4	4	0	1	3	3	2	2	12	14
32	ELSA	3	5	3	3	8	10	8	9	4	4	4	4	30	35
33	EPMT	4	4	2	2	7	8	7	6	3	3	3	3	26	26
34	ESTI	2	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	16	18
35	FAST	3	4	3	3	8	8	8	7	4	4	3	4	29	30
36	FISH	1	4	2	2	4	4	2	2	0	0	2	3	11	15
37	GMTD	2	3	3	3	5	5	7	7	0	1	3	3	20	22
38	GPRA	2	3	2	3	5	5	3	3	1	1	2	2	15	17
39	GZCO	3	4	1	1	5	5	5	5	2	2	2	2	18	19
40	HERO	1	2	1	1	3	4	4	4	3	0	2	2	14	13
41	HITS	2	4	2	2	10	10	7	7	0	1	3	3	24	27
42	HOME	3	4	2	3	6	6	6	6	3	3	3	2	23	24
43	ICON	2	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	15	16
44	IGAR	2	4	2	2	6	6	0	0	3	3	2	2	15	17
45	IIKP	2	3	2	2	5	5	3	3	4	4	3	3	19	20
46	IKBI	1	3	2	2	6	6	3	5	0	2	2	2	14	20
47	INCI	1	2	1	1	4	4	2	2	3	3	2	2	13	14
48	INPP	2	4	2	2	5	6	5	5	2	2	4	2	20	21
49	INTP	3	4	2	3	7	6	8	7	5	5	4	4	29	29
50	ISAT	4	4	2	3	10	11	8	9	2	2	4	4	30	33

51	JKON	3	3	2	2	5	8	7	6	4	4	3	3	24	26
52	JPRS	2	4	2	2	5	6	2	2	3	3	3	3	17	20
53	JRPT	2	4	3	3	6	6	6	6	4	4	3	3	24	26
54	KAEF	3	3	4	4	7	7	6	6	4	4	4	3	28	27
55	KARK	3	4	3	3	6	6	4	5	2	2	2	2	20	22
56	KBLI	3	3	3	2	7	7	4	4	1	2	2	2	20	20
57	KBLM	2	2	2	2	5	5	3	3	3	3	2	2	17	17
58	KDSI	2	3	3	3	5	4	3	4	1	1	3	3	17	18
59	KICI	2	3	2	2	4	5	1	0	0	0	2	2	11	12
60	KKGI	1	2	0	0	4	4	2	2	1	1	2	1	10	10
61	KLBF	3	3	3	3	7	7	7	7	4	5	4	4	28	29
62	KOIN	1	2	2	2	7	6	2	2	1	1	0	0	13	13
63	LAMI	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	3	3	11	13
64	LION	2	4	3	3	4	4	2	2	1	1	2	2	14	16
65	LMPI	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	2	2	14	14
66	LMSH	1	3	3	3	5	5	2	2	2	2	2	2	15	17
67	LPIN	1	1	1	0	4	4	1	1	1	1	2	2	10	9
68	LPKR	3	4	3	3	8	8	5	5	3	4	4	4	26	28
69	LSIP	2	4	2	2	7	7	7	7	4	4	2	2	24	26
70	MAMI	2	2	2	2	7	7	4	5	1	1	3	2	19	19
71	MASA	2	2	3	3	6	6	3	5	2	2	2	2	18	20
72	MERK	2	4	2	2	6	6	3	7	1	2	2	2	16	23
73	MICE	2	4	2	2	5	5	5	4	0	0	2	2	16	17
74	MNCN	3	4	2	2	7	8	5	6	2	1	4	4	23	25
75	MPPA	3	4	2	3	3	3	4	4	0	0	3	2	15	16
76	MRAT	2	4	3	4	6	6	7	5	4	4	3	3	25	26
77	MTDL	3	4	1	1	6	7	6	6	0	0	3	3	19	21

78	MYOH	3	3	2	2	6	6	2	2	0	0	2	2	15	15
79	MYOR	2	3	2	2	3	4	5	3	0	0	3	3	15	15
80	PDES	1	2	2	2	4	4	0	0	0	0	2	2	9	10
81	PGLI	1	1	2	2	4	4	0	0	0	0	2	2	9	9
82	PJAA	1	3	3	3	6	8	6	7	4	4	4	4	24	29
83	PSAB	2	2	2	2	5	6	3	5	0	0	2	2	14	17
84	PSKT	0	0	2	2	4	4	1	0	0	0	2	2	9	8
85	PTBA	2	3	3	3	8	8	9	8	5	5	4	4	31	31
86	PTSN	2	4	2	2	8	7	3	3	5	5	3	3	23	24
87	RAJA	3	4	0	2	2	6	0	4	0	3	2	2	7	21
88	RALS	2	3	2	2	4	4	5	4	0	0	2	2	15	15
89	RBMS	4	5	2	2	3	4	3	3	0	0	2	2	14	16
90	RDTX	1	2	2	2	4	2	0	0	0	0	2	2	9	8
91	RICY	1	3	2	2	6	6	1	4	0	0	2	2	12	17
92	SCBD	2	2	3	3	3	3	4	2	3	1	3	3	18	14
93	SCMA	3	3	2	3	8	6	4	5	2	3	2	2	21	22
94	SGRO	3	3	2	2	8	8	5	5	5	5	3	3	26	26
95	SIAP	2	2	3	3	6	6	1	1	3	3	2	2	17	17
96	SIPD	2	3	3	3	6	6	5	5	1	1	3	3	20	21
97	SKLT	2	4	2	2	3	4	0	0	0	0	2	2	9	12
98	SMDM	1	3	3	3	4	4	4	4	0	0	2	2	14	16
99	SMGR	3	4	3	3	9	9	9	9	5	5	4	4	33	34
100	SMRA	3	4	3	3	5	5	7	6	2	2	3	3	23	23
101	SMSM	3	4	2	2	5	5	5	5	2	2	4	4	21	22
102	SSIA	4	3	2	2	6	6	5	5	2	2	3	3	22	21
103	SUGI	2	2	1	1	2	2	1	1	0	0	2	2	8	8
104	TCID	2	3	0	0	3	3	3	3	2	1	2	2	12	12

105	TINS	3	4	3	3	7	9	10	10	5	5	5	5	33	36
106	TLKM	4	4	3	3	8	9	7	8	2	2	5	5	29	31
107	TMPO	2	2	2	2	5	7	5	4	1	0	3	3	18	18
108	TOTL	4	4	3	3	6	8	3	6	3	4	2	2	21	27
109	TPIA	3	4	3	4	6	6	7	7	5	4	2	2	26	27
110	TRIL	1	1	2	2	5	5	1	1	0	0	2	2	11	11
111	TSPC	2	3	2	2	4	4	4	4	0	0	1	1	13	14
112	ULTJ	3	3	2	2	5	5	5	5	1	1	2	2	18	18
113	UNTR	4	4	3	3	7	8	10	9	5	5	4	4	33	33
114	UNVR	3	4	3	4	8	7	7	7	4	5	3	4	28	31
115	WIKA	4	5	2	3	7	6	7	8	4	4	4	4	28	30
116	YPAS	2	3	2	2	5	6	1	4	2	2	3	3	15	20
117	ZBRA	2	1	3	3	7	6	2	2	0	0	2	2	16	14
Total		272	366	247	263	649	670	462	494	227	241	322	315	2179	2349

### Lampiran 6. Rangkuman Jumlah Perusahaan per Pokok Pengungkapan

	Pokok-pokok Pengungkapan	Jumlah Perusahaan	
		2009	2010
<b>A</b>	<b>TEMA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI</b>		
1	Kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	115	115
2	Pengungkapan kegiatan yang mengandung <i>gharar</i> atau tidak ( <i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage</i> baik <i>spot</i> maupun <i>forward, short selling, pure swap, warrant</i> , dan lain-lain)	54	80
3	Zakat	5	8
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	16	82
5	Pernyataan nilai tambah perusahaan	82	81
<b>B</b>	<b>TEMA PRODUK DAN JASA</b>		
6	Produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan	39	50
7	Kehalalan produk	2	5
8	Keamanan dan kualitas produk	101	103
9	Pelayanan pelanggan	105	105
<b>C</b>	<b>TEMA KARYAWAN</b>		
10	Jam kerja	4	6
11	Hari libur dan cuti	7	13
12	Tunjangan	115	114
13	Remunerasi	117	117
14	Pendidikan dan pelatihan kerja (pengembangan sumber daya manusia)	112	111
15	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	53	58
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan	16	19
17	Kesehatan dan keselamatan kerja	82	83
18	Lingkungan kerja	58	59
19	Karyawan dari kelompok khusus (cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	1	0
20	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah	7	9
21	Karyawan Muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa di saat Ramadhan	34	38
22	Tempat ibadah yang memadai	43	43
<b>D</b>	<b>TEMA MASYARAKAT</b>		
23	Sedekah, donasi, atau sumbangan	87	88
24	Wakaf	0	0
25	<i>Qard Hassan</i>	7	16
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	12	12
27	Pemberian beasiswa sekolah	36	38

28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	22	25
29	Pembangunan tunas muda	28	36
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	66	66
31	Kepedulian terhadap anak-anak	57	60
32	Kegiatan amal atau kegiatan sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)	70	73
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan.	77	80
<b>E</b>	<b>TEMA LINGKUNGAN</b>		
34	Konservasi lingkungan	63	66
35	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain)	53	58
36	Pendidikan mengenai lingkungan	25	28
37	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan	27	29
38	Sistem manajemen lingkungan	59	60
<b>F</b>	<b>TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>		
39	Status kepatuhan terhadap syariah	0	0
40	Struktur kepemilikan saham	115	115
41	Profil Dewan Direksi	114	113
42	Pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak	2	2
43	Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak	0	0
44	Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak	0	0
45	Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak	56	50
46	Kebijakan anti korupsi ( <i>code of conduct</i> , <i>whistleblowing system</i> , dan lain-lain)	35	35

## Lampiran 7. Rangkuman Data Penelitian

No.	Kode	Tahun	Skor ISR	Total Aset	Laba Bersih	Rata-rata Total Aset	Sukuk	lnTotalAset	ROA	Tipe Industri	Umur
1	AALI	2009	29	Rp 7.571.399.000.000	Rp 1.660.649.000.000	Rp 7.045.595.000.000	0	29,6554	0,2357	0	12
		2010	34	Rp 8.791.799.000.000	Rp 2.016.780.000.000	Rp 8.181.599.000.000	0	29,8048	0,2465	0	13
2	ABBA	2009	19	Rp 229.920.145.606	Rp 503.819.731	Rp 228.089.655.101	0	26,1610	0,0022	0	7
		2010	20	Rp 399.906.465.038	Rp 2.454.393.297	Rp 314.913.305.322	0	26,7145	0,0078	0	8
3	ACES	2009	18	Rp 970.555.943.386	Rp 154.442.645.114	Rp 880.416.237.092	0	27,6011	0,1754	0	2
		2010	19	Rp 1.191.333.479.259	Rp 177.851.336.490	Rp 1.080.944.711.323	1	27,8061	0,1645	0	3
4	ADHI	2009	26	Rp 5.629.454.335.393	Rp 165.529.733.252	Rp 5.377.411.438.457	1	29,3590	0,0308	0	5
		2010	25	Rp 4.927.696.202.275	Rp 189.483.638.611	Rp 5.278.575.268.834	0	29,2259	0,0359	0	6
5	AIMS	2009	6	Rp 182.575.880.288	Rp 654.525.005	Rp 131.936.635.621	0	25,9304	0,0050	0	8
		2010	7	Rp 146.194.762.072	Rp 459.487.847	Rp 164.385.321.180	0	25,7082	0,0028	0	9
6	AKKU	2009	20	Rp 32.495.688.928	Rp (5.664.063.927)	Rp 37.676.985.430	0	24,2044	-0,1503	0	5
		2010	19	Rp 28.379.813.055	Rp (4.683.276.255)	Rp 30.437.750.992	0	24,0689	-0,1539	0	6
7	ALKA	2009	10	Rp 134.685.876.000	Rp 7.318.324.000	Rp 146.655.154.000	0	25,6262	0,0499	0	19
		2010	16	Rp 159.196.107.000	Rp 4.155.860.000	Rp 146.940.991.500	0	25,7934	0,0283	0	20
8	AMFG	2009	24	Rp 1.972.397.000.000	Rp 67.293.000.000	Rp 1.985.691.500.000	0	28,3103	0,0339	1	14
		2010	28	Rp 2.372.657.000.000	Rp 330.973.000.000	Rp 2.172.527.000.000	0	28,4950	0,1523	1	15
9	ANTM	2009	32	Rp 9.939.996.438.000	Rp 604.307.088.000	Rp 10.092.518.609.000	0	29,9276	0,0599	0	12
		2010	35	Rp 12.310.732.099.000	Rp 1.683.399.992.000	Rp 11.125.364.268.500	0	30,1415	0,1513	0	13
10	ASGR	2009	28	Rp 774.856.830.143	Rp 66.947.426.012	Rp 807.955.515.999	0	27,3759	0,0829	0	20
		2010	29	Rp 982.479.682.109	Rp 118.414.721.270	Rp 878.668.256.126	0	27,6133	0,1348	0	21
11	ASIA	2009	12	Rp 74.906.215.884	Rp 5.767.608.381	Rp 69.150.094.850	0	25,0395	0,0834	0	15
		2010	12	Rp 65.265.612.292	Rp 3.475.727.680	Rp 70.085.914.088	0	24,9017	0,0496	0	16
12	ASII	2009	28	Rp 88.938.000.000.000	Rp 10.040.000.000.000	Rp 84.839.000.000.000	0	32,1190	0,1183	1	19
		2010	33	Rp 112.857.000.000.000	Rp 14.366.000.000.000	Rp 100.897.500.000.000	0	32,3571	0,1424	1	20

13	ASRI	2009	10	Rp 3.559.964.928.251	Rp 94.020.549.049	Rp 3.308.250.834.446	0	28,9008	0,0284	0	2
		2010	14	Rp 4.587.986.472.840	Rp 290.483.812.132	Rp 4.073.975.700.546	0	29,1545	0,0713	0	3
14	AUTO	2009	26	Rp 4.644.939.000.000	Rp 786.265.000.000	Rp 4.313.127.500.000	0	29,1668	0,1823	1	11
		2010	26	Rp 5.585.852.000.000	Rp 1.141.179.000.000	Rp 5.115.395.500.000	0	29,3513	0,2231	1	12
15	BAPA	2009	13	Rp 134.883.970.713	Rp 8.982.142.892	Rp 131.048.475.615	0	25,6277	0,0685	0	1
		2010	13	Rp 136.358.827.789	Rp 12.680.878.136	Rp 135.621.399.251	0	25,6386	0,0935	0	2
16	BAYU	2009	12	Rp 204.325.931.523	Rp 411.891.929	Rp 208.758.652.706	0	26,0430	0,0020	0	20
		2010	13	Rp 218.480.845.229	Rp 7.462.207.697	Rp 211.403.388.376	0	26,1100	0,0353	0	21
17	BISI	2009	18	Rp 1.412.075.000.000	Rp 75.780.000.000	Rp 1.537.526.000.000	0	27,9761	0,0493	0	2
		2010	20	Rp 1.363.227.000.000	Rp 143.489.000.000	Rp 1.387.676.000.000	0	27,9409	0,1034	0	3
18	BKDP	2009	18	Rp 861.240.867.371	Rp (7.163.405.361)	Rp 893.461.963.475	0	27,4816	-0,0080	0	2
		2010	18	Rp 1.017.544.318.048	Rp 14.712.409.166	Rp 939.392.592.890	0	27,6484	0,0157	0	3
19	BMTR	2009	23	Rp 13.481.189.000.000	Rp 157.208.000.000	Rp 13.600.777.500.000	0	30,2323	0,0116	0	14
		2010	21	Rp 12.959.942.000.000	Rp 578.865.000.000	Rp 13.220.565.500.000	0	30,1929	0,0438	0	15
20	BSDE	2009	14	Rp 9.334.997.312.907	Rp 308.738.334.467	Rp 6.858.041.314.954	0	29,8648	0,0450	0	1
		2010	17	Rp 11.694.747.901.551	Rp 394.403.204.755	Rp 10.514.872.607.229	0	30,0902	0,0375	0	2
21	BTON	2009	16	Rp 69.783.877.404	Rp 9.388.156.670	Rp 70.146.345.991	0	24,9687	0,1338	1	8
		2010	16	Rp 89.824.014.717	Rp 8.393.401.472	Rp 79.803.946.061	0	25,2211	0,1052	1	9
22	CITA	2009	11	Rp 745.410.457.582	Rp 41.312.261.569	Rp 734.105.504.757	0	27,3372	0,0563	0	7
		2010	11	Rp 1.425.400.480.785	Rp 99.704.586.889	Rp 1.085.405.469.184	0	27,9855	0,0919	0	8
23	CNKO	2009	11	Rp 878.469.737.000	Rp 2.752.003.000	Rp 825.938.084.500	0	27,5014	0,0033	0	8
		2010	11	Rp 1.212.738.774.000	Rp 70.725.996.000	Rp 1.045.604.255.500	0	27,8239	0,0676	0	9
24	COWL	2009	18	Rp 207.505.008.227	Rp 13.691.009.424	Rp 207.476.199.255	0	26,0584	0,0660	0	2
		2010	18	Rp 266.939.286.532	Rp 8.400.943.653	Rp 237.222.147.380	0	26,3103	0,0354	0	3
25	CSAP	2009	12	Rp 1.385.588.393.000	Rp 11.253.751.000	Rp 1.306.116.625.000	0	27,9571	0,0086	0	2
		2010	11	Rp 1.704.910.741.000	Rp 33.027.028.000	Rp 1.545.249.567.000	0	28,1645	0,0214	0	3
26	CTRA	2009	31	Rp 8.553.946.343.429	Rp 136.327.668.227	Rp 8.331.194.852.152	0	29,7774	0,0164	0	15

		2010	32	Rp 9.378.342.136.927	Rp 257.959.577.688	Rp 8.966.144.240.178	0	29,8694	0,0288	0	16
27	CTRS	2009	13	Rp 2.268.629.009.246	Rp 57.118.544.162	Rp 2.213.924.662.065	0	28,4502	0,0258	0	10
		2010	14	Rp 2.609.229.793.505	Rp 87.178.005.009	Rp 2.438.929.401.376	0	28,5901	0,0357	0	11
28	DGIK	2009	18	Rp 1.494.791.050.488	Rp 66.743.636.440	Rp 1.436.485.269.906	0	28,0330	0,0465	0	2
		2010	19	Rp 1.959.238.097.462	Rp 70.542.159.376	Rp 1.727.014.573.975	0	28,3036	0,0408	0	3
29	DILD	2009	17	Rp 2.140.126.674.921	Rp 25.612.283.715	Rp 2.125.639.558.313	0	28,3919	0,0120	0	18
		2010	22	Rp 4.599.239.260.454	Rp 350.491.922.129	Rp 3.369.682.967.688	0	29,1569	0,1040	0	19
30	DVLA	2009	20	Rp 783.613.064.000	Rp 72.272.233.000	Rp 710.636.954.000	0	27,3872	0,1017	1	15
		2010	23	Rp 854.109.991.000	Rp 110.880.522.000	Rp 818.861.527.500	0	27,4733	0,1354	1	16
31	EKAD	2009	12	Rp 165.122.502.774	Rp 16.443.338.453	Rp 152.943.132.171	0	25,8300	0,1075	1	19
		2010	14	Rp 204.470.482.995	Rp 24.485.164.898	Rp 184.796.492.885	0	26,0437	0,1325	1	20
32	ELSA	2009	30	Rp 4.207.629.000.000	Rp 466.233.000.000	Rp 3.762.722.500.000	0	29,0679	0,1239	0	1
		2010	35	Rp 3.678.566.000.000	Rp 63.906.000.000	Rp 3.943.097.500.000	0	28,9335	0,0162	0	2
33	EPMT	2009	26	Rp 2.986.182.416.539	Rp 329.067.612.860	Rp 2.749.761.032.824	0	28,7250	0,1197	0	15
		2010	26	Rp 3.254.770.280.282	Rp 257.415.018.996	Rp 3.120.476.348.411	0	28,8111	0,0825	0	16
34	ESTI	2009	16	Rp 518.857.361.261	Rp 7.686.659.423	Rp 524.552.509.991	0	26,9749	0,0147	1	17
		2010	18	Rp 583.252.944.571	Rp 1.487.272.540	Rp 551.055.152.916	0	27,0919	0,0027	1	18
35	FAST	2009	29	Rp 1.041.408.834.000	Rp 181.996.584.000	Rp 913.083.824.500	0	27,6716	0,1993	0	16
		2010	30	Rp 1.236.043.044.000	Rp 199.597.177.000	Rp 1.138.725.939.000	0	27,8429	0,1753	0	17
36	FISH	2009	11	Rp 557.385.176.818	Rp 32.580.693.547	Rp 485.373.152.421	0	27,0465	0,0671	0	7
		2010	15	Rp 1.101.332.993.367	Rp 55.586.659.742	Rp 829.359.085.093	0	27,7275	0,0670	0	8
37	GMDT	2009	20	Rp 305.635.686.223	Rp 13.485.473.435	Rp 296.338.059.323	0	26,4457	0,0455	0	9
		2010	22	Rp 358.990.245.785	Rp 25.572.486.921	Rp 332.312.966.004	0	26,6066	0,0770	0	10
38	GPRA	2009	15	Rp 1.323.187.899.971	Rp 31.296.373.054	Rp 1.366.142.787.439	0	27,9111	0,0229	0	2
		2010	17	Rp 1.184.685.940.567	Rp 35.172.644.425	Rp 1.253.936.920.269	0	27,8005	0,0280	0	3
39	GZCO	2009	18	Rp 1.993.045.927.634	Rp 204.385.493.454	Rp 1.710.828.131.248	0	28,3207	0,1195	0	1
		2010	19	Rp 2.095.795.869.754	Rp 160.797.203.284	Rp 2.044.420.898.694	0	28,3710	0,0787	0	2

40	HERO	2009	14	Rp 2.830.288.000.000	Rp 171.808.000.000	Rp 2.478.990.000.000	0	28,6714	0,0693	0	20
		2010	13	Rp 3.125.368.000.000	Rp 221.909.000.000	Rp 2.977.828.000.000	0	28,7706	0,0745	0	21
41	HITS	2009	24	Rp 2.164.500.729.000	Rp 1.311.336.000	Rp 2.566.101.526.500	0	28,4032	0,0005	0	12
		2010	27	Rp 1.759.229.042.000	Rp (662.275.081.000)	Rp 1.961.864.885.500	0	28,1959	-0,3376	0	13
42	HOME	2009	23	Rp 183.523.488.350	Rp 1.348.013.250	Rp 189.482.954.326	0	25,9356	0,0071	0	1
		2010	24	Rp 186.995.790.431	Rp 2.669.261.470	Rp 185.259.639.391	0	25,9544	0,0144	0	2
43	ICON	2009	15	Rp 12.158.564.323	Rp (938.396.894)	Rp 13.122.540.216	0	23,2213	-0,0715	0	4
		2010	16	Rp 11.379.513.670	Rp (1.796.063.974)	Rp 11.769.038.997	0	23,1551	-0,1526	0	5
44	IGAR	2009	15	Rp 317.808.701.451	Rp 24.740.866.566	Rp 311.795.667.555	0	26,4847	0,0793	0	19
		2010	17	Rp 347.473.064.455	Rp 32.151.888.045	Rp 332.640.882.953	0	26,5740	0,0967	0	20
45	IIKP	2009	19	Rp 413.129.703.289	Rp (9.050.159.296)	Rp 415.828.648.586	0	26,7470	-0,0218	0	7
		2010	20	Rp 405.623.886.312	Rp (3.961.543.377)	Rp 409.376.794.801	0	26,7287	-0,0097	0	8
46	IKBI	2009	14	Rp 561.948.871.968	Rp 28.718.699.277	Rp 599.178.693.408	0	27,0547	0,0479	1	18
		2010	20	Rp 600.820.329.651	Rp 4.600.387.412	Rp 581.384.600.810	0	27,1216	0,0079	1	19
47	INCI	2009	13	Rp 157.569.330.098	Rp (8.680.047.884)	Rp 166.480.103.542	0	25,7831	-0,0521	1	19
		2010	14	Rp 134.027.872.203	Rp (20.558.681.201)	Rp 145.798.601.151	0	25,6213	-0,1410	1	20
48	INPP	2009	20	Rp 496.197.698.949	Rp 3.610.791.486	Rp 306.551.678.170	0	26,9302	0,0118	0	5
		2010	21	Rp 810.578.823.861	Rp 23.903.676.485	Rp 653.388.261.405	0	27,4210	0,0366	0	6
49	INTP	2009	29	Rp 13.276.515.634.628	Rp 2.746.654.071.082	Rp 12.281.611.249.204	0	30,2170	0,2236	1	20
		2010	29	Rp 15.346.145.677.737	Rp 3.224.941.884.793	Rp 14.311.330.656.183	0	30,3619	0,2253	1	21
50	ISAT	2009	30	Rp 55.041.487.000.000	Rp 1.498.200.000	Rp 53.367.405.000.000	1	31,6391	0,0000	0	15
		2010	33	Rp 52.818.187.000.000	Rp 647.200.000	Rp 53.929.837.000.000	1	31,5979	0,0000	0	16
51	JKON	2009	24	Rp 1.538.696.405.885	Rp 125.968.151.763	Rp 1.453.922.669.399	0	28,0620	0,0866	0	2
		2010	26	Rp 1.952.978.239.516	Rp 115.364.098.213	Rp 1.745.837.322.701	0	28,3004	0,0661	0	3
52	JPRS	2009	17	Rp 353.951.009.577	Rp 1.917.377.909	Rp 376.647.372.920	0	26,5924	0,0051	1	20
		2010	20	Rp 411.281.598.196	Rp 28.445.580.508	Rp 382.616.303.887	0	26,7425	0,0743	1	21
53	JRPT	2009	24	Rp 2.585.475.177.000	Rp 191.705.460.000	Rp 2.398.344.201.500	0	28,5809	0,0799	0	15

		2010	26	Rp 3.295.717.307.000	Rp 264.923.460.000	Rp 2.940.596.242.000	0	28,8236	0,0901	0	16
54	KAEF	2009	28	Rp 1.565.831.266.274	Rp 62.506.876.510	Rp 1.505.750.532.957	0	28,0794	0,0415	1	8
		2010	27	Rp 1.657.291.834.312	Rp 138.716.044.100	Rp 1.611.561.550.293	0	28,1362	0,0861	1	9
55	KARK	2009	20	Rp 776.369.436.981	Rp 9.050.387.147	Rp 648.418.590.660	0	27,3779	0,0140	0	8
		2010	22	Rp 2.957.817.751.026	Rp 80.641.462.046	Rp 1.867.093.594.004	0	28,7155	0,0432	0	9
56	KBLI	2009	20	Rp 490.721.608.249	Rp 20.705.246.594	Rp 548.976.777.342	0	26,9191	0,0377	0	17
		2010	20	Rp 594.563.516.542	Rp 48.315.549.395	Rp 542.642.562.396	0	27,1111	0,0890	0	18
57	KBLM	2009	17	Rp 354.780.873.513	Rp 1.695.130.121	Rp 406.945.751.292	0	26,5948	0,0042	1	17
		2010	17	Rp 403.194.715.268	Rp 3.921.611.855	Rp 378.987.794.391	0	26,7227	0,0103	1	18
58	KDSI	2009	17	Rp 550.691.466.904	Rp 10.510.515.055	Rp 518.206.660.309	0	27,0344	0,0203	1	13
		2010	18	Rp 557.724.815.222	Rp 16.892.153.755	Rp 554.208.141.063	0	27,0471	0,0305	1	14
59	KICI	2009	11	Rp 84.276.874.394	Rp (5.214.569.732)	Rp 85.247.545.281	0	25,1574	-0,0612	1	16
		2010	12	Rp 85.942.208.666	Rp 3.259.699.213	Rp 85.109.541.530	0	25,1769	0,0383	1	17
60	KKG1	2009	10	Rp 272.938.452.858	Rp 32.003.109.187	Rp 249.050.337.490	0	26,3325	0,1285	0	18
		2010	10	Rp 527.245.003.219	Rp 166.026.708.237	Rp 400.091.728.039	0	26,9909	0,4150	0	19
61	KLBF	2009	28	Rp 6.482.446.670.172	Rp 929.003.740.338	Rp 6.093.139.541.035	0	29,5001	0,1525	1	18
		2010	29	Rp 7.032.496.663.288	Rp 1.286.330.026.012	Rp 6.757.471.666.730	0	29,5816	0,1904	1	19
62	KOIN	2009	13	Rp 534.867.684.997	Rp 5.918.854.209	Rp 483.407.597.474	0	27,0053	0,0122	0	1
		2010	13	Rp 510.959.922.868	Rp 6.255.610.415	Rp 522.913.803.933	0	26,9596	0,0120	0	2
63	LAMI	2009	11	Rp 610.489.273.000	Rp 12.602.248.000	Rp 624.920.392.500	0	27,1375	0,0202	0	8
		2010	13	Rp 604.528.491.000	Rp 19.052.278.000	Rp 607.508.882.000	0	27,1277	0,0314	0	9
64	LION	2009	14	Rp 271.366.371.297	Rp 33.613.329.078	Rp 262.254.111.830	0	26,3267	0,1282	1	16
		2010	16	Rp 303.899.974.798	Rp 38.631.299.358	Rp 287.633.173.048	0	26,4400	0,1343	1	17
65	LMPI	2009	14	Rp 540.513.720.495	Rp 5.991.716.796	Rp 550.295.962.222	0	27,0158	0,0109	1	15
		2010	14	Rp 608.920.103.517	Rp 2.794.104.212	Rp 574.716.912.006	0	27,1350	0,0049	1	16
66	LMSH	2009	15	Rp 72.830.915.980	Rp 2.400.507.034	Rp 67.409.360.697	0	25,0114	0,0356	1	19
		2010	17	Rp 78.200.046.845	Rp 7.350.536.344	Rp 75.515.481.413	0	25,0825	0,0973	1	20

67	LPIN	2009	10	Rp 137.909.659.938	Rp 10.210.751.529	Rp 160.424.765.581	0	25,6499	0,0636	1	19
		2010	9	Rp 150.937.167.032	Rp 14.122.435.304	Rp 144.423.413.485	0	25,7401	0,0978	1	20
68	LPKR	2009	26	Rp 12.127.644.010.796	Rp 388.053.495.627	Rp 11.957.710.610.703	0	30,1265	0,0325	0	13
		2010	28	Rp 16.155.384.919.926	Rp 525.345.786.018	Rp 14.141.514.465.361	0	30,4133	0,0371	0	14
69	LSIP	2009	24	Rp 4.845.380.000.000	Rp 707.487.000.000	Rp 4.888.454.000.000	0	29,2090	0,1447	0	13
		2010	26	Rp 5.561.433.000.000	Rp 1.033.329.000.000	Rp 5.203.406.500.000	0	29,3469	0,1986	0	14
70	MAMI	2009	19	Rp 617.996.561.746	Rp 3.012.893.629	Rp 612.545.375.109	0	27,1497	0,0049	0	15
		2010	19	Rp 653.019.389.631	Rp 1.093.221.621	Rp 635.507.975.689	0	27,2049	0,0017	0	16
71	MASA	2009	18	Rp 2.536.045.000.000	Rp 174.860.000.000	Rp 2.457.534.500.000	0	28,5616	0,0712	1	4
		2010	20	Rp 3.038.412.000.000	Rp 176.082.000.000	Rp 2.787.228.500.000	0	28,7424	0,0632	1	5
72	MERK	2009	16	Rp 433.970.635.000	Rp 146.700.178.000	Rp 404.517.563.500	0	26,7962	0,3627	1	28
		2010	23	Rp 434.768.493.000	Rp 118.794.278.000	Rp 434.369.564.000	0	26,7981	0,2735	1	29
73	MICE	2009	16	Rp 290.724.083.702	Rp 30.344.947.163	Rp 279.676.589.071	0	26,3956	0,1085	0	4
		2010	17	Rp 371.830.822.852	Rp 28.153.692.778	Rp 331.277.483.277	0	26,6417	0,0850	0	5
74	MNCN	2009	23	Rp 7.641.364.000.000	Rp 385.617.178.000	Rp 7.828.243.000.000	0	29,6646	0,0493	0	2
		2010	25	Rp 8.196.543.000.000	Rp 730.218.000.000	Rp 7.918.953.500.000	0	29,7347	0,0922	0	3
75	MPPA	2009	15	Rp 10.560.144.000.000	Rp 300.035.000.000	Rp 10.180.436.500.000	1	29,9881	0,0295	0	17
		2010	16	Rp 11.420.600.000.000	Rp 5.800.640.000.000	Rp 10.990.372.000.000	1	30,0664	0,5278	0	18
76	MRAT	2009	25	Rp 365.635.717.933	Rp 21.016.846.720	Rp 360.208.170.948	0	26,6249	0,0583	1	14
		2010	26	Rp 368.352.442.915	Rp 24.418.796.930	Rp 375.994.080.424	0	26,6323	0,0649	1	15
77	MTDL	2009	19	Rp 1.059.054.196.506	Rp 10.064.638.280	Rp 1.173.924.850.355	1	27,6884	0,0086	0	19
		2010	21	Rp 945.242.001.932	Rp 30.438.567.670	Rp 1.002.148.099.219	1	27,5747	0,0304	0	20
78	MYOH	2009	15	Rp 6.930.528.496	Rp (515.293.984)	Rp 7.238.667.694	0	22,6592	-0,0712	0	9
		2010	15	Rp 3.062.204.781	Rp 351.758.748	Rp 4.996.366.639	0	21,8424	0,0704	0	10
79	MYOR	2009	15	Rp 3.246.498.515.952	Rp 372.157.912.334	Rp 3.084.748.465.494	1	28,8086	0,1206	1	19
		2010	15	Rp 4.399.191.135.535	Rp 484.086.202.515	Rp 3.822.844.825.744	1	29,1124	0,1266	1	20
80	PDES	2009	9	Rp 171.198.671.398	Rp 4.008.121.892	Rp 172.209.085.365	0	25,8661	0,0233	0	1

		2010	10	Rp 208.545.889.568	Rp 4.401.393.768	Rp 189.872.280.483	0	26,0634	0,0232	0	2
81	PGLI	2009	9	Rp 42.462.999.258	Rp 317.783.624	Rp 43.169.312.717	0	24,4719	0,0074	0	9
		2010	9	Rp 41.784.426.250	Rp 140.020.443	Rp 42.123.712.754	0	24,4558	0,0033	0	10
82	PJAA	2009	24	Rp 1.529.437.482.328	Rp 137.389.481.212	Rp 1.430.364.509.499	0	28,0559	0,0961	0	5
		2010	29	Rp 1.569.188.387.540	Rp 141.757.611.224	Rp 1.549.312.934.934	0	28,0816	0,0915	0	6
83	PSAB	2009	14	Rp 15.081.493.962	Rp 151.227.693	Rp 14.340.788.832	0	23,4367	0,0105	0	2
		2010	17	Rp 14.480.759.070	Rp 88.166.918	Rp 14.781.126.516	0	23,3961	0,0060	0	3
84	PSKT	2009	9	Rp 28.563.964.237	Rp 618.543.084	Rp 28.265.775.536	0	24,0754	0,0219	0	14
		2010	8	Rp 29.277.627.037	Rp 677.273.410	Rp 28.920.795.637	0	24,1001	0,0234	0	15
85	PTBA	2009	31	Rp 8.078.578.000.000	Rp 2.727.734.000.000	Rp 7.092.485.000.000	0	29,7202	0,3846	0	7
		2010	31	Rp 8.722.699.000.000	Rp 2.008.891.000.000	Rp 8.400.638.500.000	0	29,7969	0,2391	0	8
86	PTSN	2009	23	Rp 899.685.312.962	Rp (36.312.861.204)	Rp 932.135.318.029	0	27,5253	-0,0390	1	2
		2010	24	Rp 825.566.764.849	Rp (12.611.917.439)	Rp 862.626.038.906	0	27,4393	-0,0146	1	3
87	RAJA	2009	7	Rp 70.062.068.674	Rp 132.013.967	Rp 70.406.344.427	0	24,9726	0,0019	0	3
		2010	21	Rp 917.864.720.226	Rp 925.192.743	Rp 493.963.394.450	0	27,5453	0,0019	0	4
88	RALS	2009	15	Rp 3.209.210.000.000	Rp 334.763.000.000	Rp 3.106.634.500.000	0	28,7970	0,1078	0	13
		2010	15	Rp 3.485.982.000.000	Rp 354.752.000.000	Rp 3.347.596.000.000	0	28,8798	0,1060	0	14
89	RBMS	2009	14	Rp 119.183.355.777	Rp 117.184.933	Rp 118.744.050.721	0	25,5039	0,0010	0	12
		2010	16	Rp 117.301.086.414	Rp 468.657.904	Rp 118.242.221.096	0	25,4880	0,0040	0	13
90	RDTX	2009	9	Rp 651.180.109.447	Rp 102.549.419.772	Rp 616.055.593.238	0	27,2021	0,1665	1	19
		2010	8	Rp 852.447.473.948	Rp 170.899.769.276	Rp 751.813.791.698	0	27,4714	0,2273	1	20
91	RICY	2009	12	Rp 599.719.424.656	Rp 3.572.481.645	Rp 622.738.117.365	1	27,1197	0,0057	1	11
		2010	17	Rp 613.323.196.638	Rp 10.817.923.214	Rp 606.521.310.647	1	27,1422	0,0178	1	12
92	SCBD	2009	18	Rp 3.803.478.613.000	Rp 265.350.685.000	Rp 3.941.047.706.500	0	28,9669	0,0673	0	7
		2010	14	Rp 3.475.736.555.000	Rp 76.489.042.000	Rp 3.639.607.584.000	0	28,8768	0,0210	0	8
93	SCMA	2009	21	Rp 2.359.836.581.000	Rp 285.453.430.000	Rp 2.341.069.241.000	0	28,4896	0,1219	0	7
		2010	22	Rp 2.515.567.387.000	Rp 530.127.428.000	Rp 2.437.701.984.000	0	28,5535	0,2175	0	8

94	SGRO	2009	26	Rp 2.261.798.329.000	Rp 281.766.208.000	Rp 2.208.981.126.000	0	28,4472	0,1276	0	2
		2010	26	Rp 2.875.847.106.000	Rp 451.716.811.000	Rp 2.568.822.672.500	0	28,6874	0,1758	0	3
95	SIAP	2009	17	Rp 147.434.615.301	Rp 3.122.759.054	Rp 144.825.403.292	0	25,7167	0,0216	1	1
		2010	17	Rp 150.912.563.271	Rp 4.023.911.407	Rp 149.173.589.286	0	25,7400	0,0270	1	2
96	SIPD	2009	20	Rp 1.641.295.139.974	Rp 37.215.492.047	Rp 1.513.143.633.488	0	28,1265	0,0246	1	13
		2010	21	Rp 2.055.743.204.664	Rp 61.148.306.170	Rp 1.848.519.172.319	0	28,3517	0,0331	1	14
97	SKLT	2009	9	Rp 196.186.028.659	Rp 12.802.527.979	Rp 198.594.739.030	0	26,0023	0,0645	1	16
		2010	12	Rp 199.375.422.469	Rp 4.833.843.650	Rp 197.780.735.564	0	26,0185	0,0244	1	17
98	SMDM	2009	14	Rp 2.048.242.028.932	Rp 2.357.598.955	Rp 2.039.895.542.999	0	28,3480	0,0012	0	14
		2010	16	Rp 2.063.046.866.205	Rp (1.839.846.919)	Rp 2.055.644.447.569	0	28,3552	-0,0009	0	15
99	SMGR	2009	33	Rp 12.951.308.161.000	Rp 3.326.487.957.000	Rp 11.786.135.942.500	0	30,1922	0,2822	1	18
		2010	34	Rp 15.562.999.946.000	Rp 3.633.219.892.000	Rp 14.257.154.053.500	0	30,3759	0,2548	1	19
100	SMRA	2009	23	Rp 4.460.277.206.000	Rp 167.342.743.000	Rp 4.045.123.168.500	1	29,1262	0,0414	0	19
		2010	23	Rp 6.139.640.438.000	Rp 233.477.896.000	Rp 5.299.958.822.000	1	29,4458	0,0441	0	20
101	SMSM	2009	21	Rp 941.651.276.002	Rp 132.850.275.038	Rp 935.702.229.888	0	27,5709	0,1420	1	13
		2010	22	Rp 1.067.103.249.531	Rp 150.420.111.988	Rp 1.004.377.262.767	0	27,6960	0,1498	1	14
102	SSIA	2009	22	Rp 2.235.441.508.554	Rp 17.598.623.843	Rp 2.243.405.446.163	0	28,4355	0,0078	0	12
		2010	21	Rp 2.382.641.539.976	Rp 115.588.154.217	Rp 2.309.041.524.265	0	28,4992	0,0501	0	13
103	SUGI	2009	8	Rp 37.761.429.160	Rp (2.321.331.174)	Rp 40.746.542.204	0	24,3546	-0,0570	0	7
		2010	8	Rp 40.819.189.042	Rp 2.266.092.168	Rp 39.290.309.101	0	24,4324	0,0577	0	8
104	TCID	2009	12	Rp 994.620.225.969	Rp 124.611.778.666	Rp 952.704.951.767	0	27,6256	0,1308	1	16
		2010	12	Rp 1.047.238.440.003	Rp 131.445.098.783	Rp 1.020.929.332.986	0	27,6772	0,1288	1	17
105	TINS	2009	33	Rp 4.855.712.000.000	Rp 313.751.000.000	Rp 5.320.357.500.000	0	29,2112	0,0590	0	14
		2010	36	Rp 5.881.108.000.000	Rp 947.936.000.000	Rp 5.368.410.000.000	0	29,4028	0,1766	0	15
106	TLKM	2009	29	Rp 97.814.460.000.000	Rp 11.398.826.000.000	Rp 94.535.355.000.000	0	32,2141	0,1206	0	14
		2010	31	Rp 99.758.447.000.000	Rp 11.536.999.000.000	Rp 98.786.453.500.000	0	32,2338	0,1168	0	15
107	TMPO	2009	18	Rp 137.750.367.000	Rp 1.444.208.000	Rp 136.173.094.000	0	25,6487	0,0106	0	8

		2010	18	Rp 154.506.290.000	Rp 5.352.205.000	Rp 146.128.328.500	0	25,7635	0,0366	0	9
108	TOTL	2009	21	Rp 1.289.548.788.907	Rp 52.030.426.029	Rp 1.313.589.713.932	0	27,8853	0,0396	0	3
		2010	27	Rp 1.589.349.600.405	Rp 80.772.332.027	Rp 1.439.449.194.656	0	28,0943	0,0561	0	4
109	TPIA	2009	26	Rp 2.747.915.000.000	Rp 482.884.000.000	Rp 2.561.290.500.000	0	28,6419	0,1885	0	1
		2010	27	Rp 3.003.086.000.000	Rp 348.287.000.000	Rp 2.875.500.500.000	0	28,7307	0,1211	0	2
110	TRIL	2009	11	Rp 270.576.772.699	Rp 1.559.360.664	Rp 279.805.917.742	0	26,3238	0,0056	0	1
		2010	11	Rp 324.671.213.641	Rp 1.688.818.499	Rp 297.623.993.170	0	26,5061	0,0057	0	2
111	TSPC	2009	13	Rp 3.263.102.915.008	Rp 359.946.376.338	Rp 3.115.079.985.229	0	28,8137	0,1155	1	15
		2010	14	Rp 3.589.595.911.220	Rp 488.889.258.921	Rp 3.426.349.413.114	0	28,9091	0,1427	1	16
112	ULTJ	2009	18	Rp 1.732.701.994.634	Rp 61.152.852.190	Rp 1.725.849.693.331	0	28,1807	0,0354	1	19
		2010	18	Rp 2.006.595.762.260	Rp 107.123.243.835	Rp 1.869.648.878.447	0	28,3275	0,0573	1	20
113	UNTR	2009	33	Rp 24.404.828.000.000	Rp 3.817.541.000.000	Rp 23.626.274.500.000	0	30,8258	0,1616	0	20
		2010	33	Rp 29.700.914.000.000	Rp 3.872.931.000.000	Rp 27.052.871.000.000	0	31,0222	0,1432	0	21
114	UNVR	2009	28	Rp 7.848.990.000.000	Rp 3.044.107.000.000	Rp 6.994.863.000.000	0	29,6914	0,4352	1	27
		2010	31	Rp 8.701.262.000.000	Rp 3.386.970.000.000	Rp 8.093.126.000.000	0	29,7945	0,4185	1	28
115	WIKA	2009	28	Rp 5.700.613.602.000	Rp 189.222.076.000	Rp 5.736.018.706.000	0	29,3716	0,0330	0	2
		2010	30	Rp 6.286.304.902.000	Rp 284.922.192.000	Rp 5.993.459.252.000	0	29,4694	0,0475	0	3
116	YPAS	2009	15	Rp 191.136.146.962	Rp 18.540.681.482	Rp 185.842.947.851	0	25,9763	0,0998	1	1
		2010	20	Rp 200.856.257.619	Rp 21.186.130.131	Rp 195.996.202.291	0	26,0259	0,1081	1	2
117	ZBRA	2009	16	Rp 70.586.524.661	Rp (7.658.946.331)	Rp 73.657.835.485	0	24,9801	-0,1040	0	18
		2010	14	Rp 62.198.730.006	Rp (9.423.392.525)	Rp 66.392.627.334	0	24,8536	-0,1419	0	19

## Lampiran 8. Statistik Deskriptif

	ISR	SIZE	PROFIT	AGE
Mean	19.24670	27.55214	0.062209	11.15859
Median	18.00000	27.61335	0.047539	12.00000
Maximum	36.00000	32.35714	0.282237	29.00000
Minimum	6.000000	21.84240	-0.153864	1.000000
Std. Dev.	6.884054	1.850040	0.074767	6.663960
Skewness	0.397408	-0.121571	0.248030	-0.074263
Kurtosis	2.367185	3.182361	3.980974	1.730737
Jarque-Bera	9.762779	0.873701	11.42932	15.44630
Probability	0.007586	0.646068	0.003297	0.000442
Sum	4369.000	6254.335	14.12145	2533.000
Sum Sq. Dev.	10710.19	773.5181	1.263349	10036.29
Observations	227	227	227	227

### Lampiran 9. Statistik Deskriptif Skewness

#### Sebelum Outlier Dikeluarkan

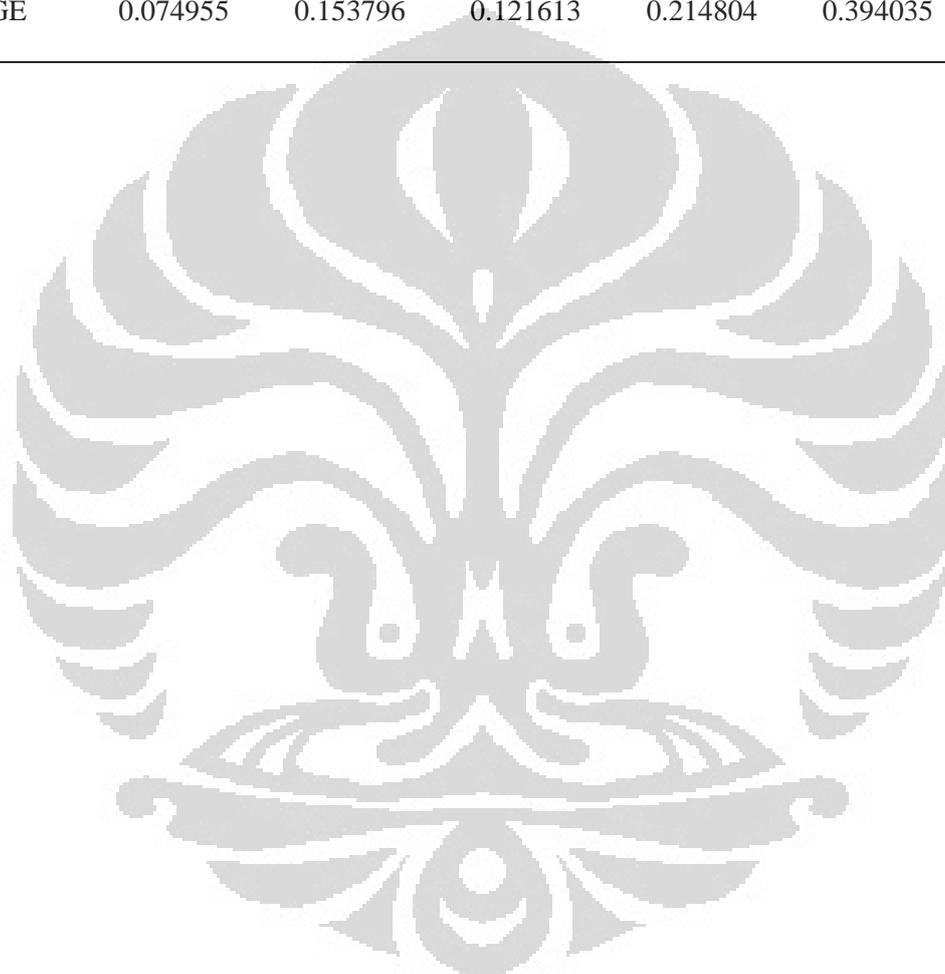
Descriptive Statistics						
	N	Mean		Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error
ISR	234	19,3504	,45379	6,94159	,379	,159
SIZE	234	27,5878	,12075	1,84710	-,146	,159
PROFIT	234	,0698	,00637	,09742	,991	,159
AGE	234	11,4231	,44850	6,86070	,008	,159

#### Setelah Outlier Dikeluarkan

Descriptive Statistics						
	N	Mean		Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error
ISR	227	19,2467	,45691	6,88405	,400	,162
SIZE	227	27,5521	,12279	1,85004	-,122	,162
PROFIT	227	,0622	,00496	,07477	,250	,162
AGE	227	11,1586	,44230	6,66396	-,075	,162

### Lampiran 10. Matriks Korelasi Pearson

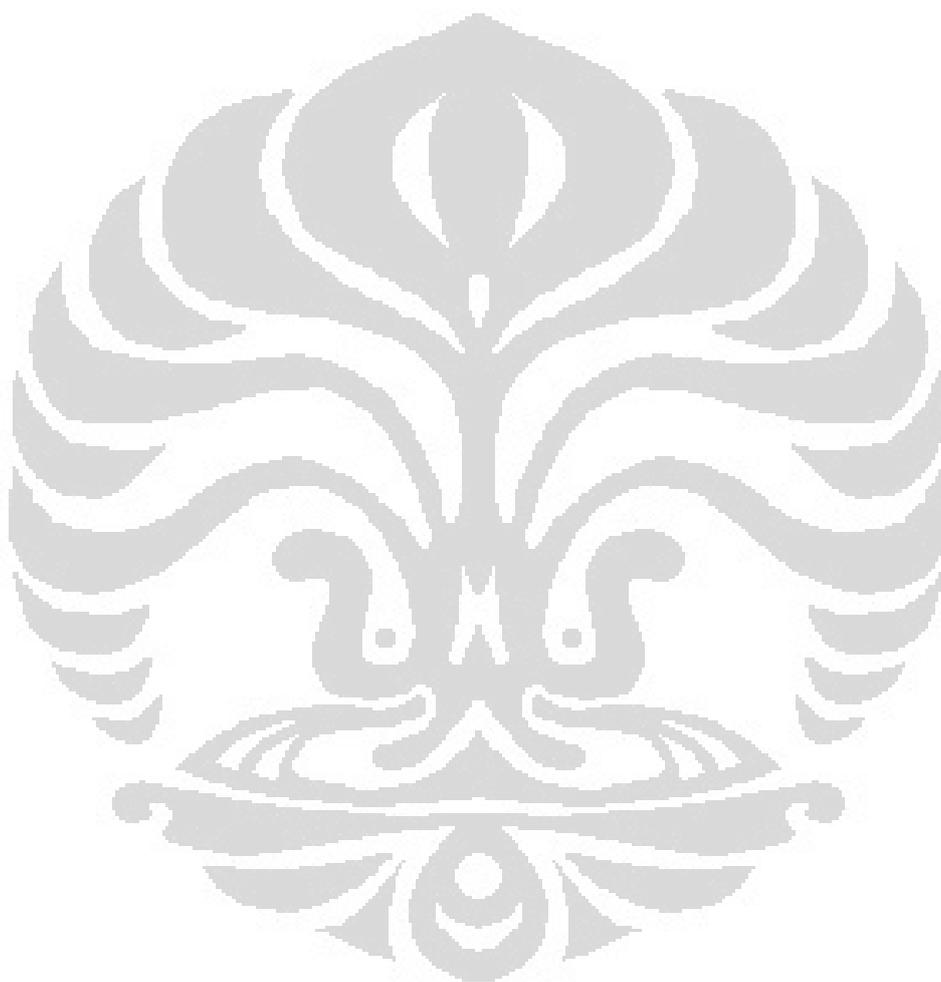
	ISR	DSUKUK	SIZE	PROFIT	DINDS	AGE
ISR	1.000000	0.065673	0.646107	0.396226	-0.047746	0.074955
DSUKUK	0.065673	1.000000	0.201822	-0.080641	-0.002702	0.153796
SIZE	0.646107	0.201822	1.000000	0.459815	-0.040822	0.121613
PROFIT	0.396226	-0.080641	0.459815	1.000000	0.207077	0.214804
DINDS	-0.047746	-0.002702	-0.040822	0.207077	1.000000	0.394035
AGE	0.074955	0.153796	0.121613	0.214804	0.394035	1.000000



**Lampiran 11. Uji Harvey**

## Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	1.240850	Prob. F(5,221)	0.2910
Obs*R-squared	6.198670	Prob. Chi-Square(5)	0.2874
Scaled explained SS	3.978332	Prob. Chi-Square(5)	0.5525



## Lampiran 12. Hasil Regresi Model

Dependent Variable: ISR  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/11/11 Time: 15:50  
 Sample: 1 227  
 Included observations: 227

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41.97045	5.998721	-6.996565	0.0000
DSUKUK	-1.296240	1.371420	-0.945181	0.3456
SIZE	2.205312	0.226175	9.750473	0.0000
PROFIT	12.00832	5.717188	2.100389	0.0368
DINDS	-0.761727	0.758477	-1.004285	0.3163
AGE	0.001929	0.054607	0.035333	0.9718
R-squared	0.434314	Mean dependent var		19.24670
Adjusted R-squared	0.421516	S.D. dependent var		6.884054
S.E. of regression	5.235884	Akaike info criterion		6.175024
Sum squared resid	6058.600	Schwarz criterion		6.265552
Log likelihood	-694.8653	Hannan-Quinn criter.		6.211554
F-statistic	33.93525	Durbin-Watson stat		2.001895
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimation Command:

LS ISR C DSUKUK SIZE PROFIT DINDS AGE

Estimation Equation:

ISR = C(1) + C(2)\*DSUKUK + C(3)\*SIZE + C(4)\*PROFIT + C(5)\*DINDS + C(6)\*AGE

Substituted Coefficients:

ISR = -41.9704451654 - 1.29624000574\*DSUKUK + 2.20531231265\*SIZE + 12.0083177153\*PROFIT - 0.761726868649\*DINDS + 0.00192942844063\*AGE

## Lampiran 13. Hasil Regresi Model Interaksi 1

Dependent Variable: ISR  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/11/11 Time: 11:29  
 Sample: 1 227  
 Included observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41.83971	5.985850	-6.989769	0.0000
SIZE*(SIZE*(DSUKUK=0),T=1)	2.181519	0.225234	9.685572	0.0000
SIZE*(SIZE*(DSUKUK=0),T=2)	2.216246	0.222739	9.949957	0.0000
SIZE*(SIZE*(DSUKUK=1),T=1)	2.295169	0.295914	7.756213	0.0000
SIZE*(SIZE*(DSUKUK=1),T=2)	2.357470	0.307782	7.659543	0.0000
PROFIT*(PROFIT*(DSUKUK=0),T=1)	9.604794	7.897455	1.216189	0.2253
PROFIT*(PROFIT*(DSUKUK=0),T=2)	13.81881	7.104694	1.945025	0.0531
PROFIT*(PROFIT*(DSUKUK=1),T=1)	-34.25889	54.63897	-0.627005	0.5313
PROFIT*(PROFIT*(DSUKUK=1),T=2)	-87.10148	57.17783	-1.523344	0.1291
AGE*(AGE*(DSUKUK=0),T=1)	-0.005839	0.078520	-0.074369	0.9408
AGE*(AGE*(DSUKUK=0),T=2)	-0.025188	0.077812	-0.323700	0.7465
AGE*(AGE*(DSUKUK=1),T=1)	-0.250139	0.423237	-0.591014	0.5551
AGE*(AGE*(DSUKUK=1),T=2)	-0.031548	0.440998	-0.071538	0.9430
R-squared	0.452294	Mean dependent var		19.24670
Adjusted R-squared	0.421581	S.D. dependent var		6.884054
S.E. of regression	5.235587	Akaike info criterion		6.204399
Sum squared resid	5866.034	Schwarz criterion		6.400541
Log likelihood	-691.1992	Hannan-Quinn criter.		6.283545
F-statistic	14.72671	Durbin-Watson stat		1.951107
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimation Command:

```
LS ISR C SIZE*@EXPAND(DSUKUK,T) PROFIT*@EXPAND(DSUKUK,T)
AGE*@EXPAND(DSUKUK,T)
```

Estimation Equation:

$$\begin{aligned} \text{ISR} = & C(1) + C(2)*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=1) + C(3)*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=2) + \\ & C(4)*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=1) + C(5)*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=2) + \\ & C(6)*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=1) + C(7)*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=2) + \\ & C(8)*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=1) + C(9)*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=2) + \\ & C(10)*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=1) + C(11)*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=2) + \\ & C(12)*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=1) + C(13)*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=2) \end{aligned}$$

Substituted Coefficients:

$$\begin{aligned} \text{ISR} = & -41.8397081111 + 2.18151869962*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=1) + \\ & 2.2162464525*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=2) + 2.29516928884*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=1) + \\ & 2.35747007616*\text{SIZE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=2) + 9.60479377777*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=1) + \\ & 13.8188068257*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=2) - 34.2588949734*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=1) - \\ & 87.1014763386*\text{PROFIT}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=2) - 0.00583942795196*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=1) - \\ & 0.0251876109709*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=0 \text{ AND } T=2) - 0.250138738032*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=1) - \\ & 0.0315482504526*\text{AGE}*(\text{DSUKUK}=1 \text{ AND } T=2) \end{aligned}$$

## Lampiran 14. Hasil Regresi Model Interaksi 2

Dependent Variable: ISR  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/11/11 Time: 11:28  
 Sample: 1 227  
 Included observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-40.10683	5.812249	-6.900397	0.0000
SIZE*(SIZE*(DINDS=0),T=1)	2.094338	0.219995	9.519928	0.0000
SIZE*(SIZE*(DINDS=0),T=2)	2.124148	0.218749	9.710445	0.0000
SIZE*(SIZE*(DINDS=1),T=1)	2.224350	0.236479	9.406129	0.0000
SIZE*(SIZE*(DINDS=1),T=2)	2.246771	0.232513	9.662985	0.0000
PROFIT*(PROFIT*(DINDS=0),T=1)	11.44060	9.735664	1.175123	0.2413
PROFIT*(PROFIT*(DINDS=0),T=2)	16.56028	8.886204	1.863595	0.0637
PROFIT*(PROFIT*(DINDS=1),T=1)	11.62583	12.39743	0.937761	0.3494
PROFIT*(PROFIT*(DINDS=1),T=2)	11.99478	10.92907	1.097511	0.2737
AGE*(AGE*(DINDS=0),T=1)	0.067100	0.094086	0.713177	0.4765
AGE*(AGE*(DINDS=0),T=2)	0.061797	0.096379	0.641183	0.5221
AGE*(AGE*(DINDS=1),T=1)	-0.257250	0.166279	-1.547096	0.1233
AGE*(AGE*(DINDS=1),T=2)	-0.206235	0.156206	-1.320274	0.1882
R-squared	0.452897	Mean dependent var		19.24670
Adjusted R-squared	0.422218	S.D. dependent var		6.884054
S.E. of regression	5.232704	Akaike info criterion		6.203297
Sum squared resid	5859.575	Schwarz criterion		6.399439
Log likelihood	-691.0742	Hannan-Quinn criter.		6.282443
F-statistic	14.76260	Durbin-Watson stat		2.071740
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimation Command:

```
LS ISR C SIZE*@EXPAND(DINDS,T) PROFIT*@EXPAND(DINDS,T) AGE*@EXPAND(DINDS,T)
```

Estimation Equation:

$$\begin{aligned} \text{ISR} = & C(1) + C(2)*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=1) + C(3)*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=2) + \\ & C(4)*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=1) + C(5)*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=2) + C(6)*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } \\ & T=1) + C(7)*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=2) + C(8)*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=1) + \\ & C(9)*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=2) + C(10)*\text{AGE}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=1) + C(11)*\text{AGE}*(\text{DINDS}=0 \\ & \text{ AND } T=2) + C(12)*\text{AGE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=1) + C(13)*\text{AGE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=2) \end{aligned}$$

Substituted Coefficients:

$$\begin{aligned} \text{ISR} = & -40.1068278877 + 2.09433813605*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=1) + 2.12414774399*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=0 \\ & \text{ AND } T=2) + 2.22435023151*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=1) + 2.24677101929*\text{SIZE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=2) + \\ & 11.4406032002*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=1) + 16.560283688*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=2) + \\ & 11.6258330927*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=1) + 11.9947784913*\text{PROFIT}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=2) + \\ & 0.067099825114*\text{AGE}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=1) + 0.0617967755674*\text{AGE}*(\text{DINDS}=0 \text{ AND } T=2) - \\ & 0.257249998277*\text{AGE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=1) - 0.206234773503*\text{AGE}*(\text{DINDS}=1 \text{ AND } T=2) \end{aligned}$$